



TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMETASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NTB
BERSAING DALAM PENINGKATAN INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
DI NUSA TENGGARA BARAT**



**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Magister Administrasi Publik**

**Disusun Oleh :
I s w a n d i
NIM: 015772586**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
UPBJJ MATARAM
2012**

ABSTRACT**Implementation Development Policy NTB Compete In The increase in the Human Development Index (HDI) in West Nusa Tenggara****Iswandi****Indonesia Open University****Iswandi15@yahoo.com****Keywords: Policy Development, Policy Implementation, Human Development Index (HDI)**

The low HDI NTB that never moved from the position number 32 in the last ten years, has pushed NTB provincial government set a policy to accelerate the development of improved IPM. The policy stated Regional Regulation No. 1 of 2009 on the Medium Term Development Plan 2009-2013 Year known as NTB Compete development policy.

In writing this TAPM has done research on Development Policy Implementation NTB Compete In The increase in the Human Development Index (HDI) in NTB. His research uses descriptive research method that combines (mixmethod) quantitative and qualitative data. Research purposes to describe, analyze and interpret concerning: (1) Implementation of development policies NTB Compete, (2) factors supporting and inhibiting factors NTB Compete implementation of development policies, and (3) Impact of the implementation of development policies NTB Compete against HDI.

Implementation of development policies NTB Compete aims to reduce maternal mortality to zero, lowering the dropout rate to zero, and the lower the illiteracy rate to zero. The program conducted by the Movement 3A known and Implementor involves three essential elements of mutual support, namely the local government, private sector and civil society.

Seen G3A process and implementation phases, namely (1) socialization and dissemination, (2) organization, (3) penyusunan work program, (4) implementation, (5) control and supervision, and (6) reporting; concluded G3A policy has been implemented properly. Even the effect has been to increase the reduction shortfaal IPM NTB.

Beneficiaries agreed that the implementation of the policy G3A G3A continued and upgraded to materialize into a community movement. Communication factor has successfully implemented the transformation policies correctly and consistently to the target groups. Similarly, the disposition of the implementor factor G3A policy is so strong and has created a public perception that the program be continued and enhanced G3A. However, resource limitations of factors, both human resources, budget and equipment support has led to the implementation of the policy has not been effective enough G3A role IPM NTB raised position. It is also influenced by the structure of the bureaucracy at the provincial and district / municipal NTB G3A not support the implementation of the policy as a movement for social change.

After G3A policy implementation, improved IPM NTB very progressive, so it is recommended that development policy NTB Competing through G3A strengthened in a form of local regulations that institutionalization and sustainability as a social movement can be realized.

UNIVERSITAS TERBUKA

ABSTRAK

Implementasi Kebijakan Pembangunan NTB Bersaing Dalam Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Nusa Tenggara Barat

Iswandi

Universitas Terbuka

Iswandi15@yahoo.com

Kata Kunci: Kebijakan Pembangunan, Implementasi Kebijakan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Masih rendahnya IPM NTB yang tidak pernah beranjak dari posisi nomor 32 dalam sepuluh tahun terakhir, telah mendorong Pemerintah Provinsi NTB menetapkan suatu kebijakan pembangunan yang dapat mempercepat peningkatan IPM. Kebijakan tersebut tertuang Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2013 yang dikenal dengan kebijakan pembangunan NTB Bersaing.

Dalam penulisan TAPM ini telah dilakukan penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pembangunan NTB Bersaing Dalam Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di NTB. Penelitiannya menggunakan metode penelitian deskriptif yang menggabungkan (*mixmethod*) data kuantitatif dan kualitatif. Tujuan penelitian mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan tentang : (1) Implementasi kebijakan pembangunan NTB Bersaing; (2) Faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan pembangunan NTB Bersaing; dan (3) Dampak implementasi kebijakan pembangunan NTB Bersaing terhadap IPM.

Implementasi kebijakan pembangunan NTB Bersaing bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu menuju nol, menurunkan angka drop out menuju nol, serta menurunkan angka buta aksara menuju nol. Program yang dilaksanakan dikenal dengan Gerakan 3A dan Implementor melibatkan tiga unsur penting yang saling mendukung, yaitu jajaran pemerintah daerah, swasta dan masyarakat sipil.

Dilihat proses dan tahapan pelaksanaan G3A, yakni (1) sosialisasi dan diseminasi; (2) pengorganisasian; (3) penyusunan program kerja; (4) pelaksanaan; (5) pengendalian dan pengawasan; serta (6) pelaporan; disimpulkan kebijakan G3A telah diimplementasikan dengan baik. Bahkan dampaknya telah dapat meningkatkan angka reduksi shortfaal IPM NTB.

Penerima manfaat program G3A sepakat agar implementasi kebijakan G3A diteruskan dan ditingkatkan sampai terwujud menjadi suatu gerakan masyarakat. Faktor komunikasi telah berhasil melaksanakan transformasi kebijakan secara tepat dan konsisten kepada kelompok sasaran. Demikian pula dengan faktor disposisi dari para implementor kebijakan G3A demikian kuat dan telah membentuk suatu persepsi publik agar program G3A terus dilanjutkan serta ditingkatkan. Namun keterbatasan faktor sumberdaya, baik sumberdaya manusia, anggaran dan perlengkapan pendukung telah menyebabkan implementasi kebijakan G3A belum cukup efektif

berperan mengangkat posisi IPM NTB. Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor struktur birokrasi di Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-NTB yang belum mendukung implementasi kebijakan G3A sebagai suatu gerakan perubahan sosial.

Setelah implementasi kebijakan G3A, peningkatan IPM NTB sangat progresif, sehingga direkomendasikan agar kebijakan pembangunan NTB Bersaing melalui program G3A diperkuat dalam bentuk peraturan daerah sehingga pelebagaan dan keberlanjutannya sebagai gerakan masyarakat dapat terwujud.

UNIVERSITAS TERBUKA

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Implementasi Kebijakan Pembangunan NTB Bersaing dalam Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Nusa Tenggara Barat adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Mataram, 06 September 2012.

Yang menyatakan



ISWANDI

NIM: 015772586

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Impelemntasi Kebijakan Pembangunan NTB
Bersaing dalam Peningkatan Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) di Nusa Tenggara Barat

Penyusun TAPM : Iswandi
NIM : 015772586
Program Studi : Magister Adminsitrasi Publik
Hari/Tanggal : 19 September 2012

Menyetujui:

Pembimbing



Dr. H. Manggaukang Raba, MM
NIP.19611231198603 1 172

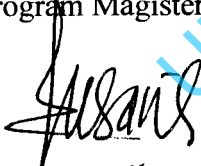
Pembimbing II



Suciati, M.Sc,Ph.D
NIP-19520213 198503 2 001

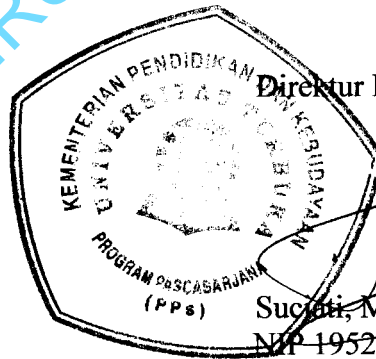
Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu/
Program Magister



Dra. Susanti, M.Si
NIP 19671214 199303 2 002

Direktur Program Pascasarjana



Suciati, M.Sc,Ph.D
NIP-19520213 198503 2 001

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : Iswandi
 NIM : 015772586
 Program Studi : Magister Adminsitration Publik
 Judul Tesis : Implementasi Kebijakan Pembangunan NTB Bersaing
 Dalam Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
 di Nusa Tenggara Barat

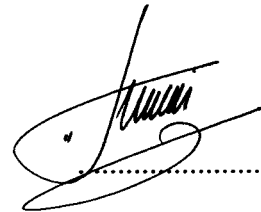
Telah dipertahankan dihadapan Sidang Panitia Penguji Tesis Program Pascaarjana, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 6 September 2012
 Waktu : Jam 15.00 – 17.00 Wita

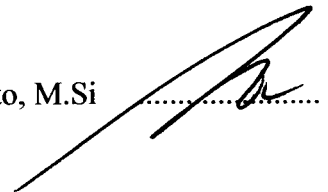
Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua Komisi Penguji : Suciati, M.Sc. Ph.D



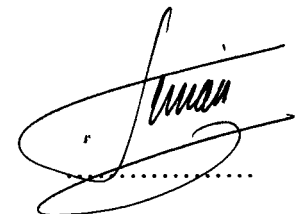
Penguji Ahli : Dr.Liestyodono B. Irianto, M.Si



Pembimbing I : Dr. H. Manggaukang Raba, MM



Pembimbing II : Suciati, M.Sc Ph.D



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wa Syukurillah, segala puja dan puji kehadirat Allah SWT; dengan nikmat dan karunia-NYA penulis telah dapat menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) yang dipersyaratkan oleh Universitas Terbuka untuk pembulatan studi pada Program Magister Magister Administrasi Publik.

Didorong oleh semangat memberikan pengabdian terbaik dalam tugas, penulis terus menggali informasi, membaca dan belajar meningkatkan diri melalui berbagai sumber yang begitu banyak tersedia pada era globalisasi sekarang ini. Juga mencontoh sahabat dan guru-guru penulis yang senantiasa memelihara budaya membaca dan semangat menuntut ilmu seperti yang disunnahkan Rasulullah Muhammad SAW. Demikian akhirnya penulis juga meneruskan pendidikan pada Program Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka.

Penulisan TAPM ini dapat diselesaikan tepat waktu, tentu tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karenanya penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. TGH. Muhammad Zainul Majdi yang terus menerus memacu, mendorong dan menyemangati penulis terus belajar dan meningkatkan kualitas diri;
2. Para pembimbing TAPM, masing-masing Bapak Dr.H.Manggaukang Raba, MM dan Ibu Suciati, M.Sc, Ph.D, serta Bapak Dr.Liestyodono B.Irianto. M.Si selaku penguji ahli;
3. Para Kepala SKPD Pemerintah Provinsi NTB yang bertindak sebagai Implementor Program G3A;
4. Para Informan yang telah memberikan informasi dan data, serta rekan-rekan para sahabat yang terlibat dalam Fokus Group Diskusi (FGD) penelitian ini;

Akhirnya semoga TAPM ini bermanfaat, terutama bagi Ananda Emir dan Akbar, mudah-mudahan menjadi Inspirasi kalian kelak untuk terus belajar dan belajar menuntut ilmu setinggi-tingginya, meraih cita-cita, berbuat baik dan bermanfaat bagi sesama. Himmaturrijal Tahdumul Jibal. Wallahul Muwaffiqu wal Hadi illalsabillirrosyad.

Mataram, 6 September 2012

Penulis,

DAFTAR ISI

Abstract.....	i
Lembar Persetujuan.....	v
Lembar Pengesahan.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	viii
Daftar Gambar.....	ix
Daftar Tabel.....	x
Daftar Lampiran.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Kajian Teori.....	8
B. Harapan Hidup.....	31
C. Rata-rata Lama sekolah.....	33
D. Paritas Daya Beli.....	35
E. Kerangka Berpikir.....	36
F. Definisi Operasional.....	39
BAB III. METODE PENELITIAN.....	42
A. Desain Penelitian.....	42
B. Populasi dan Sampel.....	45
C. Instrumen Penelitian.....	49
D. Prosedur Pengumpulan Data.....	50
E. Metode Analisis Data.....	52
BAB IV. TEMUAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Kebijakan Pembangunan NTB BerSaing.....	54
B. Kebijakan G3A dalam Peningkatan IPM Di NTB.....	55
C. Temuan Lapangan Proses Implementasi Kebijakan.....	61
D. Penyajian Data.....	71
E. Pembahasan.....	86
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN.....	117
A. Simpulan.....	117
B. Saran.....	118
Daftar Pustaka.....	120
Lampiran.....	125

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar.1.1 Kerangka Strategi RPJMD NTB 2009-2013.....	3
Gambar.1.2 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi NTB Tahun 2004-2009.....	4
Gambar.2.1 Pendekatan Sistem Kebijakan Publik.....	12
Gambar.2.2 Saling Hubungan Sistem dan Proses Kebijakan Publik.....	13
Gambar.2.3 Proses Manajemen Implementasi Kebijakan.....	16
Gambar.2.4 Model Proses Implementasi Kebijakan Publik.....	21
Gambar.2.5 Kerangka Berpikir.....	38
Gambar.4.1 Struktur Organisasi dalam Implementasi Program Unggulan G3A.....	66
Gambar.4.2 Persentase Kritik Terhadap Implementasi 3A.....	72
Gambar.4.3 Persentase Persepsi Publik Terhadap Implementasi G3A.....	73
Gambar.4.4 Harapan Publik Terhadap Implementasi G3A di NTB.....	74
Gambar.4.5 Persentase Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Implementasi Gerakan 3A.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel.2.1	Nilai Maksimum dan Minimum IPM Berdasarkan Standar UNDP.....	31
Tabel.3.1	Implementor Gerakan 3A di Provinsi NTB.....	46
Tabel.3.2	Pemetaan Sampel Penelitian.....	47
Tabel.4.1	Indikator dan Target AKINO.....	56
Tabel.4.2	Rencana Kerja dan Target Capaian Kinerja Program ADONO Tahun 2009-2013.....	58
Tabel.4.3	Rencana Kerja dan Target Capaian Kinerja ABSANO.....	60
Tabel.4.4	Rencana Penuntasan Buta Aksara di Provinsi NTB 2009-2013.....	60
Tabel.4.5	Alokasi Anggaran Kegiatan G3A selama Tiga Tahun Terakhir.....	67
Tabel.4.6	Mitra Kerja dan Jenis Kegiatan G3A.....	68

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Nama Informan dan Institusi/ Lembaga Implementor G3A.....	125
2. Daftar Informan Lembaga/ Anggota Sasaran Penerima Manfaat Program ADONO.....	126
3. Daftar Informan Lembaga/ Anggota Sasaran Penerima Manfaat Program ABSANO.....	127
4. Daftar Informan Lembaga/ Anggota Sasaran Penerima Manfaat Program AKINO.....	128
5. Pedoman Wawancara.....	129
6. Pedoman Observasi.....	132
7. Pedoman Focus Group Discussion (FGD).....	134
8. Kuisisioner.....	140
9. Transkrip Wawancara.....	141
10. Transkrip Wawancara	143
11. Transkrip Wawancara	147
12. Transkrip Wawancara.....	150
13. Transkrip Wawancara.....	153
14. Kritik Media terhadap Implementasi G3A.....	156
15. Harapan Publik terhadap Implementasi G3A.....	157
16. Kepuasan Publik terhadap Implementasi G3A.....	158
17. Persepsi Publik terhadap Implementasi G3A.....	159
18. Dokumentasi FGD.....	160

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dikenal dengan Bumi Goro Rancah (Bumi Gora), dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Sebelum Tahun 1958, NTB tergabung dalam Provinsi Sunda Kecil bersama Bali dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Provinsi Bali saat ini sudah termasuk daerah maju, sedangkan NTB dan NTT masih tergolong daerah tertinggal.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa NTT dan NTB berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 termasuk sepuluh provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi. Menurut Faturachman (2007), isu kemiskinan menjadi isu sentral dalam *Millenium Development Goals* atau *MDGs*; yang menjadi akar hilangnya martabat manusia, hilangnya keadilan, belum terciptanya masyarakat madani, tidak berjalannya demokrasi, dan terjadinya degradasi lingkungan. Yasa (2007) juga menyatakan kemiskinan menghambat akses terhadap pemenuhan pendidikan dan kesehatan yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya mutu sumberdaya manusia.

Mutu sumberdaya manusia NTB masih rendah. Hal ini diungkapkan oleh BPS, BAPPENAS dan UNDP dalam laporan pembangunan manusia tahun 2004 bahwa *Human Development Index (HDI)* atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menjadi indikator pembangunan manusia

sebuah negara maupun daerah, dari tahun ke tahun tidak mengalami perubahan yang berarti di Provinsi NTB. Tahun 2002 IPM NTB berada diperingkat 30 dari 33 provinsi dengan nilai 57,8. Tahun 2004 peringkat IPM NTB menurun menjadi nomor 33 walaupun nilai IPM meningkat menjadi 60,6. Selanjutnya pada tahun 2005 sampai dengan 2008 peringkat IPM NTB kembali meningkat satu tingkat pada posisi nomor 32 dari 33 provinsi. Provinsi yang tertinggi IPM-nya adalah DKI Jakarta (76,3), Sulawesi Utara di urutan kedua (74,4), dan Riau urutan ketiga (73,8). Sedangkan Provinsi yang terendah IPM-nya adalah Papua (62,8).

Seluruh Kabupaten / Kota di NTB sejak tahun 2004 sampai dengan 2008 nilai IPM juga masih rendah. Menurut BPS dan BAPPEDA NTB (2010) bahwa rendahnya IPM di setiap Kabupaten/Kota di NTB disebabkan oleh masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dan masih tingginya angka kemiskinan. Untuk mengintervensi permasalahan ini, Pemerintah Provinsi NTB menetapkan suatu kebijakan pembangunan NTB Bersaing.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009 – 2013, ditetapkan bahwa pada Tahun 2013 rangking IPM NTB secara nasional harus meningkat ke deretan bagian tengah diantara berbagai Provinsi yang ada di Indonesia. Target ini merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam implementasi kebijakan pembangunan NTB Bersaing yang dimulai sejak tahun 2009 melalui beberapa sektor dan program unggulan dengan menerapkan strategi percepatan, inovasi dan nilai tambah yang disingkat PIN. Kerangka strategis RPJMD NTB 2009-2013 sebagai grand

desain kebijakan pembangunan NTB BerSAING digambarkan sebagai berikut:

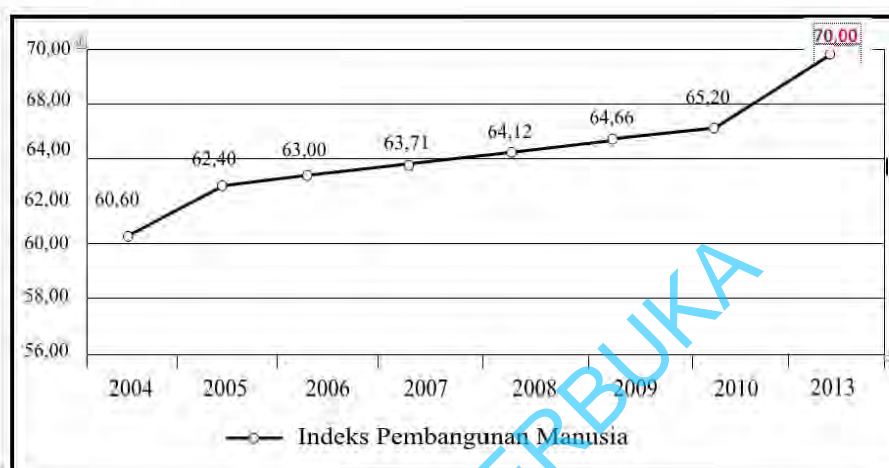


Gambar 1.1: Kerangka Strategi RPJMD NTB 2009-2013

Kebijakan pembangunan NTB Bersaing dalam rangka percepatan peningkatan IPM NTB diantaranya diimplementasikan melalui Gerakan AKINO, ADONO dan ABSANO atau G3A yang diarahkan melakukan intervensi untuk menurunkan angka kematian ibu, angka drop out dan angka buta aksara menuju nol (Sayuti, 2011). Kebijakan pembangunan NTB Bersaing juga diharapkan menjadi daya ungkit (*leverage*) untuk mengentaskan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga daya saing daerah menjadi lebih baik.

BAPPENAS dan Universitas Mataram (2010) melaporkan bahwa indikator IPM NTB selama tahun 2009 memperlihatkan peningkatan yang signifikan, dilihat dari reduksi *shortfall*. Angka reduksi *shortfall* untuk periode waktu tahun 2007-2008 hanya sebesar 1,14. Selanjutnya pada waktu tahun 2008 – 2009 mengalami peningkatan menjadi 1,50. Peningkatan 0,36 point pada *shortfall* pada indikator IPM dapat dikategorikan sebagai provinsi

yang progresif dalam berupaya meningkatkan pencapaian indikator IPM baik untuk aspek pendidikan, kesehatan maupun ekonomi. Secara grafis peningkatan IPM NTB selama enam tahun terakhir dapat dilihat pada gambar 1.2 dibawah ini.



Gambar 1.2: Indeks Pembangunan Manusia Provinsi NTB Tahun 2004-2009

Keberhasilan Provinsi NTB meningkatkan IPM secara signifikan melalui kebijakan pembangunan NTB Bersaing belum dapat merubah ranking atau posisi NTB yang masih menempati urutan ke 32 dari 33 provinsi di Indonesia. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah Provinsi NTB dapat merubah posisinya secara nasional ke deretan tengah diantara provinsi di Indonesia setelah diimplementasikannya kebijakan pembangunan NTB Bersaing.

Pertanyaan di atas telah mendorong penulis untuk mencoba mengkajinya dari sudut pandang administrasi publik dengan menekankan pada aspek implementasi kebijakan publik. Sebab seperti yang dinyatakan oleh Chief J.O Udoji (1981) bahwa “ *the execution of policies is as important if not*

more important than policy making. Policies will remain dreams or blue print in file jackets unless they are implemented" (pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang rapi dalam arsip jika tidak diimplementasikan).

Implementasi kebijakan publik mempunyai arti penting, karena (1) sering terjadi implementasi program yang tidak tepat waktu sehingga terjadi ketidaklancaran dalam pelaksanaannya, yang mana oleh Michael C. Musheno menyebutnya sebagai "*implementation lag*", yaitu waktu yang berlangsung antara "*policy adoption*" dan "*actual programme implementation*"; (2) adanya gejala yang disebut Andrew Dunshire (1978) sebagai "*implementation gap*" yaitu suatu keadaan dimana proses kebijakan selalu terbuka kemungkinan terjadinya gap antara apa yang diharapkan dengan apa yang senyatanya dapat dicapai; (3) untuk meningkatkan apa yang disebut oleh Walter Williams (1975) sebagai "*implementation capacity*" dari pihak-pihak yang dipercaya dalam mengemban tugas mengimplementasikan kebijakan; dan (4) adanya resiko kemungkinan gagalnya suatu kebijakan publik yang oleh Hogwood dan Gunn (1986) disebut sebagai kegagalan kebijakan (*policy failure*), yang dapat disebabkan oleh kebijakan tidak diimplementasikan (*non implementation*) atau karena implementasi yang tidak berhasil (*unsuccessful implementation*).

B. Perumusan Masalah

Untuk memahami fenomena kegagalan atau keberhasilan implementasi kebijakan pembangunan NTB Bersaing dalam peningkatan IPM di NTB, perlu dilakukan studi implementasi. Berdasarkan pada latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka masalah pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- (1) Bagaimana implementasi kebijakan pembangunan NTB Bersaing?
- (2) Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan pembangunan NTB Bersaing?
- (3) Apa dampak implementasi kebijakan pembangunan NTB Bersaing terhadap IPM di NTB?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan tentang:

- (1) Implementasi kebijakan pembangunan NTB Bersaing.
- (2) Faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan pembangunan NTB Bersaing.
- (3) Dampak implementasi kebijakan pembangunan NTB Bersaing terhadap IPM.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Bagi Ilmu Pengetahuan

Setiap kebijakan publik selalu ditindak lanjuti dengan implementasi kebijakan, sebab tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil. Dalam hubungan ini maka kegunaan penelitian ini secara akademis bagi pengembangan ilmu pengetahuan adalah memberikan kontribusi yang baru terhadap perkembangan teori implementasi kebijakan. Juga secara akademis untuk membulatkan studi pada Program Magister Kebijakan Publik Universitas Terbuka.

2. Kegunaan Bagi Institusi

Adapun kegunaan penelitian ini secara praktis bagi institusi Pemerintah Provinsi NTB adalah sebagai bahan masukan pada saat dilaksanakan evaluasi implementasi kebijakan pembangunan NTB Bersaing.

3. Kegunaan Bagi Masyarakat

Selanjutnya kegunaan penelitian ini bagi masyarakat adalah menyediakan informasi tentang faktor-faktor yang dapat menentukan keberhasilan maupun kegagalan implementasi kebijakan NTB Bersaing, sehingga dapat menentukan langkah-langkah aksi dalam berpartisipasi melaksanakan program pembangunan NTB Bersaing menuju masyarakat NTB yang beriman dan berdayasaing.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Penelitian Terdahulu

Menurut Akib (2010) implementasi kebijakan merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran.

Dalam penelitian ini program yang akan diteliti adalah G3A sebagai salah satu program yang ditetapkan dalam implementasi kebijakan pembangunan NTB Bersaing. Sasaran G3A adalah meningkatkan posisi ranking IPM NTB ke posisi papan tengah dari seluruh provinsi di Indonesia. Program kerja G3A sudah tersusun dan dilaksanakan sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang.

Penelitian terdahulu tentang implementasi kebijakan yang terkait dengan indeks pembangunan manusia pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, seperti:

- a. Suradi (2007) Meneliti tentang pembangunan manusia, kemiskinan dan kesejahteraan sosial, kajian tentang kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial di NTB.

- b. Gumilar (2008) meneliti strategi implementasi kebijakan dan manajemen akselarasi penuntasan wajar dikdas Sembilan tahun dengan pendekatan program pendanaan kompetensi indeks pembangunan manusia (PPK-IPM) bidang pendidikan.
- c. Irlandia Ginanjar, Bento Tantular dan Budi Handoko (2009) Melakukan studi awal Upaya Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bandung Barat
- d. Sri Yuwanti dkk (2005) meneliti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Tengah dengan menggunakan metode kualitatif.

Beberapa penelitian tentang indeks pembangunan manusia diatas, dapat dikemukakan paling tidak dua hal penting, yaitu:

Pertama, penelitian tentang indeks pembangunan manusia sudah banyak dilakukan dalam berbagai perspektif, yaitu dalam hubungannya dengan faktor-faktor lain, seperti yang dilakukan oleh: Kusmiwatie, K (2007), dan Hidayat, Kurniawati (2008) yang meneliti korelasi indeks pembangunan manusia dan kemiskinan. Gumilar (2008), melihat hubungan antara wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dengan IPM.

Kedua, penelitian tentang indeks pembangunan manusia lebih banyak didekati dari metodologi statistik, sementara metodologi sosial dan penelitian kebijakan relative masih sedikit, seperti yang dilakukan oleh: Diana (2009), Salam (2008), Faidah (2010) Nur (2010), Sri Yuwanti dkk (2005), Kusmiwatie, K (2007), Sjfaii, Ahmad dkk (2004), dan Hidayat, Kurniawati

(2008). Hanya Gumilar (2008) yang menggunakan metode penelitian kualitatif.

Sementara itu, penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan dari suatu program terpadu, lintas sektoral dan diformulasikan sebagai gerakan masyarakat dengan mencoba menganalisis dampaknya terhadap indeks pembangunan manusia. Apakah G3A sudah diimplementasikan sebagai suatu gerakan masyarakat atau sebagai suatu program rutin semata yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi NTB akan menjadi perhatian utama dalam penelitian ini.

2. Kebijakan Publik

a. Definisi Kebijakan Publik

Definisi kebijakan publik banyak ditemukan dalam berbagai formulasi oleh para ahli. Namun pendapat yang banyak dikutip antara lain dari David Easton (1965) yang mendefinisikannya sebagai akibat aktivitas pemerintah (*the impact of government activity*).

Harold Laswell dan Abraham Kaplan (1970) mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu dan praktik-praktik tertentu (*a projected program of goals, values, and practices*).

Selanjutnya Thomas R.Dye (1995) mendefinisikan kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa

mereka melakukan, dan hasil yang membuat kehidupan bersama tampil berbeda (*what government do, why they do it, and what difference it makes*).

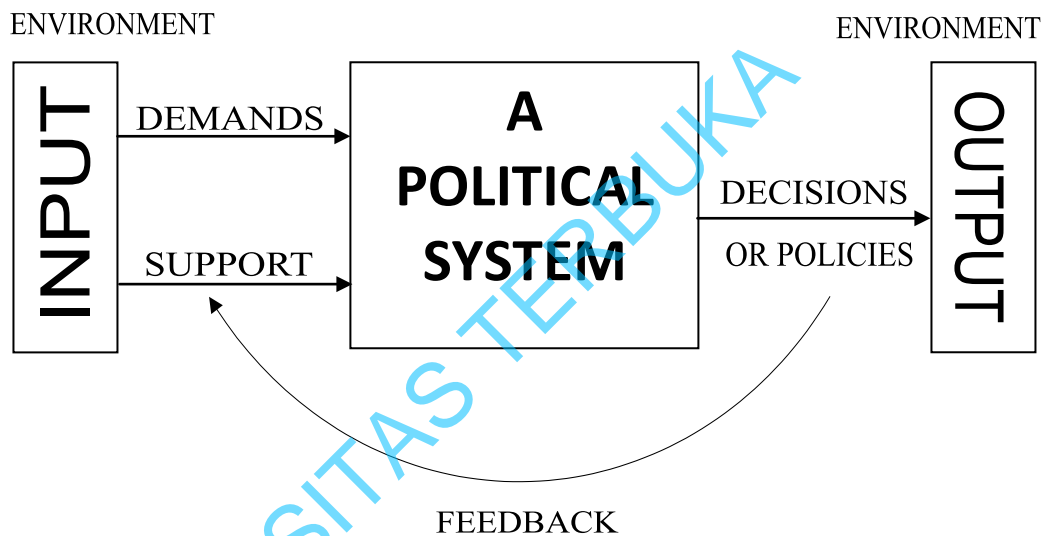
Berdasarkan ketiga definisi para ahli diatas, dapat dilihat bahwa esensi kebijakan publik adalah untuk memecahkan masalah; melakukan kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu; dilakukan oleh instansi pemerintah untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat atau mengalokasikan sumberdaya kepada masyarakat.

Dengan esensi yang demikian itu, maka sekurang-kurangnya ada empat hal yang menjadi ciri pokok suatu kebijakan publik yaitu : (1) selalu mempunyai tujuan; (2) berisi tindakan atau pola tindakan pejabat pemerintah; (3) apa yang benar-benar dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah; (4) berdasarkan peraturan dan bersifat otoritatif.

Memperhatikan keempat ciri pokok tersebut, Nugroho (2008) merumuskan definisi yang sederhana bahwa kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya Pemerintah sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantarkan masyarakat pada masa awal memasuki masa transisi untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan.

b. Proses Kebijakan Publik

Model proses kebijakan yang paling klasik dikembangkan oleh David Easton, yang menganalogikannya dengan sistem biologi. Kebijakan publik dengan model sistem mengandaikan bahwa kebijakan merupakan hasil atau output dari sistem politik, seperti digambarkan dibawah ini:

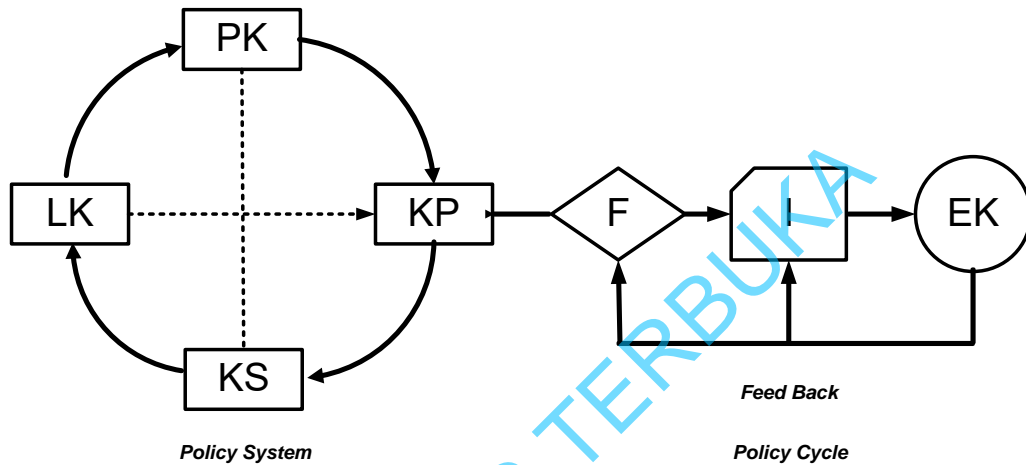


Gambar 2.1 : Pendekatan Sistem Kebijakan Publik

Gambar 2.1 diatas menunjukkan bahwa proses formulasi kebijakan publik berada dalam sistem politik dengan mengandalkan pada masukan (input) yang terdiri atas dua hal, yaitu tuntutan dan dukungan. Model Easton inilah yang dikembangkan oleh Mustopadidjaja.

Mustopadidjaja (2009) memformulasikan tahapan kebijakan publik menjadi tiga tahapan penting yaitu : (1) formulasi; (2) implementasi dan (3) evaluasi. Ketiga tahapan itu dipengaruhi oleh sistem kebijakan dimana kebijakan tersebut dibuat, mencakup hubungan timbal

balik diantara empat unsur yaitu : (a) Lingkungan kebijakan; (b) Pembuat dan Pelaksana Kebijakan; (c) Kebijakan Publik; dan (d) Kelompok Sasaran Kebijakan. Gambar saling hubungan sistem kebijakan dengan proses kebijakan dapat dilihat dibawah ini:



Gambar 2.2: Saling Hubungan Sistem dan Proses Kebijakan Publik

Keterangan :

LK = Lingkungan Kebijakan	F = Formulasi
PK = Pengelola Kebijakan	EK= Evaluasi Kinerja
KP = Kebijakan Publik	
KS = Kelompok Sasaran	

Selanjutnya Anderson (1979) membedakan lima langkah dalam proses kebijakan publik, yaitu (1) *agenda setting*; (2) *policy formulation*; (3) *policy adoption*; (4) *policy implementation*, dan (5) *policy assessment/evaluation*. Sedangkan Dunn (1981) menjelaskan bahwa proses Kebijakan publik meliputi (1) perumusan masalah (*policy problems*); (2) peramalan (*policy performance*); (3) Rekomendasi

(*Expected policy outcomes*): (4) pemantauan (*Preffered Polices*), dan (5) evaluasi (*observed policy outcomes*).

3. Implementasi Kebijakan Publik

a. Konsep Impelementasi Kebijakan Publik

Implemetasi kebijaan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (*public policy process*).

Menurut Wahab (1991), implementasi diartikan sebagai *to provide the means for carrying out*, menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu; *to give practical effects to*, menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu.

Mazmanian & Sabatier (1983) menjelaskan lebih rinci implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

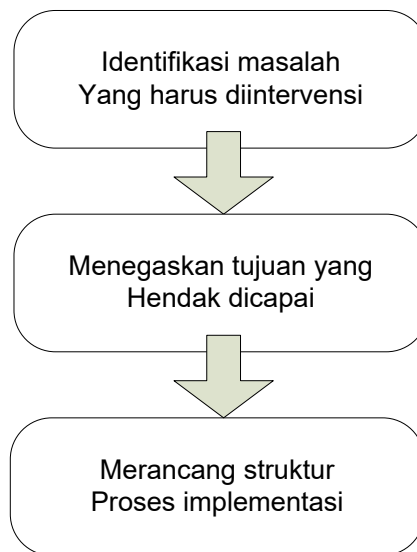
Berdasarkan berbagai definisi diatas, Widodo (2010) memberikan batasan pengertian bahwa implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumberdaya termasuk manusia, dana dan kemampuan organisasional yang dilakukan pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok). Proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebjakan.

Sementara itu, pelaksanaan kebijakan merupakan suatu proses usaha untuk mewujudkan suatu kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam realita nyata untuk menimbulkan *outputs, outcomes, benefits* dan *impacts* yang dinikmati oleh kelompok sasaran (*target groups*).

b. Proses Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Darwin (1998) dalam proses implementasi kebijakan, setidaknya ada empat hal penting yang perlu dilakukan yaitu pendayagunaan sumber, pelibatan orang atau sekelompok orang dalam implementasi, interpretasi, manajemen program dan penyediaan layanan pada publik.

Selanjutnya Nugroho (2008) menjelaskan implementasi kebijakan dalam konteks manajemen berada dalam kerangka *organizing-leading-controlling*, yaitu mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut. Secara rinci proses manajemen implementasi kebijakan publik dapat disusun sebagai berikut:



Gambar 2.3 : Proses Manajemen Implementasi Kebijakan

Gambar 2.3 diatas memperlihatkan tahapan dan rincian pekerjaan dalam implementasi kebijakan. Namun ada satu hal yang penting ditambahkan yaitu *diskresi* atau ruang gerak bagi individu pelaksana dilapangan untuk memilih tindakan sendiri yang otonom dalam batas wewenangnya apabila menghadapi situasi khusus, apabila kebijakan tidak mengatur atau mengatur berbeda dengan kondisi lapangan.

Diskresi adalah kehormatan fungsional para pelaksana implementasi kebijakan karena pada tingkat tertentu selalu diperlukan penyesuaian-penyesuaian kebijakan implementasi dalam menghadapi dinamika masyarakat. Namun diskresi harus diatur dalam suatu panduan diskresi yang akan membantu pelaksana untuk menyesuaikan diri apabila ada kasus-kasus yang bersifat khusus dihadapi ketika melakukan implementasi kebijakan (Nugroho, 2008).

c. Model-Model Implementasi Kebijakan Publik

1) Model Proses Implementasi Kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn

Model yang ditawarkan oleh Donald Van Meter & Carl Van Horn (1975) dalam tulisannya berjudul “ *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*”, berangkat dari argumen dasar bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi kebijakan akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan diimplementasikan. Model ini menawarkan adanya enam variabel yang membentuk ikatan (*linkage*) antara isu kebijakan dengan pencapaian (*Performance*). Keenam variabel tersebut adalah: (1) ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan; (2) sumber-sumber kebijakan; (3) komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan implementasi; (4) Karakteristik dari badan-badan pelaksana (*Implementors*); (5) kondisi ekonomi, sosial dan politik; dan (6) kecendrungan dari pelaksana (*implementors*).

2) Model Kerangka Analisis Implementasi oleh Mazmanian dan Sabatier

Menurut Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) dalam *Implementation and Public Policy* bahwa peran penting dari analisis implementasi kebijakan publik adalah dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Disebutkannya, ada

tiga klasifikasi variabel yang ikut berpengaruh dalam proses implementasi kebijakan publik, yaitu : (1) variabel bebas (*independent variable*), yaitu mudah tidaknya masalah yang akan digarap dikendalikan. Hal ini berkaitan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan yang diinginkan; (2) *variabel intervening*, yaitu kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi secara tepat. Hal ini berkaitan dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkhis diantara lembaga pelaksana, aturan pelaksanaan dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana serta keterbukaan dengan pihak luar, dan variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi. Hal ini berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan *resources* dari konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, dan komitmen serta kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana; (3) variabel terikat (*dependent variable*), yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan, yaitu: (a) pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, (b) kapatuhan obyek, (c) hasil nyata, (d) penerimaan hasil nyata tersebut, dan (e) mengarah kepada revisi atas kebijakan yang dibuat dan

dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

3) Model *The Top Down Approach* oleh Hogwood dan Gunn

Model yang dikembangkan oleh Brian W. Hoogwood dan Lewis A. Gunn (1978) dalam *Policy Analysis for the Real World* biasanya disebut oleh para pakar sebagai *the top down approach*. Menurutny, untuk dapat mengimplementasikan (*perfect implementation*), diperlukan beberapa syarat, yaitu: (1) bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/lembaga pelaksana tidak akan menimbulkan kendala yang serius; (2) tersedianya waktu dan sumberdaya yang memadai dalam pelaksanaan kebijakan/program; (3) bahwa perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada; (4) kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal yang andal; (5) hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya; (6) hubungan ketergantungannya kecil; (7) pemahaman yang mendalam dan ketepatan terhadap tujuan; (8) tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat; (9) adanya komunikasi dan koordinasi yang sempurna; dan (10) pihak-pihak yang berwenang dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

4) Model Merilee S.Grindle

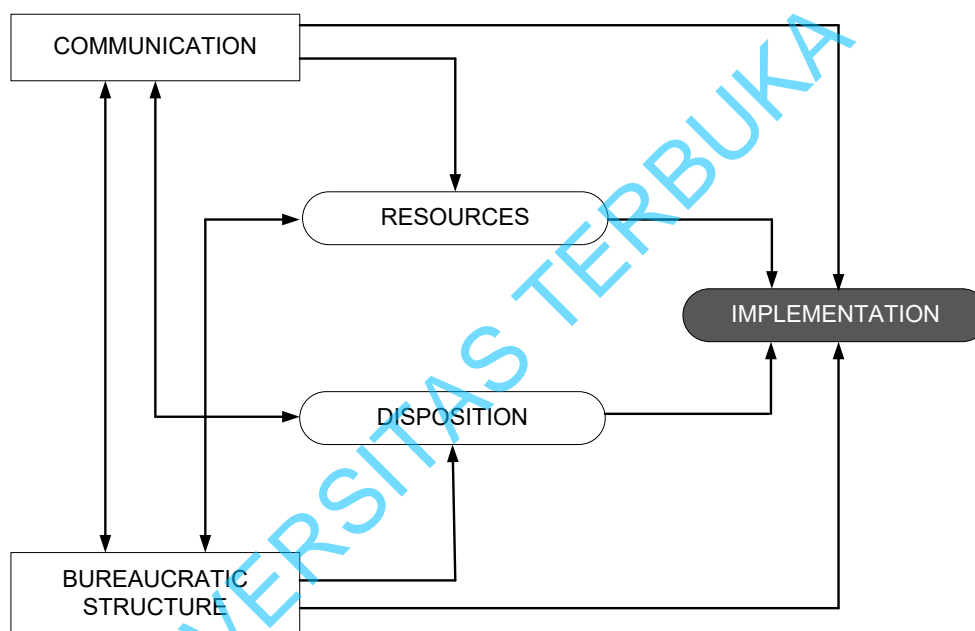
Model yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle (1980) dalam *Politics and Apolicy Implementation in Third World* ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut (Wibawa, Samodra, et al., 1994).

Isi kebijakan mencakup; (1) kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan; (2) jenis dan manfaat yang akan dihasilkan; (3) derajat perubahan yang diinginkan; (4) kedudukan pembuat kebijakan; (5) (siapa) pelaksana program; (6) sumberdaya yang dikerahkan. Sedangkan konteks implementasinya adalah : (1) kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat; (2) karakteristik lembaga dan penguasa; dan (3) kepatuhan dan daya tanggap.

5) Model Implementasi Kebijakan George Edwards III

Model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan George C. Edward III (1980) dalam *Implementing Public Policy* dimulai dengan mengemukakan dua pertanyaan dasar, yaitu (1) pra kondisi-pra kondisi apa yang diperlukan sehingga suatu implementasi kebijakan berhasil?; (2) hambatan-hambatan utama apa yang mengakibatkan suatu implemetasi gagal?.

Dalam usaha menjawab kedua pertanyaan penting tersebut, George C.Edward III mengajukan empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Empat variabel atau faktor itu adalah faktor *communications*, *resources*, *dispositions*, dan *bureaucratic structure* (Widodo, 2010).



Gambar 2.4 : Model Proses Implementasi Kebijakan Publik

Widodo (2010) menjelaskan pengaruh masing-masing faktor tersebut sebagai berikut :

a. Faktor Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan

merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementation*).

Informasi kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target groups*) kebijakan; juga agar para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan lakukan untuk melaksanakan kebijakan publik serta apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain dimensi transformasi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*consistency*). Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan publik tersebut.

Dimensi kejelasan menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana, target group, dan pihak lain yang berkepentingan dapat diterima dengan jelas sehingga diantara

mereka mentahui apa yang menjadi maksud, tujuan dan sasaran serta substansi dari kebijakan publik tersebut.

Dimensi konsistensi menghendaki agar kebijakan yang ditransimikan kepada para pelaksana, target group, dan pihak lain yang berkepentingan tidak berubah-ubah agar tujuan kebijakan dapat dicapai secara efektif dan efisien.

b. Sumberdaya (*Resources*)

Sumberdaya yang dimaksud meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya keuangan, sumberdaya peralatan (gedung, peralatan, tanah, suku cadang) serta sumberdaya informasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan.

b.1. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia (staff) harus cukup (jumlah) dan cakap (keahlian). Selain itu sumberdaya manusia tersebut harus mengetahui apa yang harus dilakukan (*knowing what to do*). Oleh karena itu sumberdaya manusia pelaku kebijakan (*implementors*) tersebut juga membutuhkan informasi yang cukup tidak saja berkaitan dengan bagaimana cara melaksanakan kebijakan, tetapi juga mengetahui arti penting (*esensi*) data mengenai kepatuhan pihak lain yang terlibat terhadap peraturan dan pengaturan (*rules and regulations*) berlaku.

Sumberdaya manusia pelaku kebijakan (*implementors*) juga harus mengetahui orang-orang lain yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Sumberdaya manusia pelaku kebijakan juga harus memiliki kewenangan yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan.

b.2. Sumberdaya Anggaran

Terbatasnya jumlah anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan kepada publik yang harus diberikan juga menjadi terbatas. Kondisi ini menyebabkan para pelaku kebijakan tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal dan mereka tidak mendapatkan *insentive* sesuai yang mereka harapkan menyebabkan gagalnya pelaksanaan program. Dalam kaitan ini maka jelas bahwa agar para pelaku kebijakan memiliki disposisi (sikap dan perilaku) tinggi dalam melaksanakan kebijakan diperlukan insentif yang cukup.

Besar kecilnya insentif dapat mempengaruhi sikap dan perilaku pelaku kebijakan. Insentif tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk *reward and punishment*. Dalam perspektif seperti ini, maka dapat ditegaskan bahwa terbatasnya sumberdaya keuangan (anggaran) akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

b.3 Sumberdaya Peralatan

Sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

Terbatasnya fasilitas dan peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan, dapat menyebabkan gagalnya pelaksanaan kebijakan. Juga kurang menunjang efisiensi dan tidak mendorong motivasi para pelaku dalam melaksanakan kebijakan.

b.4. Sumberdaya Informasi dan Kewenangan

Sumberdaya informasi juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Terutama informasi yang relevan dan cukup tentang cara mengimplementasikan kebijakan. Selain itu, informasi tentang kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan sangat diperlukan, agar para pelaksana kebijakan tidak melakukan suatu kesalahan dalam mengimplementasikan tentang cara melaksanakan kebijakan tersebut.

Kewenangan juga merupakan sumberdaya lain yang dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Kewenangan sangat diperlukan, terutama untuk menjamin dan meyakinkan bahwa kebijakan yang akan dilaksanakan adalah sesuatu yang menjadi kewenangannya (*authority*).

Sumberdaya informasi dan kewenangan merupakan sarana yang digunakan untuk mengoperasionalkan implementasi suatu kebijakan. Kurang cukupnya sumberdaya ini maka ketentuan atau aturan-aturan (*laws*) tidak akan menjadi kuat dan pengaturan (*regulations*) yang tidak beralasan tidak dikembangkan.

c. Disposisi (*Disposition*)

Disposisi merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.

Disposisi ini akan muncul diantara para pelaku kebijakan, manakala akan menguntungkan tidak hanya organisasinya, tetapi juga dirinya. Mereka akan tahu bahwa kebijakan akan menunjang organisasi dan dirinya, manakala mereka cukup pengetahuan (*cognitive*) dan mereka sangat memahami dan mendalaminya (*comprehension and understanding*).

Pengetahuan, pendalaman dan pemahaman kebijakan ini akan menimbulkan sikap menerima (*acceptence*) atau acuh tak acuh (*neutrality*) dan menolak (*rejection*) terhadap kebijakan. Dengan demikian, intensitas disposisi para pelaksana kebijakan dapat mempengaruhi pelaksana (*performance*) kebijakan, sehingga kurang atau terbatasnya intensitas disposisi ini akan bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan.

d. Strukur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur birokrasi mencakup dimensi fragmentasi dan standar prosedur operasi yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya.

Dimensi fragmentasi menegaskan bahwa struktur birokrasi yang terfragmentasi dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, dimana para pelaksana kebijakan akan mempunyai kesempatan besar instruksinya terdistorsi. Fragmentasi birokrasi akan membatasi kemampuan pejabat puncak untuk mengkoordinasikan semua sumberdaya . Dengan kata lain, organisasi pelaksana yang terfragmentasi (terpecah-pecah atau tersebar) akan menjadi distorsi dalam pelaksanaan kebijakan.

Demikian pula dengan tidak jelasnya *standar operating procedure*, baik yang menyangkut mekanisme, sistem dan

prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan dan tanggung jawab diantara para pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan diantara pelaksana satu dengan lainnya, dapat menentukan gagalnya pelaksanaan suatu kebijakan.

3. Pembangunan Daerah

a. Makna dan Tujuan Pembangunan Daerah

Makna pembangunan terus mengalami pergeseran, sejalan dengan terjadinya perubahan paradigma pembangunan. Pada awalnya, paradigma pembangunan tradisional memaknakan pembangunan difokuskan pada peningkatan produk domestik bruto. Dengan paradigma ini, pembangunan sering dikaitkan dengan strategi mengubah struktur suatu negara atau sering dikenal dengan industrialisasi, dimana kontribusi pertanian mulai digantikan dengan kontribusi industri. Selanjutnya paradigma pembangunan modern memaknakan pembangunan sebagai proses yang multidimensional. Maksudnya pembangunan berdimensi lebih luas dari sekedar peningkatan pertumbuhan ekonomi (Kuncoro, 2004).

Selanjutnya *United Nation Development Programme (UNDP)* menjelaskan bahwa penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (*the ultimated end*), sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana (*principal means*) untuk mencapai tujuan akhir itu (UNDP, 1995).

Makna pembangunan sebagai proses multidimensional dan penduduk sebagai tujuan akhir pembangunan menjadi dasar Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat merumuskan RPJMD 2009-2013 yang menetapkan visi mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Barat yang Beriman dan Berdayasaing. Visi Beriman dan Berdayasaing menunjukkan bahwa pembangunan sosial dalam rangka meningkatkan iman dan taqwa dengan pembangunan ekonomi dalam rangka meningkatkan daya saing daerah sama pentingnya, sehingga keduanya harus berjalan sinergis.

Sinergi antara pembangunan sosial dan ekonomi dalam kebijakan pembangunan daerah NTB secara nyata diwujudkan dalam tujuan pembangunan daerah NTB yaitu (Pemerintah Provinsi NTB, 2009):

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. Meningkatkan pelayanan publik;
3. Meningkatkan daya saing daerah;
4. Meningkatkan daya tahan dan daya tangkal masyarakat;
5. Meningkatkan citra daerah;
6. Meningkatkan harkat dan martabat masyarakat;
7. Mengoptimalkan pembangunan berkelanjutan;
8. Meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum aparat dan masyarakat.

b. Percepatan Pembangunan Daerah

Keterbatasan sumberdaya pembangunan, seperti sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya, mengharuskan adanya prioritas pembangunan. Penentuan prioritas tersebut sangat tergantung pada tujuan yang akan dicapai dalam pembangunan daerah.

Untuk mencapai delapan tujuan pembangunan daerah NTB dalam kurun waktu lima tahun (2009-2013) bukan pekerjaan yang mudah, sehingga diperlukan suatu kebijakan dan strategi yang efektif untuk melakukan percepatan. Dalam kaitan ini Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menetapkan kebijakan percepatan pembangunan dengan menetapkan program unggulan melalui beberapa sektor/komoditas unggulan. Menurut Ikhwanudin Mawardi (2009) penentuan sektor/komoditas unggulan akan dapat meningkatkan kegiatan produksi di daerah yang selanjutnya akan menimbulkan berbagai efek pengganda (*multiplier effects*) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yaitu umur panjang dan sehat; berpengetahuan dan berketerampilan serta akses terhadap sumberdaya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup yang layak. Oleh karena itu, IPM merupakan indeks gabungan (komposit) yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja

pembangunan manusia. Indikatornya adalah angka harapan hidup pada saat lahir; angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah; serta pengeluaran per kapita riil. Indikator-indikator tersebut mencerminkan dimensi kesehatan, dimensi pendidikan dan dimensi pendapatan (Pratiwi, 2010).

Nilai maksimum dan minimum IPM berdasarkan Standar UNDP sebagai berikut:

Tabel 2.1: Nilai Maksimum dan Minimum IPM berdasarkan Standar UNDP

Indeks Pembangunan Manusia	Nilai Indikator	
	Maksimum	Minimum
Angka Harapan Hidup	85	25
Angka Melek Huruf	100	0
Rata-rata lama sekolah	15	0
Konsumsi per kapita yang disesuaikan (ribuan rupiah)	1.332,7	900,0

Sumber: Pratiwi, 2010

B. Harapan Hidup

Harapan hidup pada saat lahir (*life experience at birth*) digunakan untuk mengukur lamanya hidup (*longevity*) atau kemampuan untuk bertahan hidup lebih lama. Angka harapan hidup pada saat lahir, merupakan penyesuaian dari angka kematian bayi atau *Infant Mortality Rate (IMR)*.

Angka harapan hidup (AHH), yaitu perkiraan lama hidup rata-rata penduduk sejak dilahirkan, dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka harapan hidup, secara operasional dapat

dicapai melalui upaya dibidang kesehatan. Angka harapan hidup secara rata-rata sangat ditentukan oleh tingkat kelangsungan penduduk sejak umur muda, yaitu sejak masa bayi dan balita. Sumber data yang digunakan adalah SP (Sensus Penduduk), SUPAS (Survei Penduduk Antar Sensus), dan Susenas (Survei Sosialisasi Nasional). Data yang dipergunakan dalam perhitungan adalah rata-rata jumlah anak lahir hidup dan rata-rata jumlah anak masih hidup menurut kelompok umur ibu 15-49 tahun.

Diakui bahwa data dan informasi AHH sangat sulit diperoleh. Oleh sebab itu dilakukan perhitungan dengan metode tidak langsung melalui paket program *mortpack*. Data yang digunakan dalam perhitungan adalah: (1) rata-rata jumlah anak lahir hidup (ALH), yaitu anak yang pada waktu dilahirkan menunjukkan tanda-tanda kehidupan, walaupun mungkin hanya beberapa saat seperti jantung berdenyut, bernapas, menangis; dan (2) rata-rata jumlah anak masih hidup (AMH), yaitu anak yang meninggal dalam kandungan sebelum dilahirkan, atau lahir tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan seperti menangis, denyut nadi, refleksi, gerakan dan warna kulit pucat dan apabila usia janin 22 minggu keatas menurut kelompok umur ibu 15-49 tahun. Perhitungan didasarkan pada tabel kematian yang memiliki pola yang hampir sama dengan kematian penduduk di Indonesia (*Model West*). AHH digunakan atas dasar asumsi tidak terjadi perubahan pola kematian penduduk (BPS dan Bappeda NTB, 2006).

C. Rata-rata Lama Sekolah (MYS)

Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu dari dua indikator pendidikan yang diharapkan dapat mencerminkan tingkat pengetahuan dan keterampilan penduduk. Populasi yang digunakan UNDP untuk penghitungan rata-rata (tahun) lama sekolah atau *Mean Years of Schooling* (MYS) dibatasi pada penduduk 15 tahun keatas. Batasan itu juga diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun masih dalam proses sekolah sehingga tidak ditanyakan MYS-nya (Bappeda NTB, BPS, 2006)

Dalam *Human Development Report* (HDR) pertama (1990), indikator lama sekolah (MYS) belum dimasukkan untuk mengukur pengetahuan penduduk. Indikator MYS baru dimasukkan dalam HDR kedua pada tahun 1991 yang diberi bobot 1/3, sedangkan AMH diberi bobot 2/3. Hal ini merupakan pengakuan akan pentingnya pembentukan keterampilan tingkat tinggi serta membantu pembedaan Negara-negara yang mengelompok pada tingkat atas. Sementara dalam tahun 1995, variabel MYS diganti dengan *rasio enrolment* gabungan antara sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, karena angka ini lebih mudah diperoleh dan tidak memerlukan perhitungan yang kompleks (BPS, Bappenas, UNDP, 2001)

Kemudian, dalam HDR global tahun 1995 mulai mengganti MYS dengan angka partisipasi gabungan dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan menengah atas. Namun untuk perhitungan di Indonesia tetap

menggunakan MYS karena 2 (dua) alasan, yaitu: (1) untuk keterbandingan antar waktu, karena angka partisipasi gabungan untuk tahun-tahun terdahulu tidak tersedia; dan (2) karena MYS merupakan indikator dampak yang lebih baik daripada angka partisipasi yang bisa dianggap sebagai indikator proses. Oleh karena itu MYS cenderung lebih stabil daripada angka partisipasi yang cenderung lebih fluktuasi. Meskipun demikian, MYS tidak cukup sensitif untuk menangkap dampak jangka pendek dari krisis terhadap kehadiran di sekolah. Gejala ini baru akan tertangkap bila terjadi putus sekolah secara permanen (BPS, Bappnas, UNDP, 2001; Bappeda NTB, BPS, 2006)

MYS mencerminkan jumlah tahun yang dihabiskan penduduk untuk menempuh pendidikan formal. Dalam penyusunan IPM, populasi yang digunakan dalam perhitungan MYS dilakukan dengan cara perhitungan tidak langsung, dengan langkah-langkah: (1) memberikan bobot variabel “penduduk yang sedang/pernah sekolah” setiap jenjang pendidikan; dan (2) menghitung rata-rata tertimbang dari variabel tersebut sesuai bobotnya.

Terdapat 30 jenjang pendidikan dan skornya untuk menghitung rata-rata lama sekolah, yaitu mulai dari tidak/belum pernah sekolah (skor nol) sampai dengan tamat S1/DIV (skor 17). Penggabungan indikator Angka Melek Huruf (AMH) dan MYS menjadi satu komponen pendidikan dan keterampilan, yang selanjutnya menjadi Indeks Pendidikan (IP), yaitu $\frac{2}{3}$ untuk indeks AMH dan $\frac{1}{3}$ untuk indeks MYS

Rata-rata lama sekolah dapat dipandang sebagai tingkat pengetahuan dan keterampilan secara umum yang dimiliki oleh penduduk secara agregat. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun keatas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.

D. Paritas Daya Beli

Paritas daya beli atau *Purchasing Power Parity* (PPP) merupakan indikator ekonomi. Untuk mengukur daya beli penduduk antar wilayah digunakan rata-rata konsumsi dari Susenas yang disesuaikan dengan indeks kemampuan daya beli atau *purchasing power parity* (PPP). Dalam penghitungan pengeluaran per kapita, disusun 27 daftar komoditi, unitnya dan proporsinya dari total konsumsi, mulai dari beras lokal sampai dengan sewa rumah.

Untuk memperoleh gambaran dari rata-rata pendapatan yang diterima setiap penduduk selama satu tahun dan biasanya digunakan juga sebagai indikator tingkat kemakmuran penduduk, adalah PDRB per kapita. Namun, PDRB per kapita berbeda dengan jumlah pendapatan masyarakat, ia hanya menggambarkan secara umum tanpa mencerminkan distribusi pendapatan masyarakat.

E. Kerangka Berpikir

Penelitian implementasi kebijakan merupakan studi untuk mengetahui proses implementasi. Proses implementasi kebijakan adalah tahapan dimana alternatif yang telah ditetapkan diwujudkan dalam tindakan yang nyata, dilaksanakan oleh unit-unit administratif dengan memobilisasi sumberdaya. Tanpa implementasi suatu kebijakan akan sia-sia, sebab implementasi kebijakan menghubungkan formulasi kebijakan dengan hasil (*outcomes*) kebijakan yang diharapkan.

Anderson (dalam Tachan, 2008) mengemukakan bahwa: "*policy implementation is the application of the policy by the government's administrative machinery to the problem*". Kemudian Edward III (dalam Tachan, 2008) mengemukakan bahwa: "*Policy implementation, ...is the stage of policy making between the establishment of a policy...and the consequences of the policy for the people whom it affects*". Sedangkan Grindle (dalam Tachan, 2008) mengemukakan bahwa: "*implementation – a general process of administrative action that can be investigated at specific program level*".

Berdasarkan definisi yang diuraikan di atas, maka yang dimaksud implementasi kebijakan publik dalam penelitian ini adalah proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Implementasi kebijakan bukanlah proses yang sederhana, tetapi sangat kompleks dan rumit. Benturan kepentingan antar aktor baik administrator,

petugas lapangan maupun sasaran kebijakan sering terjadi. Selama implementasi sering terjadi beragam interpretasi atas tujuan, target maupun strateginya. Mustopadidjaja (2009) menjelaskan bahwa berhasil tidaknya suatu kebijakan untuk mengatasi permasalahan tertentu yang dihadapi masyarakat bangsa maupun untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam rangka kehidupan bernegara sangat bergantung pada tahapan pelaksanaannya, pada ketepatan dan kecermatan sistem dan proses pengelolaannya, pada kearifan pimpinan aparatur dalam berinteraksi dengan keseluruhan *stakeholders* kebijakan yang ada dalam masyarakat dan dengan unsur aparatur lainnya yang bersifat lintas lembaga dan lintas wilayah.

Suatu kebijakan yang tidak mampu mewujudkan tujuannya disebut kegagalan implementasi. Kegagalan implementasi atau *implementation gap* yaitu suatu kondisi dimana dalam proses kebijakan terjadi perbedaan antara apa yang diharapkan pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya terjadi. *Implementation gap* ini sangat dipengaruhi oleh *implementation capacity* dari organisasi pelaksanaannya (Goggin, 1990).

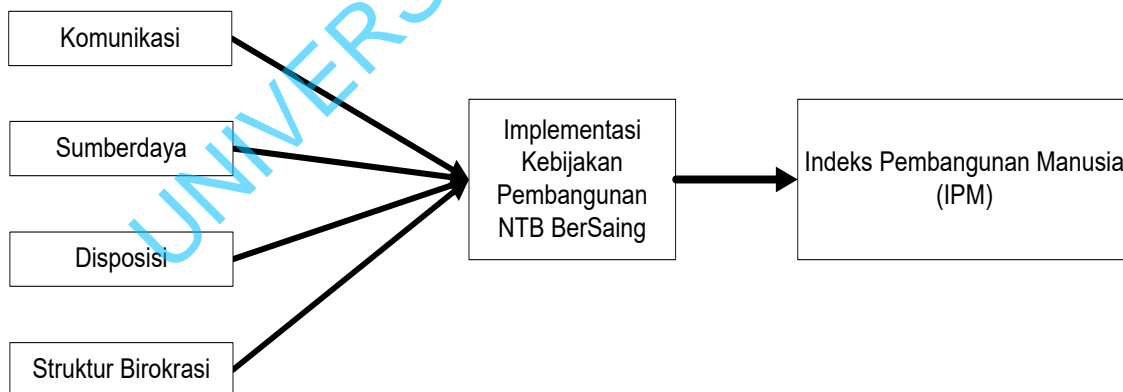
Kegagalan implementasi antara lain disebabkan oleh *bad policy* dan *bad implemetation*. *Bad policy* yaitu perumusannya asal-asalan, kondisi internal belum siap dan kondisi eksternal tidak memungkinkan. Selanjutnya *bad implementation* ditunjukkan oleh pelaksana yang tak memahami juklak dan terjadi *implementation gap*.

Hal lain yang menyebabkan publik tak mau melaksanakan kebijakan sehingga terjadi kegagalan implementasi adalah kebijakan bertentangan dengan

sistem nilai masyarakat, adanya konsep ketidak patuhan selektif terhadap hukum, keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi/kelompok dan tidak adanya kepastian hukum atau terjadi pertentangan antara kebijakan satu dengan yang lain (Anderson, 1979).

Konsepsi George C.Edaward III tentang implementasi kebijakan menjelaskan bahwa dengan *implementation problem approach* dirumuskan empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan atau kegagalan proses implementasi, yaitu: (1) komunikasi; (2) sumber daya; (3) disposisi ; dan (4) struktur birokrasi.

Keempat faktor tersebut diduga dapat mempengaruhi implementasi kebijakan pembangunan NTB Bersaing percepatan peningkatan IPM NTB dalam meningkatkan IPM NTB. Dengan demikian kerangka pikir penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.5 : Kerangka Berpikir

F. Definisi Operasional

Untuk penyusunan instrumen penelitian dan memudahkan pengukuran variabel-variabel, perlu dikemukakan definisi operasional sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan publik

Implementasi kebijakan publik adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber, termasuk manusia, dana dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan. Dalam penelitian ini akan dilihat seberapa jauh implementasi kebijakan Pembangunan NTB Bersaing dapat mencapai tujuannya meningkatkan IPM dengan membandingkan antara hasil-hasil kebijakan (*policy outcomes*) dengan tujuan-tujuan kebijakan (*policy goals*).

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik

a. Komunikasi

Komunikasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan sosialisasi dan diseminasi kebijakan agar seluruh masyarakat terutama kelompok sasaran mengetahui tentang adanya kebijakan yang diimplementasikan.

b. Sumberdaya

Ada lima jenis sumberdaya yang diperhatikan dalam penelitian ini yakni sumberdaya manusia, sumberdaya keuangan, sumberdaya peralatan dan sumberdaya informasi serta sumberdaya kewenangan. Sumberdaya

manusia yang dimaksud adalah jumlah dan keahlian atau keterampilan setiap sumberdaya manusia yang bertindak selaku pelaku kebijakan (*implementors*). Sedangkan sumberdaya keuangan adalah jumlah anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kebijakan termasuk jumlah insentif bagi para pelaku dan kelompok sasaran kebijakan. Selanjutnya sumberdaya perlengkapan yang dimaksud adalah sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi kebijakan. Adapun yang dimaksud dengan sumberdaya informasi adalah informasi yang relevan dan cukup yang berkaitan dengan cara mengimplementasikan kebijakan, informasi tentang kerelaan dan kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, serta informasi yang dapat menyadarkan orang-orang yang terlibat dalam implementasi agar mereka mau mematuhi apa yang menjadi tugas dan kewajibannya. Terakhir sumberdaya kewenangan adalah otoritas yang dimiliki pelaku kebijakan untuk membuat keputusan sendiri dalam melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya.

c. Disposisi

Disposisi yang dimaksud adalah kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga tujuan kebijakan dapat diwujudkan.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang dimaksud adalah struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antar unit-unit organisasi, hubungan organisasi

dengan organisasi luar yang terlibat serta SOP (*standard operating procedure*) dalam implementasi kebijakan.

3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu nilai indeks yang menunjukkan seberapa jauh suatu daerah telah mencapai angka harapan hidup, pendidikan bagi semua lapisan masyarakat dan tingkat pengeluaran serta konsumsi yang telah mencapai standar hidup yang layak. Semakin dekat nilai IPM suatu daerah terhadap angka 100, berarti kualitas sumberdaya manusianya semakin baik.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu studi implementasi yang tidak melihat implementasi kebijakan hanya sebatas sebagai permasalahan administrasi dan manajemen semata, melainkan proses implementasi dikontekstualisasikan dalam siklus kebijakan secara keseluruhan.

Desain penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Dengan penelitian metode deskriptif, memungkinkan peneliti untuk melakukan hubungan antar variabel/fenomena, mengembangkan generalisasi, dan mengembangkan teori yang memiliki validitas universal. Pada umumnya tujuan utama penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat (Ridwan, 2012).

Salah satu hal yang paling penting dalam suatu proses penelitian adalah data penelitian, karena melalui data berbagai macam tujuan penelitian dapat dicapai. Data penelitian merupakan hasil dari pengamatan dan pengukuran yang dilakukan secara empiris, yang mengungkapkan fakta tentang karakteristik dari suatu gejala tertentu. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai macam metode, sehingga metode pengumpulan data dapat diartikan sebagai cara untuk mengumpulkan data (Silalahi, 2006).

Neuman mengelompokkan metode pengumpulan data menjadi metode pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif merupakan data yang dapat dinyatakan dengan angka, sebaliknya data kualitatif merupakan data yang tidak dapat dinyatakan atau diukur melalui angka. Data kualitatif biasanya berhubungan dengan deskripsi dan interpretasi akan suatu fenomena, dimana data seperti ini seringkali didapatkan melalui wawancara atau usaha dengar pendapat dan diskusi dengan pihak tertentu (Silalahi, 2006).

Dalam penelitian ini akan dilakukan penggabungan metode pengumpulan data kuantitatif dengan kualitatif (*mixing method*). Bryman (1988) menjelaskan cara-cara penggabungan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif antara lain melalui Triangulasi, yaitu temuan-temuan dari satu jenis studi dapat dicek pada temuan-temuan yang diperoleh dari jenis studi yang lain. Tujuannya secara umum adalah untuk memperkuat kesahihan temuan-temuan.

Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal (Mudjia Rahardjo, 2011).

Proses triangulasi dalam penelitian ini perlu dilakukan, sebab dalam penelitian kualitatif peneliti itu sendiri merupakan instrumen utamanya. Kualitas penelitian kualitatif sangat tergantung pada kualitas diri penelitiannya, termasuk

pengalamannya melakukan penelitian merupakan sesuatu yang sangat berharga. Semakin banyak pengalaman seseorang dalam melakukan penelitian, semakin peka memahami gejala atau fenomena yang diteliti. Namun demikian, sebagai manusia, seorang peneliti sulit terhindar dari bias atau subjektivitas.

Norman K. Denkin menjelaskan triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda, meliputi empat hal, yaitu: (1) triangulasi metode, (2) triangulasi antar-peneliti (jika penelitian dilakukan dengan kelompok), (3) triangulasi sumber data, dan (4) triangulasi teori.

Dalam penelitian ini yang akan ditempuh adalah triangulasi sumber data yaitu menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Selain melalui wawancara, peneliti menggunakan observasi langsung (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen, catatan resmi, catatan dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan pengayaan informasi untuk memperoleh hasil analisis yang handal terhadap implementasi kebijakan pembangunan NTB Bersaing.

B. Populasi dan Sampel

Dalam kerangka strategi pembangunan NTB tahun 2009 – 2013 digambarkan bahwa untuk mewujudkan NTB BerSAING ditetapkan sasaran strategis meningkatkan IPM dan Daya saing Daerah. Kebijakan yang ditetapkan untuk mencapai sasaran strategis itu adalah menetapkan program-program unggulan dan strategi Percepatan, Inovasi dan Nilai Tambah (PIN).

Salah satu program unggulan yang dilaksanakan adalah G3A. Pelaksanaan Gerakan 3A bersifat terpadu dan lintas sektoral yang melibatkan berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat dan masyarakat.

Sebagai program terpadu dan lintas sektoral, implementor G3A terdiri atas unsur pelaksana, supervisor dan pendukung. Secara institusional pelaksana, supervisor dan pendukung diperankan oleh SKPD yang berbeda-beda. SKPD maupun institusi yang berperan dalam implementasi Gerakan 3A sebagai berikut:

Tabel 3.1: Implementor Gerakan 3A di Provinsi NTB

NO.	PROGRAM UNGGULAN	IMPELEMENTOR
1.	Gerakan 3A <ul style="list-style-type: none"> • AKINO • ADONO & ABSANO 	1. SKPD PELAKSANA <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kesehatan - Rumah Sakit Umum Provinsi - Dinas Dikpora 2. SKPD SUPERVISOR <ul style="list-style-type: none"> - Asisten Adm.Umum & Kesra - BAPPEDA - Inspektorat 3. SKPD Pendukung <ul style="list-style-type: none"> - BPMPD - BP2KB - BKKBN - Biro Adm Kesra 4. Tim/Kepanitian <ul style="list-style-type: none"> - Tim Gerakan 3A 5. Kelompok Partisipan <ul style="list-style-type: none"> - PKK - Dharma Wanita - Ormas - Lembaga Swadaya Masyarakat 6. Pemerintah Kab/Kota se-NTB <ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah Kota (2) - Pemerintah Kabupaten (8)

Jenis SKPD maupun institusi/kelembagaan yang berperan sebagai implementor sangat beragam, sehingga kelompok sasaran dari implementasi G3A juga sangat beragam. Selain SKPD yang merupakan unsur Pemerintah Daerah, juga yang tidak kalah perannya dalam implementasi kebijakan G3A adalah DPRD yang memiliki fungsi budgeting dan pengawasan. Dengan demikian secara umum obyek penelitian terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, DPRD, Organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat termasuk media pers serta kelompok

sasaran yang menerima atau terlibat dalam pelaksanaan program G3A yang dilaksanakan oleh SKPD/Institusi implementor.

Jumlah institusi/lembaga yang berperan dalam implementasi G3A sangat banyak dan beragam. Demikian pula kelompok sasaran G3A adalah mencakup seluruh masyarakat NTB sehingga populasinya sangat besar. Oleh karena itu diperlukan pengambilan sampel dengan melakukan pemetaan sebagai berikut:

Adapun gambaran kelompok sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.2 Pemetaan Sampel Penelitian

No	Implementor	AKINO	ADONO	ABSANO	Jumlah
1.	Dinas Kesehatan	1			1
2.	Rumah Sakit Umum Provinsi	1			1
3.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		1	1	2
4.	Asisten Adm.Umum & Kesra	1	1	1	3
5.	BAPPEDA	1	1	1	3
6.	Inspektorat	1	1	1	3
7.	BPMPD	1	1	1	3
8.	BP2KB	1	1	1	3
9.	BKKBN	1	1	1	3
10.	Biro Adm Kesra	1	1	1	3
11.	Tim G3A	1	1	1	3
12.	PKK Prov.NTB	1	1	1	3
13.	Dharma Wanita NTB	1	1	1	3
14.	Ormas	1	1	1	3
15.	LSM	1	1	1	3
16.	Pemerintah Kota	1	1	1	3
17.	Pemerintah Kabupaten	1	1	1	3
18.	DPRD	1	1	1	3
	Total	17	16	16	49

Berdasarkan tabel 3.2 diatas maka jumlah kelompok implementor mencapai 18 institusi/ kelembagaan, sedangkan jumlah kelompok sasaran mencapai 49 kelompok, terdiri atas 17 Kelompok Akino, 16 Kelompok Adono, 16 Kelompok Absano.

Masing-masing pimpinan institusi/kelembagaan untuk mewakili kelompok implementor ditetapkan sebagai informan. Selanjutnya setiap kelompok sasaran akan diambil secara random sampling 1 orang dari unsur pengurus dan 1 orang dari unsur anggota sebagai responden. Dengan demikian dari 49 kelompok sasaran yang dijadikan sampel akan ditetapkan responden sebanyak dua kali jumlah kelompok sasaran yang ditetapkan sebagai *sampel* yakni sebanyak 98 orang.

Jumlah sampel penelitian seluruhnya terdiri atas 18 *implementor* dari berbagai Institusi dan sisanya 98 orang informan dari unsur kelompok sasaran yang mewakili ketua dan anggota penerima manfaat program G3A.

Sumber Data dalam penelitian ini adalah:

- (1) Informan yang dipilih secara sengaja terdiri dari unsur-unsur: (a) Pemerintah Daerah, (b) DPRD; (c) tokoh masyarakat, pemuda dan tokoh agama, serta budayawan; (d) Lembaga Sosial Masyarakat; dan Kalangan pers. Kriteria yang digunakan dalam menentukan informan, adalah berdasarkan penguasaan mereka terhadap permasalahan dan informasi yang sedang diteliti, yaitu mengungkap pendapat mereka tentang implementasi kebijakan pembangunan NTB Bersaing dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

- (2) Responden dipilih secara sengaja dari kelompok penerima manfaat.
- (3) Tempat dan peristiwa merupakan sumber data tambahan yang dilakukan dengan mengamati secara langsung kegiatan yang berkaitan dengan focus penelitian, yaitu rapat di DPRD, Pemda, DPRD dengan Pemda, dan kegiatan yang dilakukan DPRD dan Pemda dalam berinteraksi dengan masyarakat.
- (4) Dokumen merupakan data lain yang sifatnya melengkapi data utama, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pemerintahan Daerah, Perumusan APBD, dokumen perencanaan, dokumen pengusulan anggaran, dokumen rapat panitia anggaran baik Pemerintah Daerah maupun DPRD, risalah sidang, proposal-proposal yang masuk di Pemerintah Daerah dan DPRD dari masyarakat, penelitian-penelitian terdahulu, evaluasi dari instansi resmi, guntingan pers dari sejumlah media cetak lokal.

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti sendiri berperan dan berfungsi sebagai instrument penelitian atau instrument pengumpul data, dimana peneliti secara langsung hadir ke latar penelitian dan melakukan wawancara serta pencatatan terhadap data dan atau informasi di lapangan. Dengan demikian, instrument penelitian kualitatif adalah manusia. Seperti dikatakan Lincoln dan Guba (1985), bahwa para naturalis menggunakan dirinya juga orang lain sebagai instrument pengumpulan data utama. Manusia sebagai instrument penelitian, menurut Moleong (2001), bahwa ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana

pengumpulan data, analisis, penafsiran data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya.

Untuk tetap fokus pada tujuan penelitian, dan mengakses data secara komprehensif dan mendalam, peneliti mempersiapkan pedoman wawancara yang semi terstruktur, pedoman observasi, pedoman *Focus Group Discussion* (FGD), dan format-format untuk data lapangan. Pedoman wawancara dibuat semi terstruktur, sehingga informan bisa memberikan tambahan informasi yang tidak terdapat dalam daftar pertanyaan yang telah dibuat peneliti.

Selain itu dibuat kuesioner atau daftar pertanyaan yang disebarluaskan kepada responden untuk mendapatkan data dan informasi tentang penilaian, persepsi, kepuasan penerimaan manfaat terhadap implementasi program G3A. Data tersebut penting diperoleh untuk mengkonfirmasi hasil berbagai proses komunikasi yang telah dilaksanakan selama implementasi kebijakan pembangunan NTB Bersaing.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dengan mencatat dari berbagai sumber data, yaitu: wawancara, observasi, dokumen dan rekaman arsip yang ada pada berbagai instansi terkait selama satu bulan pada bulan Desember 2011.

Proses wawancara dilakukan dengan mempersiapkan pedoman wawancara. Pihak-pihak yang diwawancarai adalah seluruh informan, dimaksudkan agar peneliti memperoleh informasi yang sebanyak-banyaknya

yang paling sesuai dengan konteksnya dan yang paling pas untuk mencapai tujuan penelitian. Seluruh hasil wawancara direkonstruksi menjadi berkas-berkas catatan lapangan (*fields notes*), kemudian membaca secara cermat, menyusun serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitik baik untuk mendapatkan informasi yang lebih baik dan mendalam maupun untuk memberikan dasar bagi analisis lebih lanjut.

Untuk melakukan validasi berbagai data dan informasi yang diperoleh dari informan, dilakukan pula wawancara mendalam dengan informan tertentu yang diyakini memiliki pemahaman tentang implementasi program G3A seperti Gubernur dan Sekretaris Tim G3A. Dengan demikian akan diperoleh data dan informasi yang akurat. Wawancara mendalam dilakukan pada tanggal 20 Desember 2011.

Disamping wawancara mendalam, peneliti juga menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) selama tiga kali dari tanggal 21 s/d 23 Desember 2011, dengan melibatkan aparatur Pemerintah Daerah, DPRD, tokoh-tokoh masyarakat, pemuda, agama, dan budayawan di daerah, Pers, dan LSM di daerah sesuai dengan tujuan penelitian. Ada empat topik FGD yang dilakukan, yaitu: (1) kebijakan peningkatan IPM yang ada dalam RPJM 2009-2013; (2) implementasi kebijakan peningkatan IPM; (3) perencanaan dan penganggaran; dan (4) fokus hasil yang dicapai IPM NTB.

FGD merupakan metode penelitian di mana peneliti memilih orang-orang yang dianggap mewakili sejumlah publik yang berbeda. Mereka semua dikumpulkan dalam sebuah ruang diskusi yang dipimpin seorang moderator. Di

forum diskusi inilah moderator mengeksplorasi opini dan pandangan-pandangan informan maupun responden tentang implementasi kebijakan pembangunan NTB Bersaing. Moderator memiliki peran penting bagi suksesnya FGD, sehingga moderator yang ditugaskan mempunyai kemampuan dalam penguasaan teknik wawancara, menjaga agar aliran diskusi terus berjalan, dan mampu bertindak sebagai wasit. Selama proses diskusi dilakukan perekaman proses untuk dapat dirumuskan hasilnya guna melengkapi analisis dan pembahasan penelitian ini. Sebab melalui FGD memungkinkan peneliti mendapatkan data yang lengkap dari informan yang biasanya dijadikan landasan pelaksanaan suatu program (*pilot study*).

E. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan bersamaan dengan penelitian lapangan, yaitu analisis selama pengumpulan data (*analysis during data collection*). Sedangkan setelah penelitian berakhir, peneliti melakukan analisis pasca pengumpulan data (*analysis after data collection*). Selanjutnya pada pasca kegiatan penelitian lapangan, peneliti memusatkan perhatian pada pengolahan dan penafsiran data. Dengan strategi demikian, sebenarnya peneliti tidak memisahkan sama sekali antara kegiatan pengumpulan dan pengolahan data. Strategi seperti ini oleh Miles dan Huberman (1992) disebut dengan model analisis interaktif, yaitu semacam daur saling terkait antara kegiatan: (1) pengumpulan data; (2) penyederhanaan data; (3) pemaparan data; dan (4) penarikan dan pengujian kesimpulan.

Data yang dianalisa adalah data kualitatif yang ada dengan dukungan angka-angka atau kuantitatif. Ini berarti, angka-angka yang muncul dalam penelitian ini hanya sebagai alat bantu dalam analisis kualitatif. Disamping akan menganalisis berbagai permasalahan yang muncul dalam implementasi kebijakan.

Selanjutnya dilakukan interpretasi terhadap data dan informasi yang ada. Menganalisis permasalahan yang muncul dalam proses kebijakan dan implementasinya. Dalam interpretasi ini, diperhatikan juga konteks yang melingkupinya dan fenomena dilihat secara holistik.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pembangunan NTB Bersaing

Dalam ikhtiar mewujudkan Visi NTB BerSAING, Pemerintah Provinsi NTB menetapkan kebijakan percepatan pembangunan melalui program unggulan yang diluncurkan pada Peringatan HUT Emas NTB yang ke-50 di Mataram, tanggal 17 Desember 2008.

Program unggulan NTB Bersaing terdiri atas program peningkatan derajat kesehatan dan peningkatan kualitas pendidikan melalui G3A (AKINO, ABSANO dan ADONO); NTB Bumi Sejuta Sapi (NTB BSS); Visit Lombok Sumbawa 2012; Percepatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui pemantapan fungsi ruas jalan nasional dan provinsi serta pemenuhan kebutuhan listrik, air bersih, irigasi, telekomunikasi dan perhubungan; Pengembangan Kampung Media; NTB Hijau; Pengembangan Agribisnis Jagung; Pengembangan agribisnis rumput laut; dan Pengembangan 100 ribu wirausaha baru.

Kebijakan pembangunan NTB BerSAING ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2013, tanggal 2 Maret 2009.

B. Kebijakan G3A Dalam Peningkatan IPM di NTB

Kebijakan G3A merupakan suatu program terobosan untuk mengangkat posisi IPM NTB yang berada pada peringkat ke 32 dari 33 provinsi di Indonesia. Sasaran G3A adalah menurunkan Angka Kematian Ibu menuju Nol (AKINO), Angka Drop Out menuju Nol (ADONO); dan Angka Buta Aksara menuju Nol (ABSANO).

Menurut Gubernur NTB, Dr.TGH.M.Zainul Majdi:

“Pelaksanaan G3A merupakan gerakan perubahan sosial yang bersifat partisipatif untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Melalui pola gerakan tersebut, dapat terbangun suatu komitmen semua pihak untuk memuntaskan tiga permasalahan mendasar yang dihadapi Pemerintah Provinsi NTB maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB yaitu menurunkan Angka Kematian Ibu menuju Nol, menurunkan Angka Drop Out di jenjang pendidikan dasar menuju nol, serta menurunkan Angka Buta Aksara menuju Nol.” (wawancara dengan Gubernur NTB pada 21 Desember 2011).

AKINO menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kinerja pembangunan bidang kesehatan. Indikator ini terkait erat dengan beberapa parameter yang berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, seperti indikator-indikator mortalitas (kematian) dan indikator morbiditas (kesakitan) dan status gizi.

Dalam *Blueprint* Program AKINO, indikator dan target kinerja tahun 2013 telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4.1: Indikator dan Persentase Realisasi serta Target AKINO di NTB

INDIKATOR	ASPEK	SUB INDIKATOR	REALISASI 2011 (%)	TARGET 2013 (%)
INPUT	SDM	1. Persentase Bidan di desa	63,7	100
		2. Persentase Bidan tinggal di desa	73,2	90
	Sarana/ Prasarana	3. Persentase Poskesdes	65,7	80
		4. Persentase Desa Siaga Aktif	97,6	80
		5. Persentase Puskesmas PONED	95	100
		6. Persentase RS PONEK	80	100
	Pembiayaan	7. Tersedianya dana persalinan untuk masyarakat miskin	100	100
PROSES	Pelayanan	8. Persentase Poyandu Aktif	99,7	80
		9. Persentase K4	90,6	100
		10. Persentase Persalinan ditolong Nakes	88,1	90
		11. Persentase Persalinan di Fasilitas Kes.	83,7	75
		12. Persentase KN lengkap	87,7	95
		Rujukan	13. Persentase Komplikasi Neonatal Tertangani	43,4
	14. Persentase Komplikasi Obstetri tertangani		87,2	85
	OUTPUT	Desa AKINO	15. Persentase desa/Kelurahan tidak ada kematian ibu	89.6
OUTCOME	Kematian	16. Jumlah kematian ibu	130	102

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2011.

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2011 implementasi program AKINO sebagai salah satu kegiatan G3A sudah ada indikatornya yang melampaui target tahun 2013. Namun demikian ada juga

yang masih jauh dari target. Hal ini menunjukkan masih ada kegiatan AKINO yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki proses implementasinya sehingga dapat mencapai target yang diharapkan.

Selanjutnya, program ADONO merupakan ikhtiar untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah dan rata-rata lama sekolah. Langkah yang ditetapkan adalah mengatasi masalah *drop out* sekolah adalah: (1) menerapkan kebijakan pendidikan dasar gratis; (2) memberikan beasiswa siswa miskin (BSM); (3) Menyalurkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan dana bantuan operasional manajemen mutu (BOMM); (4) Menerapkan sistem sekolah satu atap (SATAP) untuk SD dan SMP; (5) Memberikan beasiswa retrieval sehingga peserta didik dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi; (6) Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan; (7) Meningkatkan infrastruktur pendukung lainnya; dan (8) mengalihkan status SMA menjadi SMK terutama bagi sekolah yang memiliki potensi sumberdaya alam.

Indikator kinerja Program ADONO sebagai berikut:

Tabel 4.2: Rencana Kerja, Target dan Realisasi Capaian Kinerja Program ADONO di NTB Tahun 2009-2013

No	Misi Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2007/2008	Target Tahun 2013	Target Capaian dan Realisasi					
					2008/2009		2009/2010		2010/2011	
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Rata-Rata Lama Sekolah		6,70	8,61	7,10	6,70	7,50	6,73	8,00	6,73
2	Angka Partisipasi Kasar (APK):	%								
	- SD/MI/Paket A		106,14	111,91	107,58	118,25	109,03	117,1	110,47	111,02
	- SMP/MTs/Paket B		97,8	100,20	98,40	103,64	99,00	103,74	99,60	104,28
	- SMK/SMK/MA/Paket C		63,12	82,67	64,72	65,16	67,83	69,28	73,24	74,43
3	Angka Partisipasi Murni (APM):	%								
	- SD/MI/Paket A		97,66	99,95	98,13	98,40	98,58	98,68	99,03	98,92
	- SMP/MTs/Paket B		79,57	90,07	81,67	89,54	83,77	90,53	85,87	92,87
	- SMK/SMK/MA/Paket C		48,89	70,12	53,45	55,14	57,38	57,83	61,63	62,87
4	Angka Putus Sekolah (APS):	%								
	- SD/MI/Paket A		0,9	0,20	0,76	1,69	0,62	1,02	0,48	0,90
	- SMP/MTs/Paket B		5,25	0,50	4,30	1,83	3,35	1,46	2,40	0,92
	- SMK/SMK/MA/Paket C		4,88	1,50	4,20	2,49	3,53	2,13	2,85	1,88
5	Angka Melek Huruf (AMH):	%	80,10	100,00	84,30	89,79	88,45	92,54	92,10	97,95
6	Angka Melanjutkan Sekolah :	%								
	- SD/MI/Paket A		98,58	100,00	99,25	106,61	99,34	98,42	99,78	100,10
	- SMP/MTs/Paket B		90,05	98,50	91,65	89,68	93,20	90,28	94,99	95,16
	- Lulusan SMA/MA		82,76	100,00	95,00	85,07	97,00	98,13	98,00	99,43
	- Lulusan SMK		80,57	100,00	95,00	80,62	96,00	96,55	98,00	98,16

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi NTB.

Perkembangan realisasi indikator kinerja program ADONO memperlihatkan peningkatan dari tahun ke tahun. Namun sampai dengan tahun 2011 realisasi masih dibawah target yang ditetapkan pada tahun 2013. Dengan demikian proses implementasi program ADONO masih perlu ditingkatkan sehingga pada akhir tahun 2013 dapat menpai target yang telah direncanakan.

Adapun untuk ABSANO dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah penduduk yang melek huruf, mampu membaca, menulis dan berhitung atau tidak buta aksara latin dan angka. Ikhtiar ini berbasis di desa/kelurahan dengan menggerakkan partisipasi masyarakat secara luas. Langkah yang ditempuh dalam rangka menurunkan angka buta aksara menuju nol antara lain: (1) pendataan ulang jumlah penduduk buta huruf disetiap desa/kelurahan se-NTB yang dilakukan oleh kepala desa/kelurahan dengan melibatkan perangkat desa; (2) mengucurkan bantuan pendataan kesetiap desa/kelurahan; (3) memberikan insentif kepada warga belajar untuk datang ke tempat belajarnya; (4) memberikan insentif kepada pengelola PKBM; (5) merangsang masyarakat mendirikan PKBM sehingga disetiap desa terdapat minimal satu PKBM; (6) meningkatkan honorarium tutor dan tutor harus berasal dari desa/kelurahan setempat; (7) mengefektifkan monitoring dan evaluasi serta pemantauan dan pengendalian dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat.

Target kinerja Program ABSANO sebagai berikut:

Tabel 4.3. Rencana Kerja dan Target Capaian Kinerja ABSANO di NTB

No	Rencana Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian Kinerja				
				2009	2010	2011	2012	2013
1	Pendidikan non formal dan informal (PNFI)	Terjadinya peningkatan angka melek aksara	orang	108,901	83,500	174,457	123,791	24,518
2	Pelatihan Tutor KF	Bertambahnya jumlah tutor KF yang terlatih	orang	10.890	1322	0	0	0

Sumber: Dinas Dikpora NTB Tahun 2011

Secara lebih rinci rencana penuntasan buta aksara Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2009-2013 sebagai berikut:

Tabel 4.4. Rencana Penuntasan Buta Aksara di Provinsi NTB 2009– 2013

NO	Uraian	TAHUN				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	% Melek Aksara	84,30	88,45	92,10	96,70	100,00
2.	Jumlah Buta Aksara	417.277	308.376	238.550	150.550	10.265
3.	Yang dibelajarkan	108.901	83.500	110.000	175.356	10.265
4.	Asumsi lulus 80%	87.121	66.800	88.000	140.285	10.265
5.	Sisa	308.376	238.576	150.550	10.265	0

Sumber: Dinas Dikpora NTB, 2011

Tabel 4.4 diatas memperlihatkan bahwa proses pembelajaran dalam rangka menuntaskan buta huruf di NTB terus dilaksanakan. Jumlah penduduk yang buta aksara dari tahun ke tahun terus menurun. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi program ABSANO di NTB telah berjalan dengan baik. Namun demikian yang menjadi tantangan dalam program ABSANO adalah

mempertahankan kemampuan membaca dan menulis dari setiap warga belajar yang telah tuntas mengikuti pembelajaran. Disinilah akan terlihat efektifitas dari proses implementasi program ABSANO, apabila setiap warga belajar pemberantasan buta huruf dapat menulis dan membaca secara berkelanjutan.

C. Temuan Lapangan Proses Implementasi Kebijakan

Berdasarkan informasi dan data yang dihimpun dari kuesioner atau daftar pertanyaan yang disebarakan ke institusi/lembaga yang bertindak sebagai implementor bahwa tahapan dan proses implementasi G3A dapat dideskripsikan dengan urutan-urutan sebagai berikut: (1) sosialisasi dan diseminasi; (2) pengorganisasian; (3) penyusunan program kerja; (4) pelaksanaan; (5) pengendalian dan pengawasan; serta (6) pelaporan.

1. Sosialisasi dan Diseminasi

Sosialisasi implementasi G3A dilakukan oleh SKPD pelaksana maupun SKPD pendukung G3A. Dinas Kesehatan Provinsi NTB, RSUP dan Dinas Dikpora Provinsi NTB selaku SKPD pelaksana menyelenggarakan aktivitas sosialisasi dan diseminasi kepada kelompok sasarannya, yaitu para penerima manfaat dari program/kegiatan G3A seperti ibu-ibu yang berkunjung dan mendapat pelayanan di posyandu, kelompok belajar di PKBM, penerima Jamkesmas, penerima beasiswa siswa miskin dan komunitas/organisasi masyarakat/LSM/pesantren yang dapat diberdayakan untuk mendukung implementasi G3A. Bentuk sosialisasi dilaksanakan melalui berbagai media, baik cetak maupun

elektronik serta kunjungan langsung kelapangan bersilatullah dengan masyarakat.

Selain itu kepada jajaran internalnya sendiri Dinas Kesehatan Provinsi NTB, RSUP dan Dinas Dikpora Provinsi NTB juga dilakukan sosialisasi agar desain kebijakan G3A dapat diaplikasikan dengan tepat dan mencapai tujuan, sasaran serta hasil yang telah direncanakan. Bentuk sosialisasi yang dilaksanakan adalah melalui rapat-rapat koordinasi dan publikasi/barang cetakan.

Sosialisasi internal tentang desain kebijakan G3A dilaksanakan secara intensif dengan tujuan untuk menyatukan pemahaman dan langkah-langkah teknis pelaksanaan dalam mewujudkan AKINO, ADONO dan ABSANO.

Kadis Kesehatan dan Kadis Dikpora menyatakan:

“Setiap jajarannya harus memahami hirarki perundang-undangan yang menjadi landasan program G3A serta instrument-instrument yang akan digunakan dalam mewujudkan tujuan G3A”.

Aktivitas sosialisasi dilaksanakan dalam tahun pertama implementasi G3A tahun 2009 antara 0-6 bulan. Pada masa enam bulan pertama ini sosialisasi diselenggarakan secara intensif kepada publik guna menggalang dukungan dan partisipasi publik. Setelah itu sosialisasi diarahkan kepada setiap kelompok penerima manfaat dalam setiap implementasi program / kegiatan dengan memanfaatkan forum atau media silatullah dengan berbagai kelompok masyarakat.

Forum-forum yang dimaksud antara lain pertemuan dalam acara-acara yang diselenggarakan masyarakat maupun acara-acara formal yang dihadiri berbagai pihak yang terkait dengan G3A.

Selain sosialisasi juga dilakukan diseminasi yaitu penyebaran informasi secara luas melalui media massa dan barang-barang cetakan seperti leaflet, brosur, poster maupun media online, seperti portal atau website.

Kadis Kesehatan dan Kadis Dikpora menjelaskan:

“Media partner yang digunakan untuk diseminasi informasi G3A adalah Koran Lombok Post dan Koran Suara NTB. Kedua koran ini merupakan dua media terbesar dan berpengaruh dalam pembentukan opini publik di NTB, sehingga kedua media ini selalu mendapat prioritas kerjasama.”

Media lain yang dimanfaatkan adalah Media Internal Pemerintah Provinsi NTB, seperti Bulletin NTB Bersaing yang terbit setiap bulan sejak Januari 2009 sampai dengan sekarang. Disamping media internal (bulletin) pada Dinas Kesehatan dan Dinas Dikpora dikembangkan media luar ruang untuk penyebaran informasi, seperti baliho, spanduk dan banner.

Barang-barang cetakan juga banyak disebar oleh Dinas Kesehatan maupun Dinas Dikpora dan SKPD lain. Secara online melalui internet, yaitu melalui website resmi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan alamat www.ntbprov.go.id dan web program unggulan www.programunggulan.ntbprov.go.id dilakukan publikasi rutin perkembangan kegiatan G3A.

a. Pengorganisasian

Proses pengorganisasian merupakan tahapan pembentukan organisasi pelaksanaan yang meliputi pembagian tugas dan fungsi, penyusunan unit kerja/tim; pengaturan tata kerja dan petunjuk pelaksanaan serta menetapkan mekanisme koordinasi.

“Organisasi pelaksanaan program unggulan harus berjalan efektif dengan melibatkan seluruh jajaran Pemerintah Provinsi NTB sesuai wewenang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat.” (Wawancara dengan Gubernur NTB Tgl 21 Desember 2011).

Adapun pembagian tugas telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6, 7 dan 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-Dinas Daerah serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi NTB.

Secara operasional pembagian tugas dalam implementasi kebijakan G3A dikelompokkan menjadi lima bagian, yaitu:

Pertama, perangkat teknis yang bertugas melaksanakan program/kegiatan secara operasional dilapangan, yakni seperti program AKINO diorganisasikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi NTB, sedangkan Program ADONO dan ABSANO diorganisasikan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi NTB.

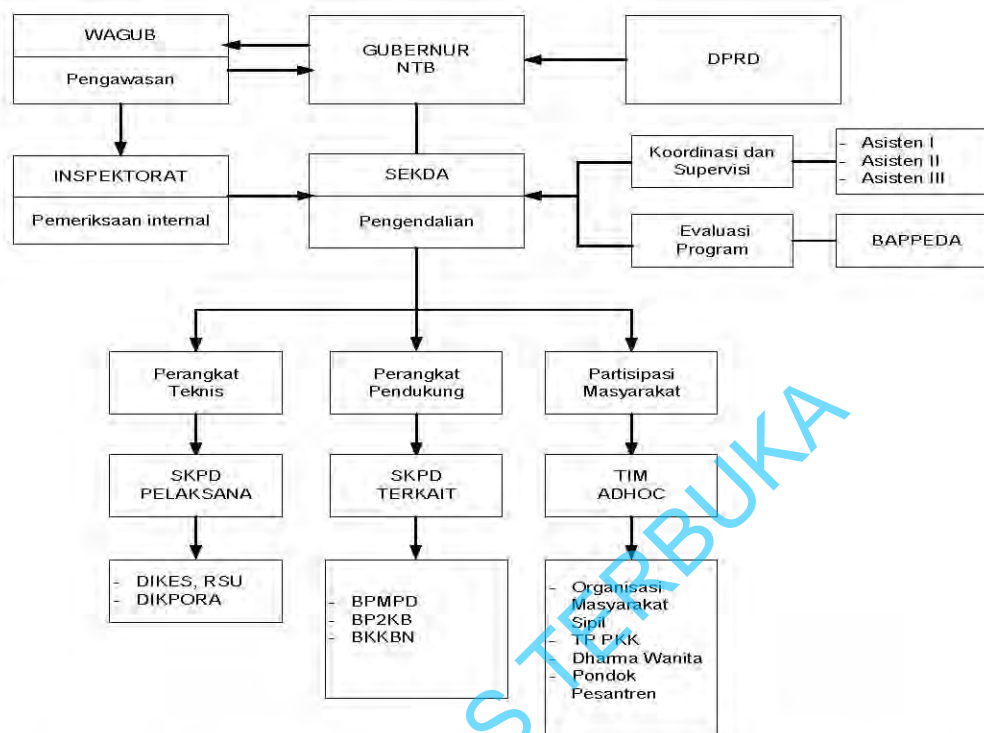
Kedua, perangkat pendukung yang bertugas menyiapkan program/kegiatan yang mendukung atau memiliki keterkaitan program dengan SKPD yang bertindak sebagai SKPD pelaksana.

Ketiga, perangkat yang bertugas menggerakkan partisipasi masyarakat dalam rangka membangun gerakan masyarakat secara massip untuk terlibat dan berperan mendukung G3A. Perangkat ini disusun dalam bentuk suatu Tim yang bersifat Ad Hoc dengan Keputusan Gubernur NTB Nomor 130 Tahun 2009 tentang Tim Koordinasi, Kelompok Kerja (POKJA) dan Sekretariat Gerakan 3-A (AKINO, ABSANO dan ADONO) Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pembentukan Tim Koordinasi, Kelompok Kerja dan Sekretariat G3A ini terus diperbaharui setiap tahun dengan Keputusan Gubernur masing-masing Keputusan Gubernur NTB Nomor 185 Tahun 2010 dan Keputusan Gubernur NTB Nomor 74 Tahun 2011.

Keempat, perangkat yang bertugas melaksanakan koordinasi, monitoring, supervisi dan evaluasi dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan G3A. Fungsi koordinasi, monitoring dan supervisi dilaksanakan oleh para asisten sekretaris daerah, sedangkan evaluasi program dilaksanakan oleh BAPPEDA dalam rangka menilai kinerja program terkait dengan pencapaian indikator RPJMD.

Kelima, perangkat pengendalian dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah dibantu oleh Inspektorat selaku aparatur pemeriksaan internal. Sedangkan pengawasan dilaksanakan Wakil Gubernur. Selain itu ada juga pengawasan dari DPRD sesuai fungsinya yang melaksanakan *budgeting* (penganggaran), legislasi (perumusan peraturan daerah) dan pengawasan.

Model struktur organisasi Pemerintah Provinsi NTB dalam Implementasi G3A digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.1: Struktur Organisasi dalam Implementasi Program Unggulan G3A di NTB

Secara teknis Implementasi G3A dioperasionalkan oleh perangkat teknis pada SKPD Pelaksana, perangkat pendukung melibatkan SKPD terkait yang memiliki kesamaan kelompok sasaran dengan program/kegiatan G3A serta perangkat yang bersifat adhoc dalam bentuk Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja.

2. Pelaksanaan

Proses pelaksanaan merupakan sarana terpenting dalam mewujudkan tujuan implementasi. Dalam kaitan ini penting dijelaskan jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan dan unit-unit yang melaksanakan.

Jenis kegiatan yang dilaksanakan diformulasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang mendapatkan alokasi anggaran dari APBD. Sedangkan untuk kegiatan yang mendapatkan anggaran dari APBN diformulasikan dalam DIPA APBN untuk SKPD terkait.

Alokasi anggaran untuk program dan kegiatan G3A selama tiga tahun terakhir dipaparkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.5. Alokasi Anggaran Kegiatan G3A selama Tiga Tahun Terakhir

PROGRAM G 3A	TAHUN ANGGARAN		
	2009	2010	2011
AKINO	Rp. 4.598.354.000	Rp. 3.552.146.715	Rp. 957.241.000
ABSANO	Rp. 27.998.447.100	Rp. 20.889.500.000	Rp. 40.752.000.000
ADONO	Rp. 80.563.116.000	Rp. 72.329.580.000	Rp. 34.581.960.000
TOTAL ANGGARAN	Rp. 113.159.917.100	Rp. 96.771.226.715	Rp. 76.291.201.000

Sumber : Sekretariat Tim G3A Tahun 2011

Instansi atau lembaga terkait dalam pelaksanaan G3A yaitu lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat. Keterkaitan semua unsur dalam pelaksanaan merupakan manifestasi dari gerakan yang ditopang oleh semangat kebersamaan. Instansi dan Lembaga yang menjadi mitra kerja G3A dan jenis kegiatannya dapat digambarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.6: Mitra Kerja dan Jenis Kegiatan G3A di NTB

NO	LEMBAGA MITRA	KEGIATAN		
		AKINO	ABSANO	ADONO
1	DIKES	Penambahan Poskesdes dan Bidan Desa Pemberdayaan Masyarakat Desa Siaga Pelatihan/TOT Bidan Desa		
2	DIKPORA		Keaksaraan Fungsional	BOS, Beasiswa bagi Siswa Kurang Mampu, Beasiswa Mahasiswa S1, S2, S3, Peningkatan Kualifikasi Tenaga Pendidik
3	BPPKB	Penerbitan Perda Perlindungan dan Peningkatan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita	Pembinaan PEKA, Desa Prima	Pembinaan PEKA, Desa Prima
4	BKKBN	Kerja sama dengan Muslimat NW dan POLDA		
5	BPMPD	PNPM-MP, PNPM Generasi dan Pekan Destarata	PNPM-MP, PNPM Generasi, Pekan Destarata, Pembelajaran KF melalui Bantuan Desa/Kelurahan	PNPM-MP, PNPM Generasi, Pekan Destarata
6	TP PKK Prov. NTB dan Dharma Wanita Persatuan	Aktif Menggerakkan anggota dalam Kegiatan Donor Darah	Menyediakan Tutor Uji Coba Keaksaraan ACM (Aku Cepat Membaca) yaitu KF dengan waktu 7 kali pertemuan	
7	ACCES		Gardu Cerdas	Gardu Cerdas

Berbagai bentuk pelaksanaan program G3A diatas menunjukkan bahwa implementasi G3A ditempuh melalui berbagai sektor pembangunan yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota serta

masyarakat secara luas. Di setiap kab/kota selain menyediakan *cost sharing* melalui APBD masing-masing Kab/Kota; juga terbangun gerakan-gerakan yang memiliki kesamaan orientasi dengan G3A.

3. Pengendalian dan Pengawasan

Pengendalian dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB melalui proses koordinasi, monitoring dan evaluasi. Koordinasi dilaksanakan oleh para asisten sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 222 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rapat Pimpinan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Untuk proses monitoring pelaksanaan program G3A dilakukan oleh Biro Administrasi Pembangunan melalui Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan setiap bulan. Monitoring juga dilaksanakan dengan turun ke lapangan melalui perjalanan dinas dalam daerah. Selanjutnya evaluasi capaian kinerja dalam bentuk output dan outcomes setiap program/kegiatan dilaporkan ke BAPPEDA. Evaluasi kinerja program dilakukan setiap akhir tahun dengan membandingkan target kinerja program dalam RPJMD dan RKPD.

Untuk mengawal agar seluruh proses, tahapan dan pencapaian kinerja dapat berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan; Wakil Gubernur selaku pembantu Gubernur melakukan pengawasan teknis maupun anggaran.

Proses pengawasan yang dilaksanakan Wagub dalam berbagai bentuk seperti pengawasan langsung kepada setiap SKPD juga dengan

mengefektifkan pengawasan melekat dari setiap kepala SKPD kepada bawahannya. Wujud pengawasan langsung antara lain inspeksi mendadak atau Sidak.

Pengawasan juga dilaksanakan melalui pengawasan masyarakat, melalui SMS Center, dan media sosial seperti twitter, facebook, mailing list, surat pembaca dan lain-lain.

Terakhir pengawasan fungsional oleh Inspektorat Provinsi serta pengawasan eksternal dari BPK. Pengawasan aparat pengawasan fungsional maupun BPK secara rutin berjalan setiap tahun.

4. Pelaporan

Penyusunan pelaporan sejak awal pelaksanaan, pertengahan dan akhir diwujudkan dengan adanya kewajiban setiap kepala SKPD menyusun laporan awal, laporan pertengahan dan laporan tahunan yang disampaikan kepada Gubernur.

Laporan ini juga berfungsi sebagai sarana dokumentasi. Namun yang paling substantif dari setiap laporan tersebut menyajikan input, proses, output, outcomes, dampak serta berbagai masalah dan hambatan yang dihadapi.

Laporan tahunan setiap SKPD menjadi input utama dalam penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Gubernur setiap tahun yang disampaikan ke DPRD. Juga untuk penyusunan LIPPD yang disampaikan ke Pemerintah Pusat.

Khusus tentang laporan G3A, terintegrasi dalam berbagai laporan SKPD seperti diuraikan diatas, namun secara khusus karena merupakan program unggulan juga dibuat laporan pelaksanaan AKINO, ADONO dan ABSANO masing~masing oleh Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga serta Tim G3A.

D. Penyajian Data

1. Implementasi Kebijakan G3A

a. Komunikasi

Komunikasi yang dibangun dalam rangka implementasi kebijakan G3A dilaksanakan melalui komunikasi langsung maupun tidak langsung melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronik (televisi dan radio). SKPD pelaksana mempunyai intensitas komunikasi yang cukup padat dan menjangkau sasaran diseluruh wilayah NTB. Juga sistem komunikasi berlangsung dua arah. Hal ini terlihat dari adanya respon masyarakat dalam bentuk kritik yang terekspose di berbagai media massa. Hasil survai kepada penerima manfaat menyatakan bahwa kritik media terhadap implementasi kebijakan G3A cukup banyak, yaitu mencapai 71%.



Sumber : Data primer diolah, 2011

Gambar 4.2: Persentase Kritik Terhadap Implementasi G3A di NTB

Selanjutnya dilaksanakan proses transmisi yakni transformasi kebijakan dari para implementor kepada staf pelaksana dan para penerima manfaat maupun kepada SKPD pendukung. Proses ini dilaksanakan melalui pertemuan langsung, rapat-rapat koordinasi dan melalui pemberitaan di media massa.

Edward (1980) menyatakan bahwa *transmisi*, sebelum keputusan diimplementasikan, pejabat harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan perintah pelaksanaannya telah dikeluarkan. Ini artinya, mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui dengan pasti apa yang harus mereka lakukan. Oleh karena itu, keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat. Ini berarti komunikasi-komunikasi harus akurat dan dapat dimengerti dengan cermat oleh pelaksana.

Dalam kaitan ini G3A sebagai sebuah kebijakan publik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada tahap ini sudah dilaksanakan

komunikasi dengan baik dan benar. Walaupun memang ada saja hambatan yang ditemui di lapangan, termasuk kritik dan saran.

Beberapa hambatan yang timbul dalam mentransmisikan perintah-perintah implementasi, yaitu: (a) pertentangan pendapat antara pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan; (b) informasi melewati berlapis-lapis hirarkhi birokrasi; dan (c) perbedaan persepsi dalam menangkap atau menterjemahkan persyaratan-persyaratan suatu kebijakan.

Hasil survai persepsi publik dari penerima manfaat menunjukkan bahwa tingkat persepsi publik terhadap kebijakan G3A, 75 persen menyatakan baik dan 25 persen menyatakan sangat baik.



Sumber : data primer diolah, 2011

Gambar 4.3: Persentase Persepsi Publik terhadap Implementasi G-3A

Sejalan dengan persepsi publik terhadap kebijakan G3A, dari survai kepada penerima manfaat ditemukan pula bahwa publik tidak menghendaki kebijakan G3A dihentikan, melainkan menghendaki untuk diteruskan, disempurnakan dan ditingkatkan dengan melakukan review seperlunya.



Sumber: data primer diolah, 2011

Gambar 4.4: Harapan Publik terhadap Implementasi G-3A di NTB

Tingkat kepuasan publik terhadap implementasi G3A di NTB, 57% menyatakan cukup dan 43% menyatakan kurang.



Sumber : data primer diolah, 2011

Gambar 4.5: Persentase Tingkat Kepuasan Publik terhadap Implementasi G-3A di NTB

Proses komunikasi dalam implementasi G3A juga dilaksanakan oleh para pengambil kebijakan. Gubernur dan Wakil Gubernur NTB menyampaikan pokok-pokok kebijakan G3A yang bersifat umum dalam

berbagai arahan dalam Rapat-Rapat Pimpinan yang digelar setiap tiga bulan.

Dalam kaitan ini yang diperlukan adalah *konsistensi*, maksudnya bahwa jika implementasi kebijakan ingin berjalan efektif, maka pemerintah-pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Disamping itu, perlu dihindari adanya perintah-perintah yang bertentangan satu sama lain. Sebab, keputusan-keputusan yang bertentangan yang tentu saja membingungkan dan menghambat dalam pelaksanaan kebijakan.

Kebijakan umum tersebut selanjutnya secara lebih teknis dijabarkan kedalam kebijakan anggaran yang tertuang dalam APBD. Kebijakan anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD merupakan pedoman dalam menyusun kebijakan operasional oleh para implementor.

Hal penting pada tahap ini adalah kejelasan (*clarity*), maksudnya, jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana, tetapi juga harus jelas. Dikatakannya, ada enam faktor yang mendorong ketidakjelasan komunikasi kebijakan, yaitu: (a) kompleksitas kebijakan publik; (b) keinginan untuk tidak mengganggu kelompok-kelompok masyarakat; (c) kurangnya konsensus mengenai tujuan-tujuan kebijakan; (d) masalah-masalah dalam memulai suatu kebijakan baru; (e) menghindari pertanggungjawaban kebijakan; dan (f) sifat pembuatan kebijakan pengadilan.

Dalam tiga tahun masa pelaksanaan G3A, seluruh informan menyatakan proses komunikasi telah cukup baik berjalan. Hal ini dapat dilihat dari telah diterimanya berbagai macam informasi tentang G3A baik oleh masyarakat secara luas maupun kelompok sasaran penerima manfaat program/kegiatan G3A dengan terbentuknya suatu pandangan, sikap dan harapan publik agar G3A terus dilanjutkan dan ditingkatkan pelaksanaannya sehingga benar-benar terwujud menjadi suatu gerakan masyarakat.

b. Sumberdaya

Sumberdaya yang penting dalam menentukan efektivitas implementasi kebijakan adalah *staf*. Disamping jumlahnya yang cukup, juga staf yang ada harus punya kualitas yang baik atau memiliki keahlian ataupun keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan, baik keterampilan teknis maupun dalam pengelolaan.

Sumberdaya penting lainnya adalah *informasi*. Dalam kaitan ini, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu: (a) informasi mengenai bagaimana melaksanakan kebijakan; dan (b) data tentang ketaatan personil-personil terhadap peraturan-peraturan pemerintah. Artinya, pelaksana-pelaksana harus mengetahui apakah orang-orang dan organisasi yang terlibat dalam implementasi kebijakan mentaati undang-undang atau tidak.

Dalam sumberdaya termasuk juga didalamnya *wewenang*. Artinya, diperlukan adanya wewenang formal (wewenang diatas kertas) untuk melaksanakan kebijakan yang harus digunakan secara efektif,

disamping fasilitas-fasilitas. Maksudnya adalah fasilitas-fasilitas dan perlengkapan yang diperlukan untuk menterjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik. Dengan kata lain diperlukan adanya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif.

Faktor sumberdaya dinyatakan oleh semua informan belum memadai, baik menyangkut kebutuhan sumberdaya manusia, anggaran, peralatan maupun sumberdaya informasi dan kewenangan.

Sumberdaya manusia pada setiap SKPD pelaksana maupun SKPD pendukung terutama staf operasional yang secara teknis mengurus implementasi G3A jumlahnya sangat sedikit, sehingga tidak cukup mendukung. Demikian pula kapasitas dan kecakapannya masih kurang terlatih. Adapun untuk sumberdaya staf dilapangan, seperti kader posyandu, bidan desa dan tutor pemberantasan buta huruf kualifikasinya masih dipertanyakan.

Sumberdaya anggaran juga dirasakan masih sangat kurang, terutama biaya operasional.

"Dari sisi komitmen kebijakan sudah kuat. Kapasitas dan struktur kelembagaan juga sudah kuat. Namun dari pengaduan masyarakat di Pagutan Lombok Tengah kelemahannya adalah biaya operasional untuk mendukung kegiatan tidak ada". (Hendriadi dari SOMASI, dalam FGD tanggal 21 Desember 2011).

Hal ini diperkuat oleh Kabid Pendidikan Menengah Dinas Dikpora Provinsi NTB yang disampaikan dalam FGD tanggal 21 Desember 2011.

"Dana operasional tidak cukup tersedia. Demikian pula untuk honorarium petugas lapangan tidak tersedia untuk

pengendalian kegiatan di tingkat lapangan/pedesaan. Selama ini Pemerintah Provinsi NTB telah mengalokasikan dana sepuluh juta per desa untuk perangkat saja desa dalam rangka mendukung pelaksanaan pendataan G3A”.

Selanjutnya Kadis Kesehatan Provinsi NTB juga menjelaskan bahwa:

“ Sumberdaya peralatan di Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu untuk mendukung kegiatan AKINO belum mencukupi”.

Kadis Dikpora terkait dengan kegiatan G3A menjelaskan bahwa:

“Peralatan pembelajaran juga dirasakan sangat kurang oleh para penerima manfaat program. Begitu pula dengan sarana mobilitas untuk menjangkau wilayah pedesaan yang demikian banyak dalam rangka monitoring dirasakan sangat terbatas. Apalagi untuk mendukung kegiatan lapangan, sarana mobilitas sangat diperlukan tetapi tidak cukup tersedia”.

Sumberdaya informasi juga belum cukup mendukung.

“Basis data yang akurat untuk menetapkan kelompok sasaran penerima manfaat program G3A belum terintegrasi dalam suatu pusat data yang handal dan akurat. Demikian pula faktor ketiadaan kewenangan Pemerintah Provinsi untuk mengkoordinasikan kegiatan lapangan G3A yang berbasis di pedesaan, juga merupakan kendala yang serius dihadapi. Hal ini telah menyebabkan banyak rencana aksi yang telah disusun tidak berjalan efektif di tingkat pedesaan”. (Farid Tolomundu dalam FGD tanggal 21 Desember 2011).

c. Disposisi

Faktor disposisi meliputi kemauan, keinginan dan kecenderungan.

Kecenderungan-kecenderungan bisa menimbulkan hambatan dalam implementasi kebijakan yang efektif, bila beberapa kebijakan masuk kedalam “*zone ketidakacuhan*” para administrator, yaitu bila kebijakan-

kebijakan bertentangan dengan pandangan-pandangan kebijakan substantif para pelaksana atau kepentingan-kepentingan pribadi atau organisasi mereka. Artinya, bila para pelaksana tidak sepakat dengan substansi suatu kebijakan.

Dengan demikian kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku para pelaksana kebijakan perlu diperbaiki misalnya dengan memberikan insentif yang memadai, atau memberikan sanksi-sanksi bagi yang mengarah pada kecenderungan negatif.

Para implementor dan semua stakeholder menghendaki agar G3A terus dilanjutkan dan ditingkatkan.

”Program G3A pada tingkat basis mulai ada penghargaan; walaupun program ini belum dibarengi dengan pelibatan masyarakat secara luas sehingga kesannya sebagai proyek. Sinergi perlu ditingkatkan bahkan diperlukan awig-awig desa untuk mendukung program ini. Misalkan tentang perhatian ke pendidikan anak, ibu melahirkan” (Mas’ud dari Yayasan SANTAI dalam FGD tanggal 21 Desember 2011).

Dilihat dari aspek *acceptence*, sikap menerima masyarakat masih perlu diperkuat lagi karena belum tumbuh partisipasi yang kuat dari masyarakat. Sebagian besar kelompok penerima manfaat yang diinterview menyatakan G3A dianggap sebagai proyek pemerintah, sehingga ada masih sikap acuh tak acuh masyarakat terhadap pelaksanaan G3A.

Semua peserta FGD sepakat masalah pola implementasi G3A yang bersifat proyek, perlu segera diatasi dan mengarahkan kembali agar G3A menjadi suatu gerakan seperti pertama kali digagas dan dilaksanakan.

Bahkan direkomendasikan oleh semua peserta FGD untuk disusun suatu regulasi dalam bentuk peraturan daerah yang menjadi payung hukum untuk menjamin keberlangsungan G3A di masa depan meskipun terjadi pergantian Gubernur/Wakil Gubernur.

“Kedepan perlu digagas untuk membangun pusat data G3A yang akurat, seperti melalui SMS Gateway dengan melibatkan para penerima manfaat dan merangkul semua pihak (Masyarakat, OKP, LSM, ORMAS, akademisi) dalam membangun rasa kepemilikan gerakan 3A. Juga Payung hukum untuk menjamin keberlanjutan; Mekanisme & sistem monev maupun pengaduan perlu dikembangkan. Pemberian penghargaan dan sanksi dengan standar yang jelas, transparan, konsekwen dan terbebas dari kepentingan”. (Nunik dari Sekretariat Program Unggulan Provinsi NTB dalam FGD tanggal 23 Desember 2011).

d. Struktur Birokrasi

Pada umumnya birokrasi adalah pelaksana utama kebijakan publik, maka struktur birokrasi menjadi penting. Dikatakan Edwads (1980), birokrasi memiliki dua karakteristik, yaitu: (a) prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar yang biasa disebut *Standar Operating Procedures (SOP)*. Hal ini merupakan tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas; dan (b) fragmentasi, yang berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi-organisasi birokrasi pemerintah.

Faktor struktur birokrasi juga dirasakan masih menjadi kendala, dimana ketiadaan hubungan hirarkis SKPD pelaksana maupun SKPD pendukung G3A dengan aparat di desa/kelurahan menyebabkan G3A belum cukup efektif berjalan ditingkat lapangan.

”SKPD pelaksana buat baliho besar dimana-mana, ndak ada hubungannya dengan tujuan program G3A. SKPD kurang kreatif dan inovatif, Performnya masih belum pas”.(TGH Hasanain dalam FGD tanggal 21 Desember 2011).

Organisasi pelaksana di tingkat provinsi meskipun telah disusun dengan rapi dan pembagian tugas yang jelas, belum diikuti dengan strategi dan langkah yang sama atau memadai oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Juga yang sangat menarik dalam FGD, Kepala Bidang Binkesmas Dinas Kesehatan Provinsi NTB mengakui jika belum ada SOP terkait dengan manajemen dilapangan untuk pelaksanaan G3A. SOP yang sudah tersedia hanya menyangkut pelayanan AKINO.

”Hal Mendasar yang seringkali tidak pernah kita miliki adalah SOP. Kalau dikantor pemerintahan, apa yang dikerjakan Bappeda, masyarakat ngak tahu apa yg dilakukan. G3A ini juga saya kira belum ada SOP.” (Ibu Atun dari IAIN dalam FGD tanggal 22 Desember 2011).

Hal ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang harus menyiapkan SOP masih belum cukup efektif mendukung implementasi G3A. Demikian pula dengan proses monitoring dan evaluasi masih diadakan sekedarnya, belum ada standarisasi maupun mekanisme yang

jas. Bahkan ketika terjadi hambatan atau masalah dilapangan tidak tersedia mekanisme pengaduan maupun pengawasannya.

1. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan G3A

Melalui FGD dilakukan proses dan analisis SWOT terhadap implementasi G3A setelah dua tahun berjalan. Pertanyaan pokok dalam FGD yang berlangsung dalam empat kali FGD adalah apakah implementasi kebijakan G3A perlu dilanjutkan atau tidak. Hasil rekaman proses FGD diformulasikan kedalam analisis yang memetakan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman kebijakan G3A.

Berdasarkan analisis matrik dapat diidentifikasi Faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan G3A, yaitu:

Pertama, faktor pendukung. Faktor yang mendukung kebijakan G3A antara lain keikutsertaan perguruan tinggi. Perguruan tinggi seperti Universitas Mataram dan IAIN Mataram telah mengagaskan pelaksanaan KKN Tematik untuk mendukung implementasi G3A.

Juga para Tuan Guru sebagai tokoh kepemimpinan informal yang sangat berpengaruh dimasyarakat sangat siap untuk dilibatkan secara langsung. Termasuk juga OKP dan organisasi masyarakat sipil lainnya sangat mengharapkan ada kerjasama yang sinergis dengan Pemerintah Provinsi NTB maupun Kabupaten/Kota se-NTB dengan semua organisasi/komponen masyarakat untuk melaksanakan G3A.

”Dulu program KB gagal kemudian berhasil, karena kemampuan para Tuan Guru. Seperti dulu ke Bayan dikirimkan para ulama atau dai untuk memberi pencerahan. Itu yang harusnya diikuti dalam mendukung G3A ini.” (Iqbal dari OKP dalam FGD tanggal 22 Desember 2011).

Untuk mendukung ABSANO juga telah terbangun jaringan PGRI diseluruh wilayah NTB, termasuk forum PKBM. Adapun untuk AKINO sudah disediakan program dan pendaanaan JAMPERSAL yang cukup populer dikalangan masyarakat bahkan program ini mulai diadopsi oleh Pemerintah Pusat.

Infrastruktur pelaksanaan AKINO, ABSANO dan ADONO juga telah cukup baik sampai ke tingkat pedesaan. Bahkan telah mulai berbagai bentuk kearifan lokal dalam bentuk awiq-awiq untuk menjamin keberlanjutan G3A di wilayahnya.

Kedua, faktor penghambat. Faktor penghambat yang dirasakan adalah aparatur birokrasi dinilai masih kurang kreatif dalam mengemas dan mengembangkan strategi implementasi G3A. Bahkan dilihat belum ada perubahan perilaku yang mendasar dari aparatur pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, masih bekerja menyelesaikan rutinitas semata.

Data yang dijadikan dasar dalam penentuan kelompok sasaran juga masih kualitasnya rendah, tidak valid. Belum ada fokus area dalam menginterpendensi masalah yang terkait dengan G3A.

Dalam bidang kebijakan yang mendukung seperti Peraturan Daerah yang dapat menjamin keberlangsungan G3A dan koordinasi

yang efektif dilapangan juga belum tersedia. Demikian pula yang program insentif, disinsentif, dan *punishment* belum diformulasikan.

“Kebijakan, belum ada payung hukum, sehingga keberlanjutan masih diragukan. Mekanisme & sistem monev belum ada; koordinasi masih lemah, pengorganisasian di tingkat kabupaten saat ini tidak ada, dan G3A masih di tingkat pucuk pimpinan sedangkan di tingkat birokrasi masih lemah; Reward & Punishment juga belum ada.”(Wawancara dengan Sekretaris Gerakan 3A, tanggal 21 Desember 2011).

2. Dampak Implementasi Kebijakan Terhadap IPM

IPM mencakup tiga komponen yang dianggap mendasar bagi manusia meliputi peluang hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*) dan hidup layak (*living standards*). Peluang hidup diukur berdasarkan angka harapan hidup waktu lahir; pengetahuan diukur berdasarkan angka rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk berusia 15 tahun ke atas; dan hidup layak diukur dengan pengeluaran perkapita yang didasarkan pada paritas daya beli (*purchasing power parity*).

Berdasarkan Data IPM yang dipublikasikan BPS Provinsi NTB bahwa secara umum pembangunan manusia di NTB selama periode 2008 – 2010 mengalami peningkatan. Nilai IPM NTB pada tahun 2008 mencapai 64,12 meningkat menjadi 64,66 pada tahun 2009 dan pada tahun 2010 menjadi 65,20. Peningkatan selama periode 2009-2010 sekitar 0,54 point, periode 2008-2009 sekitar 0,44 point; dan peningkatan 2007 ke 2008 sebesar 0,41 point. Sedangkan perkembangan masing-masing komponen IPM adalah sebagai berikut:

Pertama, Indeks Harapan Hidup (IHH). Data BPS menyajikan bahwa pada periode 2007 – 2008 angka harapan hidup manusia di NTB berkembang dari 61,20 tahun menjadi 60,50 tahun. Selanjutnya pada tahun 2009 meningkat menjadi 61,80 tahun dan pada tahun 2010 menjadi 62,11 tahun. Dalam dua tahun terakhir peningkatan AHH manusia NTB terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan, sehingga dapat diprediksi bahwa ini juga sebagai dampak dari implementasi kebijakan G3A.

Kedua, Angka Melek Huruf dan rata-rata lama sekolah. Angka melek huruf pada tahun 2007 mencapai 80,10 persen meningkat menjadi 80,13 persen pada tahun 2008 dan meningkat lagi menjadi 80,18 persen pada tahun 2009 dan 81,05 pada tahun 2010. Selanjutnya angka rata-rata lama sekolah di NTB juga terus mengalami peningkatan, semula mencapai 6,70 pada tahun 2007 dan 2008; meningkat menjadi 6,73 tahun pada tahun 2009 dan 6,77 tahun 2010.

Berdasarkan data tersebut bahwa kinerja program pendidikan untuk mengurangi angka buta huruf dan meningkatkan partisipasi sekolah di NTB sudah mengalami kemajuan yang sangat berarti.

Ketiga, Paritas Daya Beli. Perkembangan daya beli masyarakat NTB terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2007 daya beli masyarakat NTB mencapai Rp. 630,48 ribu; meningkat menjadi Rp. 633,58 ribu pada tahun 2008 dan meningkat lagi menjadi Rp. 637,98 ribu pada tahun 2009 dan Rp. 639,89 ribu pada tahun 2010. Hal ini menggambarkan adanya perbaikan ekonomi NTB selama tiga tahun terakhir.

E. Pembahasan

1. Implementasi Kebijakan G3A

Kebijakan G3A dilihat dari bentuknya merupakan suatu program terpadu yang diimplementasikan dengan pola gerakan yang melibatkan unsur pemerintah, masyarakat dan swasta. Sebagai suatu program, kebijakan G3A langsung dapat diimplementasikan dalam bentuk proyek/kegiatan yang dirasakan oleh pemanfaat (*beneficiaries*). Oleh karena itu peran kebijakan G3A ini sangat strategis, karena akan sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dalam meningkatkan IPM NTB. Menurut Nugroho (2008) bahwa rencana adalah 20 % keberhasilan, implementasi adalah 60 % dan sisanya 20 % adalah bagaimana mengendalikan implementasi.

Peranan dan kontribusi implementasi kebijakan yang sangat menentukan keberhasilan kebijakan publik, menunjukkan bahwa aspek implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat karena pada tahapan ini masalah-masalah yang tidak diperkirakan pada tahapan perumusan kebijakan, muncul dilapangan pada tahapan implementasi. George Edward III menegaskan bahwa masalah utama yang perlu diperhatikan agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

Pertama, faktor komunikasi. Faktor komunikasi menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan. Proses penyampaian informasi dilaksanakan

oleh berbagai pihak dan menggunakan berbagai macam saluran atau media.

Hasil observasi atau pengamatan lapangan ke SKPD pelaksana, SKPD pendukung dan organisasi/kelompok masyarakat sipil menunjukkan bahwa yang terlibat dalam proses penyampaian informasi sangat beragam. Hal ini menunjukkan bahwa G3A merupakan kebijakan dan program yang sangat strategis.

“Sebagai sebuah terobosan, G3A ini sangat baik. Memang, masyarakat NTB ini memerlukan gagasan dan kerja serius dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), mengingat kita ini masih jauh di bawah provinsi-provinsi lain di Indonesia. Saya anggap gerakan ini match dengan persoalan kita di NTB. Karena ini gagasan dan pekerjaan besar, maka sinergitas semua pihak perlu digalakkan. Tidak bisa hanya dilakukan oleh Gubernur dan perangkatnya saja. Harus pula digerakkan partisipasi yang massif dari semua masyarakat, termasuk masyarakat akademis, dunia usaha, Ormas, dan komunitas-komunitas. Persoalan metode dan cara implementasi disesuaikan saja dengan keadaan-keadaan di lapangan. Prinsip keberlanjutan juga harus diutamakan. Kita tidak bisa sepenuhnya berharap masalah buta aksara, putus sekolah, dan kematian ibu dan anak tuntas dalam waktu cepat, dalam waktu 1 periode jabatan gubernur. Karena itu, perlu dibangun sistem yang menjamin gerakan ini berjalan terus meskipun gubernur penggagasnya yang sekarang berakhir tugasnya” (Wawancara dengan Sekretaris Gerakan 3A, tanggal 21 Desember 2011).

Komunikasi yang dibangun dalam rangka implementasi kebijakan G3A telah berjalan baik melalui komunikasi langsung maupun tidak langsung melalui berbagai media, baik cetak, elektronik, seperti radio dan televisi. SKPD pelaksana mempunyai intensitas komunikasi yang cukup

padat dan menjangkau sasaran diseluruh wilayah NTB, sehingga telah terbentuk persepsi publik tentang G3A.

Survei kepada penerima manfaat menemukan bahwa publik tidak menghendaki kebijakan G3A dihentikan, melainkan menghendaki untuk diteruskan, disempurnakan dan ditingkatkan dengan melakukan review seperlunya.

Terbentuknya persepsi publik yang baik dan cukup baik terhadap kebijakan G3A disebabkan oleh substansi komunikasi yang jelas, dimana sasaran kinerja pembangunan pendidikan dan kesehatan yang dimuat dalam kebijakan G3A tertuang dalam *blue print* program dari masing-masing kegiatan G3A. Namun demikian ditemukan bahwa belum semua *blue print* G3A tertuang dalam suatu buku grand desain.

Program AKINO telah memiliki *grand design* yang telah dibukukan dan menjadi pedoman bagi setiap pemangku amanah yang terlibat dalam implementasi. Sedangkan program ADONO dan ABSANO belum termuat dalam suatu *blue print*, namun Dinas Dikpora telah memiliki buku program/kegiatan yang rinci sebagai penjabaran dari RPJMD.

Ustad Muharrar Iqbal, dari Pemuda Muhammadiyah Nusa Tenggara Barat dalam FGD tanggal 21 Desember 2011 menegaskan bahwa:

“Yang masih dirasakan kurang dalam proses komunikasi adalah pelibatan organisasi masyarakat sipil, seperti pondok pesantren, para tuan guru, maupun aktivis LSM. Dicontohkan ketika dulu program KB di Nusa Tenggara Barat sangat sulit diterima oleh masyarakat, maka setelah dilibatkannya masyarakat

dalam proses sosialisasinya, maka kebijakan KB diterima dan dilaksanakan masyarakat”.

Secara sederhana dengan bahasa dan pemahaman masyarakat awam, bahwa dampak dari proses komunikasi yang telah cukup efektif dilapangan adalah telah terbentuk persepsi umum masyarakat. AKINO diidentikkan dengan Posyandu; ADONO diidentikkan dengan Beasiswa Siswa Miskin (BSM) dan ABSANO diidentikkan dengan pemberantasan buta huruf (PBH). Hal ini menunjukkan bahwa proses komunikasi kepada masyarakat telah berhasil dan pesan yang sampai sangat jelas. Begitupula dengan konsistensinya juga telah berhasil dijaga sehingga secara tepat masyarakat meresponnya untuk terlibat dalam revitalisasi posyandu, pendataan siswa miskin dan penyandang buta huruf.

Kebijakan G3A telah dikomunikasikan dengan baik pada internal organisasi pelaksana, pendukung maupun kepada publik secara luas. Saluran media yang digunakan sangat beragam, baik yang bersifat modern maupun tradisional. Ada media online, media cetak, media audio visual, media elektronik (TV dan Radio) bahkan media tradisional seperti wayang kulit, juga media silaturahmi tatap muka secara langsung.

Proses komunikasi diatas menggambarkan bahwa kebijakan G3A telah melalui desiminasi yang dilakukan secara baik. Hal ini sejalan dengan pendapat Haedar Akib dalam Jurnal Administrasi Publik (2010) bahwa jaminan kelancaran implementasi kebijakan adalah diseminasi. Syarat pengelolaan diseminasi kebijakan ada empat yakni : 1) adanya respek anggota masyarakat terhadap otoritas pemerintah yang menjelaskan perlunya secara moral mematuhi kebijakan yang dibuat oleh

yang berwenang; 2) adanya kesadaran untuk menerima kebijakan; 3) keyakinan kebijakan dibuat secara sah; dan 4) pemahaman terhadap suatu kebijakan.

Respon publik dalam bentuk sikap dan tanggapan setelah dilakukan komunikasi dapat dilihat dari adanya harapan dan kritik. Secara umum harapan publik sangat konstruktif yaitu menghendaki agar G3A dapat terus dilanjutkan. Ini berarti dilihat dari aspek kebijakan, implementasi G3A sudah tepat karena publik telah berkeyakinan bahwa kebijakan G3A dapat memecahkan masalah yang dihadapi dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

Sedangkan kritik yang menonjol adalah dalam pelaksanaan kegiatan G3A masih belum dapat mewujudkan gerakan partisipasi masyarakat secara luas, bahkan kegiatan G3A masih terkesan sebagai proyek pemerintah provinsi NTB semata. Dengan demikian struktur organisasi pelaksana yang bergerak lebih dominan SKPD Pemerintah Provinsi NTB. Kalangan swasta dan masyarakat masih relatif kurang berperan dalam upaya pencapaian tujuan kebijakan G3A. Bahkan struktur pemerintah Kabupaten/Kota maupun Desa belum bersinergi dengan baik. Masih terkendala pada aspek kewenangan, pendanaan dan prioritas yang berbeda-beda. Dengan demikian dilihat dari sisi pelaksananya atau aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi G3A belum tepat, masih didominasi oleh SKPD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kondisi ini menggambarkan bahwa proses implementasi kebijakan G3A dalam peningkatan IPM Nusa Tenggara Barat masih sebatas sebagai

pelaksanaan program rutin SKPD (*doing business as usual*); belum berpola menjadi suatu gerakan masyarakat yang berbasis di pedesaan dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Artinya ciri suatu gerakan dimana peran masyarakat sipil sangat sentral belum tampak dalam implementasi kebijakan G3A. Hal ini berdampak pada target pencapaian program yang belum optimal. Oleh karena itu, sebagai suatu gerakan, semestinya G3A dilaksanakan oleh kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat.

Dalam era globalisasi sekarang ini terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik harus diperankan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat secara bersama-sama. Demikian pula dalam implementasi suatu kebijakan kerjasama ketiga pihak tersebut mutlak diperlukan sehingga dapat mencapai sesuai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

Dengan berkembangnya paradigma *governance* dalam birokrasi, pola hubungan antar sektor (*publik dan privat*) dan juga hubungan pusat dan daerah berubah menjadi lebih sejajar (*egaliter*) dan demokratis. Pada pola seperti itu, implementasi suatu kebijakan tidak lagi di dominasi oleh satu pihak pemerintah saja. Oleh karena itu proses kemitraan dan kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat harus lebih digalakkan.

Untuk mencapai kerjasama tiga pihak tersebut, implementasi kebijakan G3A dimasa depan harus perlu pelembagaan untuk menjamin keberlanjutannya. Sebab mengembangkan suatu program menjadi suatu gerakan masyarakat yang melembaga dari struktur yang paling depan hingga yang tertinggi memerlukan proses pelembagaan dengan dukungan

pihak-pihak yang berperanan dalam perumusan kebijakan seperti DPRD. Jika ini tidak dapat diwujudkan maka suatu gerakan akan mengalami kemandekan (*involusi*) karena terjebak dalam perangkap *doing business as usual* dalam birokrasi.

Inilah tantangan terbesar dalam sisa waktu implementasi kebijakan pembangunan NTB Bersaing yakni mewujudkan G3A sebagai suatu perspektif dalam setiap kegiatan yang berbasis masyarakat, baik kegiatan menurunkan angka kematian ibu, meningkatkan rata-rata lama sekolah dan menurunkan angka buta aksara ditengah-tengah masyarakat serta meningkatkan paritas daya beli masyarakat.

Dengan demikian sekarang merupakan saat yang tepat bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam implementasi G3A untuk kembali duduk bersama mengevaluasi perkembangan dan merencanakan masa depan G3A.

Program G3A harus diformat kembali proses implementasinya bukan semata menjadi program intervensi yang diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat (intervensi ke komunitas), tetapi harus menjadi kegiatan dengan komunitas atau program berbasis komunitas.

Menurut Hawe (1994) kegiatan berbasis komunitas bisa dimaknai sebagai upaya untuk melakukan perubahan dalam komunitas dengan fasilitasi pihak eksternal dan dikelola oleh komunitas itu sendiri. Sebab menurut Sadikin (2005) ciri gerakan sosial, pertama adalah salah satu bentuk perilaku atau tindakan kolektif oleh sekumpulan orang atau

kelompok. Kedua, gerakan selalu bertujuan melakukan perubahan sosial atau mempertahankan sebuah kondisi.

Kedua, faktor sumberdaya. Faktor sumberdaya meliputi sumberdaya manusia, anggaran, peralatan maupun sumberdaya informasi dan kewenangan masih sangat terbatas, sehingga menjadi penyebab kurang efektifnya implementasi G3A.

Sumberdaya manusia yang tersedia jumlahnya sangat sedikit, sehingga tidak cukup mendukung program G3A menjadi suatu gerakan seperti yang direncanakan. Menurut Nurhayati (2001) peran sumberdaya manusia dalam implementasi kebijakan antara lain mengidentifikasi bidang-bidang sumberdaya manusia yang tumbuh lebih kuat atau lebih lemah, serta untuk mengevaluasi kinerja sumberdaya manusia saat ini. Peran baru sumberdaya manusia akan lebih banyak memberikan nilai tambah bagi organisasi agar lebih efektif dan kompetitif melalui meningkatnya produktivitas serta komitmen.

Demikian pula sumberdaya anggaran, terutama biaya operasional dalam rangka penyaluran, monitoring dan evaluasi untuk program tidak tersedia. Begitula dengan sarana dan perlengkapan dirasakan sangat terbatas. Sumberdaya informasi sebagai basis data dalam menetapkan kelompok sasaran penerima manfaat program G3A belum handal dan akurat.

Dampak dari kekurangan sumberdaya manusia, anggaran, peralatan dan informasi tersebut, maka percepatan peningkatan IPM NTB

belum dapat diwujudkan secara optimal. Apalagi wilayah kerja dan lokasi mencakup wilayah seluruh kabupaten/kota se NTB.

Sasaran kebijakan G3A yang sangat luas, tersebar di seluruh kabupaten/kota se-NTB memerlukan sumberdaya manusia, anggaran dan perlengkapan yang besar. Keterbatasan sumberdaya ini menyebabkan kebijakan G3A menghadapi hambatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara operasional berbagai program/kegiatan G3A telah berjalan dengan baik dari tahun ke tahun, namun hasilnya belum cukup efektif dalam merubah posisi IPM NTB. Dengan demikian, implementasi G3A selama tiga tahun terakhir di NTB belum tepat target.

Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi NTB menyatakan:

“ Posisi IPM NTB sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 masih berada pada posisi ke 32 dari 33 provinsi di Indonesia.” (Harian Suara NTB, 9/4/2011).

Fakta ini mengisyaratkan bahwa faktor alokasi anggaran, SDM dan peralatan dalam upaya percepatan peningkatan IPM NTB melalui G3A harus mendapat perhatian. Hal ini memerlukan peran lingkungan internal kebijakan, seperti interaksi antara para perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Juga peran lingkungan eksternal kebijakan, seperti *publik opinion* yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan G3A serta *interpretive institutions* yang berkenaan dengan interpretasi lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat seperti media massa, kelompok penekan dan kelompok kepentingan yang menginterpretasikan kebijakan dan implementasi G3A. Selain itu juga *individuals*, yakni individu-individu tertentu yang mampu

memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi G3A. Oleh karena itu, faktor lingkungan internal dan eksternal kebijakan G3A harus diidentifikasi secara tepat untuk membantu mengatasi keterbatasan sumberdaya yang dihadapi pada tahapan implementasi G3A. Hal ini sejalan dengan pendapat Ripley dan Franklin (1986) bahwa dalam perspektif kepatuhan mengakui adanya faktor eksternal organisasi yang juga mempengaruhi kinerja agen *administrative*. Berdasarkan pendekatan kepatuhan dapat dinyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh kemampuan implementor, yaitu : 1) kepatuhan implementor mengikuti apa yang diperintahkan oleh atasan, dan 2) kemampuan implementor melakukan apa yang dianggap tepat sebagai keputusan pribadi dalam menghadapi pengaruh eksternal dan faktor non organisasional.

Dalam hubungan dengan kepatuhan tersebut, suatu gerakan sosial akan naik turun, bertumbuh atau melemah seiring dengan fluktuasi sumberdaya. Gerakan sosial diyakini lebih mungkin berhasil jika dimulai dengan sumberdaya finansial yang besar, serta menerapkan strategi yang menghubungkan mereka dengan para pendukung dan sumberdaya lain jika mereka ingin mencapai tujuan (Swaminathan dan Wade, 2000).

Ketiga, faktor disposisi. Faktor disposisi baik dari kalangan Pemerintah Provinsi NTB maupun masyarakat sama-sama kuat dan juga sama-sama mengharapkan agar G3A menjadi suatu gerakan masyarakat. Disposisi yang demikian kuat ini menunjukkan bahwa kebijakan implementasi G3A telah mendapatkan dukungan masyarakat NTB. Oleh

karena itu semua pihak yang terkait dengan program G3A ini mengharapkan terbitnya suatu kebijakan pemerintah daerah Provinsi NTB dalam bentuk peraturan daerah yang dapat mengikat semua masyarakat di setiap Kabupaten/Kota se-NTB untuk mengimplementasikan G3A ini.

Dalam implementasi suatu kebijakan, ketersediaan sumberdaya saja tidak cukup, tanpa didukung disposisi yang meliputi kesediaan dan komitmen para implemetor untuk melaksanakan kebijakan.

Disposisi merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan dari para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh. Sikap dari para pelaku (*implementors*) diwujudkan melalui pemahaman terhadap maksud dan tujuan kebijakan, motivasi, kemauan yang kuat untuk mencapai target yang ditetapkan. Edward III & Van Matter dan Horn menegaskan disposisi pada pelaksana kebijakan akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan kebijakan. Dalam disposisi terdapat bebarapa unsur yaitu, *cognitif*, *understanding*, sikap menerima, menolak atau netral.

Disiposisi para pihak yang terlibat dalam implementasi G3A baik dari kalangan pemerintah, swasta dan masyarakat sangat tinggi. Oleh karena itu dalam hal ini penting diperkuat kerjasama semua stakeholders yang terlibat dalam implementasi G3A. Sebab menurut Akib (2010) keberhasilan suatu program sangat dipengaruhi oleh tiga hal yaitu program itu sendiri, organisasi pelaksana dan kelompok sasaran atau pengguna.

Kerjasama SKPD Pemerintah Provinsi NTB dengan swasta dan masyarakat dalam implementasi G3A masih kelihatannya belum optimal. Perlu diperkuat dengan suatu kebijakan yang dapat mendorong peran semua pihak secara maksimal. Usulan adanya suatu Peraturan Daerah tentang Percepatan Peningkatan IPM NTB melalui G3A seperti yang berkembang selama FGD dapat menjadi solusi dalam memperkuat kesediaan dan komitmen semua pihak dalam implementasi G3A.

Sebab masalah rendahnya IPM di NTB tidak hanya menjadi masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi NTB, melainkan juga oleh Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB. Perubahan perilaku masyarakat juga sangat menentukan dalam peningkatan IPM. Demikian pula keikutsertaan pihak swasta juga sangat penting. Hal ini relevan dengan pendapat David C. Korten (1980) yang mengembangkan model kesesuaian implementasi kebijakan menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. Pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Kedua, kesesuaian antara organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang dipersyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program.

Adanya suatu peraturan daerah yang memperkuat implementasi G3A merupakan salah satu bentuk dukungan politik. Hal ini penting sekali karena dukungan politik yang memadai akan membawa implikasi pada penyediaan sumberdaya yang menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Dalam hubungan ini maka model implementasi kebijakan G3A akan lebih efektif jika menerapkan model implementasi secara politik yakni implementasi yang dipaksakan secara politik karena walaupun ambiguitasnya rendah, tetapi tingkat konfliknya tinggi.

Dengan dukungan politik tersebut proses pelembagaan program G3A sebagai suatu gerakan sosial akan terwujud. Tahapan pelembagaan merupakan tahap akhir dalam proses pembentukan suatu gerakan sosial, sebagaimana dijelaskan oleh Herbert Blumer bahwa ada empat tahap gerakan sosial, yaitu ketidakpuasan sosial (*social ferment*), antusiasme orang banyak (*popular excitement*), formalisasi (*formalization*) dan pelembagaan (*institutionalization*).

Keempat, faktor struktur birokrasi. Faktor struktur birokrasi belum cukup efektif bekerja ditingkat lapangan dalam implementasi G3A. Fokus area belum terpetakan dengan baik, sehingga sasaran penerima manfaat juga belum tepat. Juga koordinasi dan pengendalian sangat lemah.

Pola kerja birokrasi dalam implementasi G3A masih sektoral, bahkan pada tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB belum ada keselarasan dalam implementasi G3A dengan Pemerintah Provinsi NTB.

Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Dilihat dari struktur dan sistem pengorganisasian dalam implementasi G3A telah dilakukan pembagian tugas dengan jelas. Namun yang tampak lemah adalah pada pelaksanaan pengendalian sehingga koordinasi dan kerjasama diantara para implementor masih belum berjalan baik. Oleh karena itu dilihat dari sisi dukungan strategik dan dukungan teknis dalam implementasi G3A masih sangat lemah.

Dukungan strategik dari SKPD pelaksana maupun SKPD pendukung dalam implementasi G3A belum sinergis, bahkan berjalan masing-masing. Proses pengendalian untuk mengarahkannya masih sulit dilaksanakan karena sistem penanggangan dalam pelaksanaan kegiatan mengacu pada target masing-masing SKPD. Belum ada upaya menjadikan peningkatan IPM sebagai target bersama secara strategis tertuang dalam program/kegiatan yang terpadu. Dengan demikian masih banyak terjadi program/kegiatan tidak tepat sasaran.

Selanjutnya dukungan teknis dilapangan oleh Tim G3A juga masih kurang memadai karena faktor sarana dan prasarana yang terbatas. Sekretariat G3A yang diharapkan optimal untuk melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka mewujudkan G3A menjadi suatu gerakan perubahan sosial belum dapat diperankan. Koordinasi dan evaluasi oleh Sekretariat G3A yang pada awalnya dimotori oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pendidikan dan Kesehatan semakin lemah setelah dilakukan mutasi menjadi Kepala badan BPMPD. Bahkan tugas Sekretariat G3A

ikut diintegrasikan dalam tugas-tugas BPMPD. Dalam kaitan ini untuk mengefektifkan implementasi G3A ke depan perlu dicegah timbulnya *bureaucratic fragmentation* dalam implementasi G3A di Nusa Tenggara Barat.

Sebab menurut Edwards (1980), Fragmentasi organisasional dalam struktur birokrasi dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Dalam implementasi kebijakan G3A dilihat dari sisi struktur organisasi pelaksanaannya, fragmentasi organisasi untuk pembagian tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas tidak dapat dihindari karena luasnya cakupan program/kegiatan. Akibatnya aktor yang terlibat tentu semakin banyak, menyebabkan probabilitas keberhasilan implementasi menjadi berkurang karena pengambilan keputusan saling bergantung diantara para aktornya serta koordinasi kebijakan menjadi semakin sulit.

Untuk mengatasi kesulitan koordinasi dalam suatu organisasi yang telah terfragmentasi, maka fungsi pusat pengendalian yang berperan sebagai suatu pusat pengambilan keputusan harus dapat dioptimalkan. Dalam hal ini, Tim Sekretariat G3A sebagai unit manajemen yang membantu Sekretaris Daerah, Gubernur/ Wakil Gubernur dalam memastikan implementasi kebijakan G3A berjalan efektif harus menata sistem dan prosedur, maupun jadwal koordinasinya dengan SKPD Pelaksana dan unit-unit pendukung G3A. Semua unsur yang terlibat dalam struktur organisasi pelaksanaan G3A harus solid koordinasi dan kerjasama.

Perlunya sekretariat Tim G3A menyusun SOP dalam pelaksanaan pengendalian dan kerjasama implementasi G3A dengan semua stakeholders, karena kurangnya sumberdaya. Menurut Edwards (1980), SOP dapat menghemat waktu dan memungkinkan untuk mengambil jalan pintas dalam pengambilan keputusan harian. Mereka juga memberikan keseragaman di dalam berbagai tindakan para pejabat di dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, yang pada gilirannya bisa menghasilkan fleksibilitas yang lebih besar.

Pola pengorganisasian tersebut sejalan dengan perspektif proses dan perspektif hasil yang dikembangkan oleh Ripley dan Frangklin (1986) dalam Akib (2010) yang memperkenalkan pendekatan kepatuhan dan pendekatan faktual. Pada pendekatan perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain tatacara atau prosedur pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan pada perspektif hasil, program dinilai berhasil manakala programnya membawa dampak seperti yang diinginkan.

Penataan struktur birokrasi dalam mewujudkan suatu gerakan masyarakat dimaksudkan untuk memperkuat proses pelembagaannya, dimana menurut Blumer pada tahapan ini berlangsung proses formalisasi dimana tingkat pengorganisasian dan strategi koalisi gerakan telah semakin mapan. Pada tahapan ini suatu gerakan seperti program G3A

harus bersandar pada staf-staf yang terlatih menjalankan fungsi organisasi.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan G3A

Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTB untuk mendongkrak angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui G3A harus dijadikan gerakan publik atau gerakan bersama agar publik turut berkontribusi.

“Jadikan hal ini sebagai isu bersama yang harus kita tangani bersama sehingga program G3A tidak dipersepsi sebagai program Pemerintah Provinsi NTB semata”
(Wawancara Gubernur NTB Tanggal 21 Desember 2011).

Program peningkatan IPM NTB harus terus di genjot, karena IPM juga berarti membangun kualitas lingkungan hidup, lingkungan sosial, dan sumber daya manusia yang lebih baik. Menurut definisi yang dipakai United Nations Development Program (UNDP) IPM merupakan indikator untuk mengukur tingkat pembangunan manusia di suatu wilayah atau negara. Ada tiga bidang yang menjadi konsentrasi IPM adalah Pendidikan, Kesehatan dan Daya Beli. Oleh karena itu Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tidak hanya tergantung pada sektor ekonomi tetapi harus selalu dibarengi dan sejalan dengan program lain, terutama dibidang pendidikan dan kesehatan.

Faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan G3A dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, faktor pendukung. Kesiapan perguruan tinggi, organisasi dan tokoh-tokoh masyarakat dalam mendukung implementasi G3A menunjukkan bahwa kebijakan G3A sudah diterima oleh masyarakat secara luas di NTB. Dengan demikian pada masa yang akan datang untuk mengefektifkan implementasi G3A perlu peningkatan kapasitas dan peran serta masyarakat. Ini berarti implementasi kebijakan G3A harus lebih banyak didasarkan pada inisiasi, kreasi dan penyesuaian oleh implementor pada tingkat bawah, sehingga implementasinya bersifat *bottom up* sesuai dengan pendapat Sabatier (1986) bahwa implementasi kebijakan dapat ditunjukkan dalam model desentralistik.

Peran serta tokoh-tokoh dan lembaga-lembaga yang mengakar ditengah-tengah masyarakat, seperti para tuan guru dan pondok pesantren perlu dioptimalkan untuk mendukung G3A sebagai suatu gerakan perubahan sosial di Nusa Tenggara Barat. Selain dapat mendorong swadaya masyarakat untuk mengatasi terbatasnya sumberdaya anggaran maupun sumberdaya manusia, para tuan guru melalui pondok pesantrennya dapat mengakselerasi perubahan perilaku masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam implementasi G3A. Hal ini karena para tuan guru merupakan pemimpin informal yang menjadi panutan dan didengar segala arahan dan petunjuknya oleh masyarakat.

Kedua, faktor penghambat. Faktor penghambat yang dirasakan adalah belum ada perubahan perilaku yang mendasar dari aparaturnya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Juga belum ada fokus area dalam mengintervensi masalah yang terkait dengan G3A.

Untuk itu reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat perlu diwujudkan. Sebab dalam era otonomi daerah saat ini, kultur birokrasi yang suka melayani sangat dibutuhkan karena semangat otonomi dihajatkan untuk percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan membangun tata kehidupan bangsa yang semakin demokratis. Dalam kaitan ini birokrasi pemerintah provinsi NTB kedepan harus diarahkan menjadi institusi yang menjadi inovator solusi atas problem yang dihadapi masyarakat NTB.

Hal ini sejalan dengan model interaktif dalam implementasi kebijakan yang menganggap bahwa pelaksanaan kebijakan sebagai proses dinamis, karena pihak yang terlibat dapat mengusulkan perubahan dalam berbagai tahap pelaksanaan. Hal ini dilakukan ketika kebijakan publik dianggap kurang memenuhi harapan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Ini berarti bahwa berbagai tahap implementasi kebijakan public akan dianalisis dan dievaluasi oleh setiap pihak sehingga potensi, kekuatan dan kelemahan pada setiap fase pelaksanaannya dapat diketahui dan segera diperbaiki (Akib, 2010).

Selain itu pola koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian implementasi G3A baik oleh SKPD pelaksana maupun SKPD pendukung dapat berjalan secara optimal dan efektif. Untuk itu jadwal rapat koordinasi, kegiatan monitoring dan evaluasi harus dijalankan secara konsisten. Oleh karena itu peran sekretariat Tim G3A perlu direvitalisasi sebagai suatu pusat pengendalian operasional implementasi G3A dan

didukung dengan berbagai fasilitas, sumberdaya dan kewenangan dalam mengefektifkan proses implementasi G3A di lapangan.

3. Dampak Implementasi Kebijakan G3A Terhadap IPM

Perkembangan IPM NTB setelah dilaksanakan G3A merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat dampak implementasi kebijakan G3A. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan IPM NTB selama tahun 2008-2010 dibandingkan dengan kondisi sebelum dilaksanakan G3A. Data yang digunakan adalah perkembangan IPM NTB dari tahun 2008 – 2010.

“Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, MA mengajak Wali Kota dan Bupati se-NTB untuk memprioritaskan penanganan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB yang saat ini masih berada di urutan kedua terbawah nasional. Penanganan IPM NTB secara serius dapat berupa keberpihakan kebijakan dan anggaran dari pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota. Hal itu dapat dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2012 mendatang. Pemprov NTB sendiri telah menemukan apa penyebab IPM NTB rendah, yakni di sektor pendidikan dan kesehatan.” (Harian Suara NTB, 9/4/2011).

Hasil wawancara dengan narasumber di Sekretariat G3A menunjukkan sejumlah hambatan dan tantangan dalam implementasi G3A, yaitu terkait dengan data dan implementasi kebijakan, yaitu:

“Berkaitan dengan data masih belum akurat, belum ada koordinasi validasi data. Gerakan 3A juga masih sebatas proyek, kurang kreatif; belum banyak melibatkan aktor lain (FKSPP, OMS dan sebagainya)” (Wawancara dengan narasumber di Sekretaris Gerakan 3A, tanggal 21 Desember 2011).

Berkaitan dengan data dan kebijakan G3A, muncul harapan dan rekomendasi dalam FGD yang dilaksanakan tanggal 23 Desember 2011, yaitu:

“Direkomendasikan agar G3A ke depan masih harus dilanjutkan untuk peningkatan IPM NTB; Perbaikan sistem dan mekanisme monev harus cepat dilakukan; Terobosan kreatif untuk mendorong dan memperluas partisipasi publik diperlukan untuk memastikan G3A benar-benar menjadi gerakan.” (Rekomendasi hasil FGD tanggal 23 desember 2011).

Walaupun demikian, secara umum pembangunan manusia di NTB selama periode 2008 – 2010 mengalami peningkatan. Nilai IPM NTB pada tahun 2008 mencapai 64,12 meningkat menjadi 64,66 pada tahun 2009 dan pada tahun 2010 menjadi 65,20. Peningkatan selama tahun 2007 ke 2008 sebesar 0,41 point; periode 2008-2009 sekitar 0,44 point; sedangkan peningkatan periode 2009-2010 sekitar 0,54 point. Trend kenaikan ini menunjukkan bahwa adanya dampak implementasi kebijakan G3A terhadap IPM NTB sangat signifikan.

“Salah satu langkah terobosan yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTB dalam upaya meningkatkan IPM adalah dengan G3A (Akino; Angka Kematian Ibu Nol, Absano-Angka Buta Aksara Nol, dan Adono-Angka Drop Out Nol). Hal ini dilakukan Pemerintah Provinsi NTB sebagai sebuah ikhtiar dalam meningkatkan derajat hidup masyarakat NTB. Bagaimana tidak, permasalahan yang dihadapi pemerintah provinsi ini khususnya dalam bidang pendidikan dan yang berdampak langsung pada rendahnya IPM adalah masih tingginya angka buta aksara dan angka putus sekolah atau drop out.”(Berita NTB, Senin, 03 Oktober 2011)

Perkembangan IPM NTB diatas menunjukkan adanya peningkatan capaian IPM seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian daerah.

Ada beberapa indikasi yang memperkuat semakin membaiknya kondisi perekonomian NTB yakni menurunnya jumlah penduduk miskin dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi NTB selama periode 2009-2010.

Pola perkembangan IPM NTB selama periode 2008-2010 dilihat dari reduksi shortfaall, yakni jarak nilai IPM terhadap nilai idealnya 100, semakin meningkat. Pada tahun 2008 angka reduksi shortfall mencapai 1,14 meningkat menjadi 1,5 pada tahun 2009 dan 1,53 pada tahun 2010. Hal ini berarti kualitas penduduk NTB sejak tahun 2008-2010 mengalami perbaikan dan pergerakannya semakin meningkat. Dengan demikian secara faktual bahwa kinerja pemerintah daerah Provinsi NTB dalam peningkatan IPM sejak tahun 2008 sampai dengan 2010 setelah dilaksanakannya G3A terus menunjukkan peningkatan.

Peningkatan indeks komposit IPM NTB dalam tiga tahun terakhir diyakini sebagai dampak dari G3A yang secara langsung melakukan intervensi terhadap faktor-faktor yang menentukan IPM, seperti program pendidikan dan kesehatan.

Program pendidikan dan kesehatan ini mendapat perhatian yang besar di NTB termasuk seluruh Kabupaten/Kota, bahkan antara Pemerintah Provinsi NTB dengan Kabupaten/Kota mengalokasikan cost sharing dalam menyediakan pembiayaan terhadap kedua program ini. Namun demikian masih terkendala pada tidak adanya kesatuan perencanaan. Akibatnya program yang dilaksanakan tidak terpadu dan sinergis yang pada akhirnya belum dapat memperbaiki posisi ranking IPM NTB.

Menurut Manggaukang (2012) dalam upaya meningkatkan IPM NTB yang diperlukan sesungguhnya adalah kemitraaan (*partnership*), koordinasi sosial (*social coordination*) dan dialog (*dialogue*). Dalam kaitan ini, penguatan program G3A sebagai suatu gerakan akan dapat dioptimalkan melalui kemitraan, koordinasi sosial dan dialog dengan semua semua pihak yang terkait. Ketergantungan harus diarahkan pada kemampuan masyarakat mandiri, karena kompleksnya masalah pembangunan manusia, termasuk didalamnya IPM. Koordinasi social (*Social Coordination*) semakin dibutuhkan untuk mengatasinya. Sebab tidak ada satupun pelaku, termasuk Pemerintah dapat menyelesaikannya sendiri. Diperlukan kerjasama antar pelaku untuk menyelesaikan masalah. Disamping itu, masyarakat dan Pemerintah di daerah (Kabupaten/Kota) lebih memahami permasalahan sosial lokal dan dalam kenyataannya semakin mampu untuk mengatasinya sendiri. Apalagi dengan kerumitan masalah pemerintahan yang menuntut penanganan komprehensif dan terpadu diantara sektor swasta dan publik, antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Provinsi, dibutuhkan adanya dialog antara semua komponen yang ada di daerah.

Pola komunikasi, koordinasi dan dialog terus diperkuat oleh Gubernur NTB untuk meningkatkan IPM dengan meningkatkan koordinasi dan sinergitas melalui kunjungan kerja, sillaturahmi dan dialog secara rutin setiap triwulan ke seluruh Kabupaten/Kota.

Gubernur NTB DR. TGH.Muhammad Zainul Majdi menegaskan:

“Seluruh kebijakan yang diambil Pemerintah Daerah harus mencerminkan kepentingan masyarakat dan

dilakukan secara teliti dengan mempelajari segala kemungkinan yang bakal terjadi" (Buletin NTB Bersaing Edisi I Januari 2012)

Strategi peningkatan IPM NTB membutuhkan keterlibatan berbagai *stakeholder*. Sebagai indeks komposit, IPM terdiri atas sejumlah dimensi dan indikator, dan sebagian dari dimensi dan indikator tersebut bersifat *outcomes based*. Dengan kata lain, perbaikan dimensi dan indikator tersebut tidak mungkin bisa dicapai dengan program tunggal dan juga aktor tunggal pemerintah. Implikasinya, di masa depan, perlu dibangun dan dikembangkan sinergitas antar level pemerintahan dan antar SKPD serta kolaborasi antar pelaku/aktor pembangunan.

Untuk memperkuat keyakinan akan adanya pengaruh dari implementasi kebijakan G3A terhadap IPM perlu ditelusuri dari perubahan-perubahan variabelnya, seperti angka harapan hidup, Rata-rata lama sekolah dan Paritas Dayabeli.

Pertama, Indek Harapan Hidup (IHH). Indeks harapan hidup menunjukkan jumlah tahun hidup yang diharapkan dapat dinikmati penduduk suatu wilayah. Indikator yang sering digunakan adalah angka harapan hidup (AHH) yang dapat menggambarkan perubahan kualitas atau derajat kesehatan masyarakat. Sebab indikator ini telah memuat hampir seluruh indikator kesehatan baik secara kualitas maupun kuantitas.

Data BPS menyajikan bahwa pada periode 2007 – 2008 angka harapan hidup manusia di NTB berkembang dari 61,20 tahun menjadi 60,50 tahun. Selanjutnya pada tahun 2009 meningkat menjadi 61,80 tahun

dan 62,11 tahun pada tahun 2010. Shortfaal indeks angka harapan hidup Provinsi NTB mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Pada tahun 2008 1,26 meningkat menjadi 1,28 pada tahun 2009 dan 1,34 pada tahun 2010.

“Di sektor kesehatan, terdapat tiga penyakit yang menyebabkan IPM NTB rendah, yakni tingginya kematian ibu, kematian bayi dan rendahnya Angka Harapan Hidup (AHH). Dalam menanggulangnya, Pemprov NTB mengalokasikan dana lebih dari 10 persen dari total APBD NTB. Dari segi kebijakan telah dikeluarkan program Angka Kematian Ibu dan Bayi Nol (AKINO)”.(Harian Suara NTB, 9/4/2011).

Dalam tiga tahun terakhir peningkatan AHH manusia NTB terus mengalami peningkatan, sehingga dapat diprediksi bahwa ini juga sebagai dampak dari implementasi kebijakan G3A.

“Tingginya angka kematian ibu melahirkan di NTB membuat Pemerintah Provinsi NTB gencar melaksanakan program G3A yakni, Akino. Selama ini NTB selalu menempati urutan di atas rata-rata nasional dalam bidang tersebut. Artinya angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi di NTB, masih cukup tinggi. Namun, data kematian ibu tersebut, kini dari tahun ke tahun dalam rentang tiga tahun pasangan BARU memimpin NTB, menunjukkan kecenderungan menurun. Tahun 2009 di masa awal kepemimpinannya angka kematian ibu tercatat 121 orang. Dengan diluncurkannya program G3A, khususnya Akino tahun berikutnya atau tahun 2010, angka kematian ibu menunjukkan penurunan, meskipun penurunan itu tidak signifikan. Tahun 2010 angka kematian ibu 113 orang dan data hingga bulan Juni 2011 tercatat sudah 72 ibu meninggal karena melahirkan.”(Berita NTB, Senin, 03 Oktober 2011)

Meningkatkan angka harapan hidup merupakan upaya yang paling sulit dari seluruh dimensi IPM. Peningkatan angka harapan hidup dipengaruhi oleh begitu banyak faktor yang saling berinteraksi satu sama lain. Sejumlah faktor yang diidentifikasi berkontribusi terhadap

peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya, antara lain, membaiknya perawatan kesehatan, meningkatnya akses penduduk terhadap pelayanan kesehatan, tersedianya sarana dan prasarana kesehatan secara luas dan merata, membaiknya pemahaman dan kemampuan memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, membaiknya kualitas dan sanitasi lingkungan, meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan, dan meningkatnya daya beli masyarakat.

Kedua, Angka Melek Huruf dan rata-rata lama sekolah.

Perhitungan indeks pendidikan mencakup dua indikator yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Angka melek huruf adalah kemampuan membaca dan menulis, sedangkan rata-rata lama sekolah dihitung berdasarkan konversi dari lama pendidikan yang ditamatkan.

Angka melek huruf pada tahun 2007 mencapai 80,10 persen meningkat menjadi 80,13 persen pada tahun 2008 dan meningkat lagi menjadi 80,18 persen pada tahun 2009. Selanjutnya pada tahun 2010 angka melek huruf naik menjadi 81,05 persen. Adapun angka rata-rata lama sekolah di NTB juga terus mengalami peningkatan. Semula mencapai 6,70 pada tahun 2007 dan 2008; meningkat menjadi 6,73 tahun pada tahun 2009; dan pada tahun 2010 naik menjadi 6,77.

“Akselerasi pemuntasan buta aksara yang dicanangkan Pemerintah Provinsi NTB sebagai salah satu gerakan untuk meningkatkan dan mengefektifkan kegiatan pemberantasan buta aksara dimaksudkan untuk mencapai target Absano. Program Adono berhasil menurunkan angka drop out dan buta aksara di NTB. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB, H.L Syafii mengungkapkan, dana

yang sudah dikeluarkan untuk menekan angka putus sekolah, cukup besar. Tahun 2011 jumlah dana yang disiapkan pemerintah daerah Rp 161 miliar lebih, tahun ini disiapkan Rp 55 miliar. Tambahan dana APBN 32 miliar dan dana dari APBN Diknas Rp 44 miliar, sementara untuk Absano Rp 100 miliar.”(Berita NTB, Senin, 03 Oktober 2011)

Data kenaikan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah menggambarkan kinerja program G3A untuk mengurangi angka buta huruf dan meningkatkan partisipasi sekolah di NTB sudah mengalami kemajuan. Shortfall yang menunjukkan kecepatan peningkatan indeks angka melek huruf selama tiga tahun terakhir meningkat sangat berarti. Pada tahun 2008 mencapai 1,26 meningkat menjadi 1,28 pada tahun 2009 dan 1,34 tahun 2010. Demikian pula shortfall rata-rata lama sekolah juga mengalami peningkatan, dari 0,0 pada tahun 2008 menjadi 03,6 pada tahun 2009 dan 0,48 tahun 2010.

Peningkatan angka melek huruf harus dijadikan sebagai fokus dan orientasi kebijakan. Sebab dimensi ini relatif jauh lebih mudah ditangani atau diintervensi ketimbang dimensi lainnya, karena dimensi ini berbasis keluaran (*output based*).

Angka melek huruf yang relatif rendah juga memberi ruang intervensi yang lebih longgar. Selain itu, penyebaran penduduk yang tidak melek huruf (buta huruf) tampaknya sudah teridentifikasi hingga level desa/kelurahan sehingga memudahkan untuk melakukan intervensi.

Adapun ikhtiar meningkatkan angka rata-rata lama sekolah relatif lebih sulit dibandingkan dengan meningkatkan angka melek huruf karena berbasis pada hasil (*outcomes based*). Dengan kata lain, keberhasilan

pencapaian rata-rata lama sekolah ditentukan oleh beragam faktor, yang seringkali berada diluar kendali pemerintah. Namun demikian, meningkatkan angka rata-rata lama masih relatif lebih mudah ketimbang meningkatkan angka harapan hidup dan pengeluaran rata-rata per kapita.

Upaya memperbaiki dimensi dan indikator pendidikan menjadi tampak lebih mudah karena kebijakan pembangunan daerah NTB dewasa ini telah menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas utama. Menyertai kebijakan tersebut, alokasi anggaran untuk sektor pendidikan, bukan hanya memiliki porsi yang cukup signifikan dalam struktur APBD, tetapi juga memperlihatkan kecenderungan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Anggaran yang bersumber dari APBN, untuk membiayai sektor pendidikan di NTB, juga menunjukkan angka yang relatif cukup besar dengan *trend* yang meningkat dari tahun ke tahun.

Dalam jangka pendek, strategi peningkatan IPM NTB harus bertumpu dan berfokus pada dimensi pendidikan, terutama memperbaiki angka melek huruf dan meningkatkan angka rata-rata lama sekolah. Kedua indikator tersebut harus diupayakan bergerak secara akseleratif.

Untuk memperbaiki indikator rata-rata lama sekolah, sedikitnya ada lima perspektif yang harus dikembangkan untuk mendesain strategi intervensi, yaitu: (1) bagaimana memastikan bahwa anak-anak yang sementara duduk di bangku sekolah tetap bisa bersekolah; (2) bagaimana menarik anak-anak yang putus sekolah untuk kembali duduk di bangku sekolah; (3) bagaimana "memaksa" anak-anak yang terpaksa bekerja - karena alasan ekonomi keluarga - untuk berhenti bekerja dan kembali ke

bangku sekolah; (4) bagaimana agar layanan pendidikan benar-benar sanggup menjangkau seluruh anak usia sekolah, termasuk yang berada di wilayah terpencil dan terisolir sekalipun; dan (5) bagaimana melahirkan kesadaran kolektif di kalangan masyarakat tentang pentingnya pendidikan, terutama pendidikan lanjutan (Agussalim, 2011).

Selanjutnya untuk meningkatkan indikator angka melek huruf, perspektif harus diarahkan pada: (1) bagaimana mendorong orang-orang yang buta huruf agar termotivasi untuk belajar menulis dan membaca; (2) merubah bentuk fasilitasi dari suasana “kelas” yang cenderung formal menjadi hubungan personal yang bersifat informal dan interaktif; (3) “merawat” kemampuan baca-tulis orang yang sudah melek huruf yang sebelumnya buta huruf; (4) mendorong keterlibatan berbagai elemen masyarakat untuk terlibat dalam upaya pemberantasan buta huruf; dan (5) menjadikan pemberantasan buta huruf sebagai sebuah “gerakan” yang berbasis desa/kelurahan dengan model intervensi *by name by address* (Agussalim, 2011).

Pada tingkatan strategi, sedikitnya ada lima strategi yang dapat dikembangkan, antara lain; (1) melakukan pemetaan jumlah penyandang buta aksara secara tepat dan akurat; (2) memperluas informasi dan sosialisasi tentang pentingnya melek huruf; (3) memberdayakan sekolah non-formal melalui kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM); (4) mengembangkan program pendidikan membaca secara inovatif melalui kegiatan di luar sekolah; dan (5) menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, LSM dan lembaga-lembaga

internasional. Pada tingkatan lokus, upaya pemberantasan buta huruf harus diarahkan pada daerah-daerah dengan tingkat angka melek huruf yang rendah (Agussalim, 2011).

Ketiga, Paritas Daya Beli. Untuk mengukur dimensi standar hidup layak (dayabeli) penduduk antar provinsi, BPS menggunakan rata-rata konsumsi 27 komoditi terpilih dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dianggap paling dominan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan telah distandarkan agar bisa dibandingkan antar daerah dan antar waktu yang disesuaikan dengan indeks dayabeli.

Daya beli adalah kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya untuk barang dan jasa. Kemampuan ini sangat dipengaruhi oleh harga-harga riil antar wilayah karena nilai tukar yang dipergunakan dapat menurunkan atau menaikkan nilai dayabeli. Dengan demikian kemampuan daya beli masyarakat antar satu wilayah dengan wilayah lain berbeda.

Perkembangan daya beli masyarakat NTB terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2007 daya beli masyarakat NTB mencapai Rp. 630,48 ribu; meningkat menjadi Rp. 633,58 ribu pada tahun 2008 dan meningkat lagi menjadi Rp. 637,98 ribu pada tahun 2009. Selanjutnya pada tahun 2010 naik lagi menjadi Rp. 639,89. Hal ini menggambarkan adanya perbaikan ekonomi NTB selama tiga tahun terakhir. Namun karena kondisi ekonomi sangat fluktuatif akibat inflasi dan perkembangan harga bahan pokok yang sangat dinamis, maka shortfall indeks daya belimasyarakat NTB juga sangat fluktuatif. Pada tahun 2008 mencapai

1,91 meningkat menjadi 2,76 pada tahun 2009 kemudian kembali menurun menjadi 1,23 pada tahun 2010.

Dalam jangka menengah dan panjang, strategi utama untuk meningkatkan pendapatan atau pengeluaran per kapita harus difokuskan pada dua aspek utama, yaitu: *pertama*, menjaga dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi NTB harus dijaga agar tetap berada di atas angka pertumbuhan ekonomi Nasional. Sediktnya ada tiga agenda utama untuk mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi NTB, yaitu: (1) meningkatkan arus investasi, baik asing maupun domestik, melalui implementasi berbagai kebijakan seperti promosi investasi, pengembangan kemitraan, insentif fiskal, reformasi birokrasi.; (2) meningkatkan belanja pemerintah pada sektor infrastruktur, terutama yang menunjang aktivitas perekonomian, seperti jalan, pelabuhan, pergudangan, irigasi; (3) memberi perhatian terhadap sektor-sektor ekonomi yang memiliki elastisitas tinggi bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan kesempatan kerja, seperti sektor industri manufaktur, pertambangan.

Kedua, mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk NTB harus ditekan sedemikian rupa sehingga berada di bawah satu persen per tahun. Ini diperlukan agar pertumbuhan ekonomi dapat memberi dampak yang lebih berarti bagi perbaikan taraf hidup masyarakat yang diindikasikan oleh peningkatan pendapatan atau pengeluaran per kapita.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan temuan dan pembahasannya, dan sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian, dapat dikemukakan simpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan G3A di NTB telah diimplementasikan dengan berhasil dan dapat meningkatkan IPM. Implementasi Kebijakan G3A masih menghadapi *implementation lag*, yakni ada kesenjangan waktu dalam penerimaannya sebagai suatu gerakan perubahan sosial masyarakat. Target kinerja Implementasi kebijakan G3A di NTB perlu dilakukan review karena realisasinya masih jauh dari harapan yang ditetapkan untuk mencapai posisi papan tengah.
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan G3A dalam meningkatkan IPM di Provinsi NTB, yaitu:
 - a. Faktor komunikasi menjadi faktor pendukung utama dalam proses implementasi Kebijakan G3A di NTB.
 - b. Faktor disposisi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota serta masyarakat NTB mewujudkan kebijakan G3A sebagai gerakan perubahan sosial masyarakat yang partisipatif dan berbasis dipedesaan merupakan faktor pendukung yang sangat kuat dalam ikhtiar percepatan peningkatan IPM NTB.

- c. Faktor sumberdaya yang masih sangat terbatas dan struktur birokrasi yang belum dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan G3A di NTB dalam meningkatkan posisi IPM NTB ke posisi tengah dari 33 provinsi di Indonesia.
3. Dampak implementasi kebijakan G3A di NTB telah dapat meningkatkan angka reduksi *shortfaal* IPM NTB secara nyata, walaupun belum cukup efektif dapat merubah rangking IPM NTB ke posisi papan tengah.

B. Saran

Berdasarkan beberapa simpulan dari temuan penelitian ini, berikut dikemukakan sejumlah saran sebagai bentuk rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka implementasi kebijakan sebagai berikut:

Pertama, implementasi kebijakan G3A (AKINO, ADONO, dan ABSANO) ke depan masih harus dilanjutkan untuk percepatan peningkatan IPM NTB.

Kedua, implementasi kebijakan pembangunan G3A dalam meningkatkan IPM di Provinsi NTB disarankan untuk: (1) Perbaikan sistem dan mekanisme monitoring dan evaluasi harus segera dilakukan; (2) Terobosan kreatif untuk mendorong dan memperluas partisipasi publik diperlukan langkah-langkah untuk memastikan G3A benar-benar menjadi gerakan perubahan sosial masyarakat; (3) Membangun pusat data yang valid dengan melibatkan penerima manfaat program G3A; (4) Merangkul semua

pihak (Masyarakat, OKP, LSM, Ormas, Akademisi) dalam membangun rasa kepemilikan G3A; (5) Menyusun Peraturan Daerah yang menjadi payung hukum untuk menjamin keberlanjutan G3A; (6) Membangun mekanisme dan sistem pengaduan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan G3A; dan (7) Pemberian penghargaan dan sanksi dalam pelaksanaan G3A dengan standar yang jelas, transparan, konsekuen dan terbebas dari kepentingan politik.

Ketiga, dampak nyata dari implementasi kebijakan pembangunan G3A yang telah dapat meningkatkan angka reduksi shortfaal IPM NTB secara nyata, disarankan untuk ditingkatkan efektivitasnya dalam peningkatan indeks komposit IPM NTB melalui koordinasi kebijakan dengan semua Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan temuan dan pembahasannya, dan sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian, dapat dikemukakan simpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan G3A di NTB telah diimplementasikan dengan berhasil dan dapat meningkatkan IPM. Implementasi Kebijakan G3A masih menghadapi *implementation lag*, yakni ada kesenjangan waktu dalam penerimaannya sebagai suatu gerakan perubahan sosial masyarakat. Target kinerja Implementasi kebijakan G3A di NTB perlu dilakukan review karena realisasinya masih jauh dari harapan yang ditetapkan untuk mencapai posisi papan tengah.
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan G3A dalam meningkatkan IPM di Provinsi NTB, yaitu:
 - a. Faktor komunikasi menjadi faktor pendukung utama dalam proses implementasi Kebijakan G3A di NTB.
 - b. Faktor disposisi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota serta masyarakat NTB mewujudkan kebijakan G3A sebagai gerakan perubahan sosial masyarakat yang partisipatif dan berbasis dipedesaan merupakan faktor pendukung yang sangat kuat dalam ikhtiar percepatan peningkatan IPM NTB.

- c. Faktor sumberdaya yang masih sangat terbatas dan struktur birokrasi yang belum dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan G3A di NTB dalam meningkatkan posisi IPM NTB ke posisi tengah dari 33 provinsi di Indonesia.
3. Dampak implementasi kebijakan G3A di NTB telah dapat meningkatkan angka reduksi *shortfaal* IPM NTB secara nyata, walaupun belum cukup efektif dapat merubah rangking IPM NTB ke posisi papan tengah.

B. Saran

Berdasarkan beberapa simpulan dari temuan penelitian ini, berikut dikemukakan sejumlah saran sebagai bentuk rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka implementasi kebijakan sebagai berikut:

Pertama, implementasi kebijakan G3A (AKINO, ADONO, dan ABSANO) ke depan masih harus dilanjutkan untuk percepatan peningkatan IPM NTB.

Kedua, implementasi kebijakan pembangunan G3A dalam meningkatkan IPM di Provinsi NTB disarankan untuk: (1) Perbaikan sistem dan mekanisme monitoring dan evaluasi harus segera dilakukan; (2) Terobosan kreatif untuk mendorong dan memperluas partisipasi publik diperlukan langkah-langkah untuk memastikan G3A benar-benar menjadi gerakan perubahan sosial masyarakat; (3) Membangun pusat data yang valid dengan melibatkan penerima manfaat program G3A; (4) Merangkul semua

pihak (Masyarakat, OKP, LSM, Ormas, Akademisi) dalam membangun rasa kepemilikan G3A; (5) Menyusun Peraturan Daerah yang menjadi payung hukum untuk menjamin keberlanjutan G3A; (6) Membangun mekanisme dan sistem pengaduan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan G3A; dan (7) Pemberian penghargaan dan sanksi dalam pelaksanaan G3A dengan standar yang jelas, transparan, konsekuen dan terbebas dari kepentingan politik.

Ketiga, dampak nyata dari implementasi kebijakan pembangunan G3A yang telah dapat meningkatkan angka reduksi shortfaal IPM NTB secara nyata, disarankan untuk ditingkatkan efektivitasnya dalam peningkatan indeks komposit IPM NTB melalui koordinasi kebijakan dengan semua Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat.

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J.E. (1966). *Cases in Public Policy Making*. New York: Preager Publishers.
- Anderson, J.E. (1979). *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Akib Haedar, (2010). *Implementasi Kebijakan. Apa, Mengapa dan Bagaimana. Jurnal Administrasi Publik*, Vol 1, Nomor 1 Tahun 2010.
- Bogdan, Robert & Taylor, Steven J. (1975). *Introduction to Qualitative Research Methods*. New York: John Willery & Sons.
- Bogdan, Robert C. & Biklen, S. K. (1982). *Qualitative Reseach for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon, Inc.
- Danim & Sudarwan. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Penerbit Pustaka Setia.
- Dunn, William N. (1999). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dye, Thomas R. (1978). *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice Hall, Inc.
- Easton, D. (1953). *The Political System*. New York: Knopf.
- Edwards III, G.C. & Sharkansky, I. (1978). *The olicy Predicement*. San Francisco: W.H. Freeman and Company.
- Faturochman dkk. (2007). *Membangun Gerakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat*. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM. Yogyakarta.
- Fadel Muhammad. (2009). *Reinventing Local Government : Pengalaman Dari Daerah*. PT. Gramedia. Jakarta. 427 h.
- Frierdric. C.J. (1963). *Man and His Government*. New York: McGraw Hill.
- Grindle, Marilee S. (ed.). (1980). *Politics and Apolocy Implementtaion in The Third World*. New Jersey: Prenticetown University Press.
- Hovland Ingie. (2007). *Membuat Perbedaan: Pemantauan dan Evaluasi Penelitian Kebijakan*, Working Paper 281. Overseas Development Institute, 111 Westminster Bridge Road. London, UK. 120 h.

- Hogwood, Brian W & Lewis A Gunn. (1988). *Policy Analysis for the Real World*. Oxford: Oxford University Press.
- Indiahono Dwiyanto. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Penerbit Gava Media. Yogyakarta. 254 h
- Lincoln, Y.S. & Guba, E.G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. London: SAGE Publicatons.
- Lindbolm, Charles E. (1965). *The Policy Making Process*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Lineberry, Robert L & Ira Sharkansky. (1974). *Urban Politics and Public Policy*. New York: Harper & Row Publishers.
- Mazmanian, Daniel H and Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*. New York: Harper Collins.
- Mustopadidjaja, 2004. *Konsistensi dan Efektivitas Kebijakan Strategi Pembangunan Melalui Perubahan Tata Kelola Pemerintahan 2004-2009*. Makalah. The Habibi Center, Jakarta. 16 h.
- Majdi Muhammad Zainul, 2010. *Pidato Peringatan HUT ke-52 Provinsi NTB*. Bagian Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB. Mataram, 29 h
- Meter, Donald & Carl Van Horn. (1975). "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework", dalam *Administration and Society* No.67, 1975. London: Sage Publications.
- Miles, M.B. & Huberman, A.M. (1985). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. London: SAGE Publicatons.
- Mustopadidjaja, AR. (2003). *Manajemen Proses Kebijakan Publik. Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara – RI.
- Nasution, S. (1988). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Penerbit Tarsito.
- Nugroho, D. Riant. (2003). *Kebijakan Publik. Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nyak Ilham, Hermanto Siregar dan D.S. Priyarsono. (2006). *Efektivitas Kebijakan Harga Pangan Terhadap Ketahanan Pangan*. *Jurnal Agro Ekonomi*, Volume 24 No.2, Oktober 2006. Hal 157-177
- Nugroho Riant.(2008). *Public Policy*. PT.Gramedia. Jakarta. 657 h.

- Patton, Carl V & David S. Sawicky. (1993). *Basic Methods of Policy Anaysis and Planning*. London: Prentice-Hall.
- Saleh, Kusmadi. (Ed.). (2008). *Panduan Analisis Data Hasil Survei Millennium Development Goals (MDGs)*. Jakarta: Kerjasama BPS dan UNICEF.
- Siti Fatimah Nurhayati. *Analisis Implementasi Peran Sumberdaya Manusia sebagai Mitra Strategik*. ISSN:0853-7665
- Sayuti Rosiady. (2011). *Affirmative Policy, Menjawab Masa Depan NTB*. Lembaga Riset Sosial, Politik dan agama (Larispa). Mataram, 154 h
- Taylor, Steven J. & Bogdan, Robert. (1984). *Introduction to Qualitative Research Methods: The Search for Meanings*. New York: John Wyley dan Sons.
- Tajerin, (2005). *Faktor Penentu Efektivitas Kebijakan, Suatu Kajian Perspektif Sosiologis*. Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Sains Akuatik. Hal 76~85.
- Tolomundu Farid.(2008). *Mampukah NTB Bersaing?*. Jaring Pena.Mataram 141 h
- Tantowi Yusuf. (2011). SBY, TGB, BM esai-esai reflektif dari & tentang NTB. Jaring Pena, Mataram 102 h;
- UNDP. (1997). *Governance for Sustainable Development–A Policy Documen*: New York: UNDP,
- UNDP. (2002). *Human Development Report 2002. Deepening Democracy in A Fragmented World*. New York: Oxford Uiversity Press,
- UNICEF. (1997). *Maksimalkan Potensi Pembangunan Manusia di Indonesia*. Jakarta: Perwakilan Unicef.
- UNITED NATIONS dan Bappenas. (2007). *Laporan Pencapaian Millennium Development Goals Indonesia Tahun 2007*. Jakarta: Kerjasama United Nations dan Bappenas.
- Widodo Joko. (2010). *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik*. Bayumedia Publishing. Malang. 183 h;
- Yasa IG.W.Murjana. (2007). *Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Partisipasi Masyarakat di Provinsi Bali*. Jurnal Ekonomi dan Sosial INPUT. Hal 86-91.
- Badan Pusat Statistik dan Bappeda NTB. (1999). *Laporan Pengembangan dan poemanfaatan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi NTB 1999*. Mataram: BPS, Bappeda NTB.
- Badan Pusat Statistik dan Bappeda NTB. (2006). *Indeks Pembangunan Manusia Nusa Tenggara Barat* . Mataram: BPS, Bappeda NTB.

- Badan Pusat Statistik dan Bappeda NTB. (2006). *Buku Saku Indikator Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008*. Mataram: BPS, Bappeda NTB.
- Badan Pusat Statistik dan Bappeda NTB. (2008). *Nusa Tenggara Barat Dalam Angka Tahun 2008*. Mataram: BPS, Beppada NTB.
- Badan Pusat Statistik dan Bappeda NTB. (2009). *Nusa Tenggara Barat Dalam Angka Tahun 2009*. Mataram: BPS, Beppada NTB.
- Badan Pusat Statistik dan Bappeda NTB. (2010). *Nusa Tenggara Barat Dalam Angka Tahun 2010*. Mataram: BPS, Beppada NTB.
- Badan Pusat Statistik dan Bappenas. (2001). *Menuju Indonesia Baru: Demokrasi dan Pembangunan Manusia Indonesia: Indonesia dalam Laporan Pembangunan Manusia 2001*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, Bappenas.
- Bappenas. (1999). *Pembangunan Daerah Dalam Angka*. Jakarta: Bappenas.
- Bappeda NTB. (2008). *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 – 2025*. Mataram: Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Bappeda NTB. (2009). *Perencanaan Pembangunan Sosial: Pembangunan Sumber Daya Manusia NTB*. Mataram: Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Bappeda NTB, Antara. (2010). *Kajian Belanja Publik Nusa Tenggara Barat 2010*. Mataram: Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Badan Pusat Statistik. (2010). *Penyempurnaan Penyusunan Indeks Pembangunan Regional: CV. Nario Sari*. Jakarta. 137 h.
- Departemen Dalam Negeri. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Departemen Dalam Negeri.
- Departemen Kesehatan. (1997). *Survei Demografi dan Keserhatan 2007*. Jakarta: Kerjasama BPS, Kantor Menteri Negara Kependudukan dan BKKBN, Departemen Kesehatan, dan DHS.
- Kantor Menko Kesra. (2007). *Pemufakatan dan Rencana Aksi Pembangunan Manusia Indonesia*. Jakarta: Kantor Menko Kesra.
- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. (2009). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat 2009 – 2013*. Mataram: Pemerintah Provinsi NTB.
- Agussalim. (2011). Desain Strategi untuk Mengakselerasi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Selatan. Diambil 5 April 2012, situs World Wide Web <http://agusjero.blogspot.com/2011/11/desain-strategi-untuk-mengakselerasi.html>

- Anton Sumantri.(2011). Program Peningkatan IPM Jangan Jadi Janji Politik. Di ambil 6 April 2012, dari situs World Wide Web <http://unpad.ac.id/archives/15511>
- Fajar.(2012). Peningkatan IPM Harus Terintegrasi. Diambil 5 April 2012, dari situs World Wide Web <http://beta.fajar.co.id/read-20120326190707-peningkatan-ipm-harus-terintegrasi>
- Lestari. (2010). Disposisi dalam Implementasi Kebijakan Publik. Di ambil 3 April 2012, dari situs World Wide Web <http://lestari.info/disposisi-dalam-implementasi-kebijakan-publik>
- Rasdi Eko Siswoyo,Kardoyo,Tri Joko Raharjo.(2008). Strategi Akselerasi Pencapaian IPM dibidang Pendidikan untuk Mendukung Keberhasilan Pembangunan Jangka Menengah Kota Semarang. Diambil 5 April 2012, dari situs World Wide Web <http://bappeda.semarang.go.id/uploaded/publikasi/STRATEGI-AKSELERASI-IPM-RASDI-dkk.pdf>

UNIVERSITAS TERBUKA

LAMPIRAN I. DAFTAR NAMA INFORMAN DAN INSTITUSI/ LEMBAGA IMPLEMENTOR G-3A

NO	NAMA INSTITUSI/LEMBAGA	PERAN DALAM G-3A	INFORMAN	JABATAN
1 2	GUBERNUR BAPPEDA	Pembuat Kebijakan/Evaluator	DR.TGH. Muhammad Zainul Majdi DR. Ir. H. Rosiady Sayuti	Kepala Daerah Ka. Bappeda NTB
3 4 5	DINAS KESEHATAN DIKPORA RSU	SKPD Pelaksana	dr. H. Mochamad Ismail Drs. H. L. Syafi'i, MM dr. H. Mawardi, MFPPM	Kadis Kesehatan Kadis Dikpora Direktur RSU
6	ASISTEN ADM. UMUM DAN KESRA	Supervisor/ Koordinator/Monev	Drs. H. Lalu Sanusi, MM	Asisten Adm. Umum dan Kesra
7 8 9 10 11 12	BPMPD BKKBN BP2KB BIRO KESRA PEMERINTAH KOTA MATARAM PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR	SKPD Pendukung	Soedaryanto, SKM, SE, MA Drs. H. Suhardi, M. Kes Dra. Ratningdiah, MH Drs. H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd Ir. H.L. Makmur Said, MM Drs. H. Syuruji	Ka. BPMPD NTB Ka. BKKBN NTB Ka. BP2KB NTB Karo Kesra Setda. Prov. NTB Sekda Kota Mataram Kadis Dikpora Lombok Timur
13 14 15 16 17	TIM G3A PKK PERS MUSLIMAT NW LSM/ Ponpes	Partisipan/ Tokoh Masyarakat	Drs. H. Wildan Hj. Rabbiatul Adawiyah Majdi, SE Nasib Ikroman Ir. Hj. Siti Rohmi Djalilah, M.Pd H. Hasanain Djuaini, Lc, MH	Staf Ahli Gubernur Ketua TP. PKK Wartawan Lombok Post Ketua Muslimat NW Ketua Ponpes
18 19	DPRD INSPEKTORAT	Pengawasan Pelaksanaan G3A	Drs. H. L. Sujirman Chairul Mahsul, SH. MH	Ketua DPRD Inspektur Provinsi NTB

LAMPIRAN 2. DAFTAR INFORMAN LEMBAGA/ ANGGOTA SASARAN PENERIMA MANFAAT PROGRAM ADONO

NO.	KABUPATEN	SEKOLAH	ALAMAT	PENGELOLA	ANGGOTA	ALAMAT
Pulau Lombok						
1		MTs Hidayatullah Mataram	Jl. Hidayatullah Ampenan	Abidin, S.Pd	Zainuddin, S.Pd.I	Mataram
2		Univ. Muhammadiyah Mataram	Jl. KH Ahmad Dahlan Pagesangan	Drs. H. Syamsuddin Anwar	Drs. Mustamin, MM	Mataram
3		SMPN I Gangga	Desa Gondang Gangga	Nasrun	Safuruddin, S.pd	Gangga KLU
4		STIKES Bagu	Ponpes Qomarul Huda Bagu	H. Sastrawan, SKM, MH	L. Moh. Failani	Bagu Lombok Tengah
5		STIT Al-Aziziyah	Kapek Gunungsari	Drs. H. Ishaq	Kasmiati	Gunungsari Labar
6		MTs. Manbaul Bayan Sakra	Desa Sakra Kec. Sakra Lotim	L. Izwanudy Ali SH	Buhari muslim, S.Pd.I	Sakra Lotim
7		STMMKA SZ NW	Jl. Raya Mataram Lotim	Drs. H. M Mugni, M.Pd	Muhammad Sarmuzi	Lombok timur
8		MA. NW. Sukamulia	Desa Sukamulia Lotim	Umar A.Ma	Ahmad Hudan N	Desa Sukamulia Lotim
Pulau Sumbawa						
9		SMA Al- Ikhlas	Pondok Pesanteren Al-Ikhlak KSB	Badaruddin Soes, S.Pd	Putri Balqis	Menala KSB
10		SMP 1 Taliwang	Jl. Undru No 3 Taliwang	Mujiburrahman, S.Pd	Badaruddin Soes, S.Pd	Taliwang KSB
11		MTsN Sumbawa Besar	Jl. Durian Sumbawa Besar	Drs. Fathurrahman	Winadi Al Bayami	Sumbawa Besar
12		Akper Sumbawa	Jl. Garuda No 104 Sumbawa	H. Umar Hasani, S.Sos	Dewi Astuti	Sumbawa Besar
13		STKIP Al Amin Dompus	Jl. Lintas Wawonduru Dompus	suparman S.Pd	Sri Karlina	Bali I Dompus
14		SMA Kae Woha Bima	Jl. Raya Tente Bima	Drs. H. Syamsuddin	Muntashir	Woha Bima
15		MTsN Satu Atap Bolo	Jl. Lintas Sumbawa Bolo Bima	Bahtiar, S.Pd	Ismail, S.Si	Bolo Bima
16		SMA Yasim Kota Bima	Rabangodu Utara	Mahmud Amir	Adiputra	Rabangodu Utara

LAMPIRAN 3. DAFTAR INFORMAN LEMBAGA/ ANGGOTA SASARAN PENERIMA MANFAAT PROGRAM ABSANO

NO	KAB/KOTA	LEMBAGA	ALAMAT	PENGELOLA	ANGGOTA	ALAMAT
Pulau Lombok						
1		PKBM Al - Hidayah	Jl. Sultan Salahudin Gg Nila Mtr	Samahudin	Fikriadi, S.Pd	Jati Sela Gunungsari
2		PKBM Dewi Anjani	Jl. Sultan Kaharudin Mtr	Ni Made Rupini, S.Pd	Ni Made Andriani	Saren Pagesangan
3		PKBM Sejahtera	Desa Teratak Batuklian Utara	Abubakar H. Jamal, S.pd	Muslehuudin, S.Pd	Desa Aik berik Loteng
4		PKBM Daru Taklim	Desa Aik Bual Kec. Kopang	Abdul Hanas, S.S	Junaidi, S.Pd	Desa Aik Bual Kec. Kopang
5		PKBM Merenten	Sesait Kec. Kayangan KLU	Mahiruddin	Aryadi Utomo	Sumur Pande Tengah KLU
6		PKBM Halimatu ssha'diah	Lendang Nangka Masbagik Lotim	Drs. H. Muhiddin	L. Supratman	Lendang Nangka Masbagik Lotim
7		PKBM Al - Washilah	Desa Kerongkong Suralaga Lotim	L. Ahmad Abuazir	L. Sutarjum	Desa Kerongkong Suralaga Lotim
8		PKBM Cahaya Sedau	Desa Sedau Narmada	Rukyaton Ulya, S.Pd	Wirya Eka Saputra	Desa Sedau Narmada Lobar
Pulau Sumbawa						
9		PKBM Mandiri	Jl. Lintas Tano Taliwang	Burhanuddin	Supiani	Desa Seteluk Tengah KSB
10		PKBM Batu Balaeng	Jl. Beda Rea Rt 19 Seteluk	Abdullah, S.Pd	Sarifuddin, A.Ma	Seteluk Tengah KSB
11		PKBM Saputri	Desa Kakiang Kec. Moyo Hilir	Rukmini, S.Pd	Makarudin	Dusun Pengenyar Kakiang
12		PKBM Saling Pariri	Desa Menemeng Kec. Brang Ene	Kurniati, S.Pd	Eko Santoso	Desa Menemeng Kec. Brang Ene
13		PKBM Nurul Hikmah	Jl. Lintas Calabai Doromelo Dompus	Sahbuddin, S.Pd	Ery Rahatullah	Dusun Transad I Doromelo
14		PKBM Wadu Kadera	Desa Riwo kec. Woja Dompus	Suhardin, MH	M. Natsir	Desa Riwo kec. Woja Dompus
15		PKBM Mata Sipandu	Jl. Kartini No 9 Asakota	Sri Windiarti	Wahyudin, S.Pd	Kel. Sadia Kec. Mpunda
16		PKBM Sara Suba	Kampung Sigi Kel. Paruga	Rahma Ningsih	Dra. Nurcani	Monggonao Kec. Mpuda Bima

LAMPIRAN 4. DAFTAR INFORMAN LEMBAGA/ ANGGOTA SASARAN PENERIMA MANFAAT PROGRAM AKINO

NO	KAB/KOTA	POSYANDU	ALAMAT	PENGELOLA	ANGGOTA	ALAMAT
Pulau Lombok						
1		Keluarga Ceria	Ling. Negara Sakah Utara Kel. Mayura	Widi Haerani	Diah Setyawati	Negarasakah Utara
2		Tunas Anggur	Jl. Selaparang Gg. Anggur Ling.Sweta Barat	Wayan Sri Astuti	Kd Sukendri Wati	Jl. Selaparang Gg Nenas Mayura
3		Ombe Rerot II	Dusun Ombe Rerot Kec. Kediri	Suhartik	Sustina	Ombe Rerot Timur Kediri
4		Sakura	Dusun Dasan Tawar Kec. Kediri	Nursehan	Islamiyah	Dasan Tawar Banyumulek Timur
5		Pade Angen	Dusun Timuk Peken Ds. Surabaya Kec. Sakti	Rusmini	Maini	Timur Peken Desa Surabaya Lotim
6		Melati	Dusun Gelogor Ds.Lepak Kec. Sakti	Sulhiati Trisnadi	Yeni Seri R	Desa Lepak Sakra Timur Lotim
7		Mawar	Dusun Numpeng Ds. Jago Kec Praya	Mustapa	Rabitah	Numpeng Ds. Jago Kec Praya
8		Flamboyan	Dusun Lendang Tebau Ds. Jago Kec. Praya	Mardiyah	Mastunah	Lendang Tebau Ds. Jago Kec. Praya
Pulau Sumbawa						
9		Melati	Dusun Mangge To'I Ds. Ntori Kec. Wawo	Lilik Iryani	Samsia	Mangge To'I Ds. Ntori Kec. Wawo
10		Kedo 1	Ling.Kedo 1 Kel. Jati Wangi Kec. Asakota	Putri	Misbah	Jl. Karantika Jatiwangi Kota Bima
11		Songgela	Ling. Songgela Kel. Jati Wangi Kec. Asakota	Samsidar	Muhidin	Songgela Kel. Jati Wangi Kec. Asakota
12		Mawar	Ling. Bali Barat Kel. Bali Kec. Dompus	Rosidah	Asni	Ling. Bali Barat Kel. Bali Kec. Dompus
13		Anggrek	Desa Taropo Kec. Kilo	Sayuti	Arina	Desa Taropo Kec. Kilo Kab. Dompus
14		Suka Maju	RT.02 RW.03 Kel. Brang Biji Kec.Sumbawa	Nuraini	Hartati	Kel. Brang Biji Kec.Sumbawa
15		Kamboja I	Dusun Sela Ds. Batu Tering Kec. Moyo Hulu	Pustikawati	Nurmaena	Ds. Batu Tering Kec. Moyo Hulu
16		Sabalong	Jl Pendidikan Kel. Telaga Bertong Taliwang	Nurmi	Uswatun Hasanah	Ling.Telaga Baru B Kel. Telaga Bertong
17		Balat	Perjuk Balat Kel. Telaga Bertong Taliwang	Hanisa	Ainun	Kel. Telaga Bertong Taliwang

LAMPIRAN 3. DAFTAR INFORMA

UNIVERSITAS TERBUKA

N LEMBAGA/ ANGGOTA SASARAN LAMPIRAN 3. DAFTAR INFORMAN LEMBAGA/ ANGGOTA SASARAN LAMPIRAN 3. DAFTAR INFORMA

UNIVERSITAS TERBUKA

N LEMBAGA/ ANGGOTA SASARAN LAMPIRAN 3. DAFTAR INFORMAN LEMBAGA/ ANGGOTA SASARAN LAMPIRAN 3. DAFTAR INFORMA

UNIVERSITAS TERBUKA

N LEMBAGA/ ANGGOTA SASARAN LAMPIRAN 3. DAFTAR INFORMAN LEMBAGA/ ANGGOTA SASARAN LAMPIRAN 3. DAFTAR INFORMA

UNIVERSITAS TERBUKA

N LEMBAGA/ ANGGOTA SASARAN LAMPIRAN 3. DAFTAR INFORMAN LEMBAGA/ ANGGOTA SASARAN LAMPIRAN 3. DAFTAR INFORMA

UNIVERSITAS TERBUKA

N LEMBAGA/ ANGGOTA SASARAN LAMPIRAN 3. DAFTAR INFORMAN LEMBAGA/ ANGGOTA SASARAN LAMPIRAN 3. DAFTAR INFORMA

UNIVERSITAS TERBUKA

N LEMBAGA/ ANGGOTA SASARAN LAMPIRAN 3. DAFTAR INFORMAN LEMBAGA/ ANGGOTA SASARAN LAMPIRAN 3. DAFTAR INFORMA

UNIVERSITAS TERBUKA

N LEMBAGA/ ANGGOTA SASARAN LAMPIRAN 3. DAFTAR INFORMAN LEMBAGA/ ANGGOTA SASARAN LAMPIRAN 3. DAFTAR INFORMA

UNIVERSITAS TERBUKA

N LEMBAGA/ ANGGOTA SASARAN LAMPIRAN 3. DAFTAR INFORMAN LEMBAGA/ ANGGOTA SASARAN LAMPIRAN 3. DAFTAR INFORMA

UNIVERSITAS TERBUKA

N LEMBAGA/ ANGGOTA SASARAN LAMPIRAN 3. DAFTAR INFORMAN LEMBAGA/ ANGGOTA SASARAN LAMPIRAN 3. DAFTAR INFORMA

UNIVERSITAS TERBUKA

N LEMBAGA/ ANGGOTA SASARAN LAMPIRAN 3. DAFTAR INFORMAN LEMBAGA/ ANGGOTA SASARAN LAMPIRAN 3. DAFTAR INFORMA

UNIVERSITAS TERBUKA

N LEMBAGA/ ANGGOTA SASARAN LAMPIRAN 3. DAFTAR INFORMAN LEMBAGA/ ANGGOTA SASARAN LAMPIRAN 3. DAFTAR INFORMA

UNIVERSITAS TERBUKA

N LEMBAGA/ ANGGOTA SASARAN LAMPIRAN 3. DAFTAR INFORMAN LEMBAGA/ ANGGOTA SASARAN LAMPIRAN 3. DAFTAR INFORMA

UNIVERSITAS TERBUKA

N LEMBAGA/ ANGGOTA SASARAN LAMPIRAN 3. DAFTAR INFORMAN LEMBAGA/ ANGGOTA SASARAN LAMPIRAN 3. DAFTAR INFORMA

UNIVERSITAS TERBUKA

N LEMBAGA/ ANGGOTA SASARAN LAMPIRAN 3. DAFTAR INFORMAN LEMBAGA/ ANGGOTA SASARAN LAMPIRAN 3. DAFTAR INFORMA

UNIVERSITAS TERBUKA

N LEMBAGA/ ANGGOTA SASARAN LAMPIRAN 3. DAFTAR INFORMAN LEMBAGA/ ANGGOTA SASARAN

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 5.

PEDOMAN WAWANCARA

I. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NTB BERSAING

1. Apa latar belakang perlu adanya Kebijakan Pembangunan NTB Bersaing
2. Bagaimana bentuk Kebijakan Pembangunan NTB Bersaing
3. Bagaimana pola Implementasi Kebijakan tersebut.
4. Untuk pelaksanaan program G3A, bagaimana pengorganisasiannya sehingga dapat terwujud sebagai suatu gerakan.
5. Bagaimana menggalang dukungan masyarakat agar terlibat dalam implementasi G3A

II. IMLEMENTASI KEBIJAKAN G3A

1. Apakah Gubernur selaku pembuat kebijakan sudah memberikan informasi yang jelas mengenai sasaran dan tujuan kebijakan G-3-A? Jika sudah, jelaskan melalui apa informasi-informasi tersebut diberikan.
2. Apakah Gubernur sudah memberikan penjelasan dalam bentuk petunjuk teknis (Juknis) atau Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) mengenai apa-apa yang harus dilakukan oleh pelaksana kebijakan G-3-A? Jika sudah, bagaimana kejelasan Juknis dan Juklak tersebut.
3. Bagaimana koordinasi antar instansi atau antar bagian atau antar seksi terkait dengan pelaksanaan kebijakan G-3-A di Provinsi Nusa Tenggara Barat? Apakah sudah saling mendukung dan sudah berjalan dengan baik?
4. Apakah SDM pelaksana kebijakan G-3-A di Provinsi Nusa Tenggara Barat secara kuantitas sudah mencukupi?
5. Apakah SDM pelaksana G-3-A di Provinsi Nusa Tenggara Barat secara kualitas sudah memadai? Jika belum jelaskan dimana kelemahannya?
6. Bagaimana dengan kondisi finansial untuk pelaksanaan kebijakan G-3-A? Apakah jumlahnya sudah mencukupi dan darimana alokasi anggaran tersebut diperoleh?
7. Bagaimana dengan kondisi antara sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan G-3-A di Provinsi Nusa Tenggara Barat? Jika belum memadai, jelaskan sarana dan prasarana apa saja yang masih dirasa kurang?

8. Bagaimana tanggapan Anda dengan adanya kebijakan G-3-A? Apakah Anda mendukung sepenuhnya? Jika mendukung berikan alasan-alasannya.
9. Bagaimana pemahaman Anda secara umum mengenai kebijakan G-3-A yang menjadi tugas Anda untuk mengimplementasikannya? Jika belum paham, sebutkan hal-hal apa saja yang Anda belum pahami?
10. Apakah anda memiliki komitmen yang kuat untuk mengimplementasikan kebijakan G-3-A? Jika ya, jelaskan dengan komitmen tersebut ditunjukkan.
11. Bagaimana dengan transparansi pelaksanaan kebijakan G-3-A? Apakah ada laporan-laporan periodik untuk mempertanggungjawabkannya? Jika ada, dalam bentuk apa laporan-laporan tersebut dibuat?
12. Apakah unit organisasi pelaksana G-3-A memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas? Jika ada, apakah setiap pelaksana kebijakan sudah memahami dan melaksanakannya sesuai dengan prosedur yang ada?
13. Apakah pola-pola hubungan kerja antar bagian dalam organisasi terjalin dengan baik, sehingga tidak mengakibatkan benturan tugas?
14. Apakah sudah ada aturan yang jelas mengenai wewenang dan tanggungjawab dari masing-masing pelaksana kebijakan G-3-A? Jika sudah ada, jelaskan apakah pelaksanaannya sudah sesuai aturan yang ada.

III. PENERIMA MANFAAT G3A

1. Apakah SKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah memberikan informasi yang jelas mengenai sasaran dan tujuan kebijakan G-3-A? Jika sudah, jelaskan melalui apa informasi-informasi tersebut diberikan.
2. Apakah SKPD di Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah memberikan penjelasan dalam bentuk Petunjuk Teknis (Juknis) atau Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) mengenai apa-apa yang harus dilakukan oleh Pengurus Koperasi untuk G-3-A? Jika sudah, bagaimana kejelasan Juknis dan Juklak tersebut.
3. Bagaimana koordinasi antar instansi atau antar bagian atau antar seksi terkait dengan pelaksanaan kebijakan G-3-A di Provinsi Nusa Tenggara Barat? Apakah sudah saling mendukung dan sudah berjalan dengan baik?
4. Apakah SDM pelaksana kebijakan G-3-A di Provinsi Nusa Tenggara Barat secara kuantitas sudah mencukupi?
5. Apakah SDM pelaksana kebijakan G-3-A di Provinsi Nusa Tenggara Barat secara kuantitas sudah memadai? Jika belum jelaskan dimana kelemahannya.
6. Bagaimana dengan kondisi finansial untuk pelaksanaan kebijakan G-3-A? Apakah jumlahnya sudah mencukupi dan darimana alokasi anggaran tersebut diperoleh?
7. Bagaimana dengan kondisi sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan G-3-A di Provinsi Nusa Tenggara Barat? Jika belum memadai, jelaskan sarana dan prasarana apa saja yang masih dirasa kurang?
8. Bagaimana tanggapan Anda dengan adanya kebijakan G-3-A? Apakah Anda mendukung sepenuhnya? Jika mendukung berikan alasan-alasannya.
9. Bagaimana dengan transparansi pelaksanaan G-3-A? Apakah ada laporan-laporan periodik untuk mempertanggungjawabkannya? Jika ada, dalam bentuk apa laporan-laporan tersebut dibuat?
10. Apakah unit organisasi pelaksana G-3-A memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas? Jika ada, apakah setiap pelaksana kebijakan sudah memahami dan melaksanakannya sesuai dengan prosedur yang ada?
11. Apakah pola-pola hubungan kerja antar bagian dalam organisasi terjalin dengan baik, sehingga tidak mengakibatkan benturan tugas?
12. Apakah sudah ada aturan yang jelas mengenai wewenang dan tanggungjawab dari masing-masing pelaksana kebijakan G-3-A? Jika sudah ada, jelaskan apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan aturan yang ada.

Lampiran 6.**PEDOMAN OBSERVASI**

Prinsip utama observasi adalah segala sesuatu yang diamati harus dapat ditangkap oleh panca indra peneliti, sehingga pengamatan harus dilakukan secara langsung.

Pengamatan tentang **Implementasi Kebijakan Pembangunan NTB BerSAING Dalam Peningkatan IPM di NTB** yang diwujudkan melalui **G-3-A**, Gerakan AKINO (Angka Kematian Ibu Menuju Nol), ADONO (Angka Drop Out Menuju Nol) dan ABSANO (Angka Buta Aksara Menuju Nol); dilaksanakan terhadap SKPD pelaksana dan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan tersebut.

I. Proses Implementasi Kebijakan

No	OBYEK / TEMA YANG DIOBSERVASI	Lokasi Pengamatan	Hasil Pengamatan		Narasi/Komentar
			ada	Tdk ada	
<input type="checkbox"/>	Pelaksanaan sosialisasi dan komunikasi				
<input type="checkbox"/>	Pelaksanaan kegiatan Lapangan				
<input type="checkbox"/>	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi				
<input type="checkbox"/>	Hasil / Dampak kegiatan				

II. Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan/kegagalan Implementasi Kebijakan

No	OBYEK / TEMA YANG DIOBSERVASI	Lokasi Pengamatan	Hasil Pengamatan		
			ada	Tdk ada	Narasi/Komentar
<input type="checkbox"/>	Proses Komunikasi				
<input type="checkbox"/>	Ketersediaan SDM				
<input type="checkbox"/>	Kelancaran Anggaran				
<input type="checkbox"/>	Ketersediaan Peralatan				
<input type="checkbox"/>	Pola Kepemimpinan				
<input type="checkbox"/>	Hubungan antar pelaku				
<input type="checkbox"/>	Hubungan organisasi				

III. Kelompok Sasaran

No	OBYEK / TEMA YANG DIOBSERVASI	Lokasi Pengamatan	Hasil Pengamatan		
			ada	Tdk ada	Narasi/Komentar
<input type="checkbox"/>	Peningkatan pendidikan				
<input type="checkbox"/>	Peningkatan pengetahuan				
<input type="checkbox"/>	Peningkatan Keterampilan				
<input type="checkbox"/>	Peningkatan sarana kesehatan				
<input type="checkbox"/>	Peningkatan sarana pendidikan				

Mataram, Nopember 2011

Peneliti,

(_____)

Lampiran 7.

PEDOMAN FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)

A. LATAR BELAKANG

Focus Group Discussion (FGD) sangat populer dan banyak digunakan sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian sosial. Pengambilan data kualitatif melalui FGD dikenal luas karena kelebihanannya dalam memberikan kemudahan dan peluang bagi peneliti untuk menjalin keterbukaan, kepercayaan, dan memahami persepsi, sikap, serta pengalaman yang dimiliki informan.

FGD memungkinkan peneliti dan informan berdiskusi intensif dan tidak kaku dalam membahas isu-isu yang sangat spesifik. FGD juga memungkinkan peneliti mengumpulkan informasi secara cepat dan konstruktif dari peserta yang memiliki latar belakang berbeda-beda. Di samping itu, dinamika kelompok yang terjadi selama berlangsungnya proses diskusi seringkali memberikan informasi yang penting, menarik, bahkan kadang tidak terduga. Oleh karena itu, FGD mempunyai arti penting pada kedalaman informasinya. Lewat FGD, peneliti bisa mengetahui alasan, motivasi, argumentasi atau dasar dari pendapat seseorang atau kelompok.

FGD secara sederhana dapat didefinisikan sebagai suatu diskusi yang dilakukan secara sistematis dan terarah mengenai suatu isu atau masalah tertentu. Irwanto (2006: 1-2) mendefinisikan FGD sebagai *suatu proses pengumpulan data dan informasi yang sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok*.

B. TOPIK PERMASALAHAN FGD

Topik masalah yang akan dibahas dalam FGD Tentang Implementasi Kebijakan Pembangunan NTB Bersaing dalam Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meliputi :

1. Implementasi Program G-3-A dalam mewujudkan NTB BERSAING
2. Faktor pendukung dan Penghambat Program G-3-A dalam meningkatkan IPM NTB;
3. Capaian Kinerja Program G-3-A;
4. IPM NTB, masalah dan solusinya;

C. TUJUAN DAN SASARAN FGD

Berdasarkan keempat topik permasalahan tersebut ditetapkan tujuan pokok FGD sebagai berikut:

1. Mendalami proses implementasi program G-3-A dalam rangka mencapai visi NTB mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Barat yang beriman dan berdayasaing;
2. Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi program G-3-A;
3. Mengetahui capaian kinerja program G-3-A;
4. Mengetahui perkembangan IPM NTB dan indikator-indikator penentunya; juga mendalami berbagai masalah dan solusi yang efektif untuk meningkatkan IPM Nusa Tenggara Barat.

Adapun sasaran FGD ini adalah untuk:

- a) Memperoleh informasi yang banyak secara cepat tentang implementasi G-3-A dan IPM NTB;
- b) Mengidentifikasi dan menggali informasi mengenai kepercayaan, sikap dan perilaku kelompok tertentu;
- c) Menghasilkan ide-ide untuk merumuskan rekomendasi terkait dengan implementasi G-3-A; dan
- d) *Cross-check* data dari sumber lain atau dengan metode lain.

D. PERSIAPAN DAN DESAIN FGD

Pelaksanaan FGD memerlukan beberapa persiapan sebagai berikut: 1) Membentuk Tim; 2) Memilih Tempat dan Mengatur Tempat; 3) Menyiapkan Logistik; 4 Menentukan Jumlah Peserta; dan 5) Rekrutmen Peserta.

1) Membentuk Tim

Tim FGD yang akan dibentuk mencakup:

1. **Moderator**, yaitu fasilitator diskusi yang terlatih dan memahami masalah yang dibahas serta tujuan penelitian yang hendak dicapai (*keampilan substantif*), serta terampil mengelola diskusi (*keampilan proses*).
2. **Asisten Moderator/co-fasilitator**, yaitu orang yang intensif mengamati jalannya FGD, dan ia membantu moderator mengenai: waktu, fokus diskusi (apakah tetap terarah atau keluar jalur), apakah masih ada pertanyaan penelitian yang belum terjawab, apakah ada peserta FGD yang terlalu pasif sehingga belum memperoleh kesempatan berpendapat.
3. **Pencatat Proses/Notulen**, yaitu orang bertugas mencatat inti permasalahan yang didiskusikan serta dinamika kelompoknya. Umumnya dibantu dengan alat pencatatan berupa satu unit komputer atau laptop yang lebih fleksibel.
4. **Penghubung Peserta**, yaitu orang yang mengenal (person, medan), menghubungi, dan memastikan partisipasi peserta. Biasanya disebut mitra kerja lokal di daerah penelitian.
5. **Penyedia Logistik**, yaitu orang-orang yang membantu kelancaran FGD berkaitan dengan penyediaan transportasi, kebutuhan rehat, konsumsi, akomodasi (jika diperlukan), insentif (bisa uang atau barang/cinderamata), alat dokumentasi, dll.
6. **Dokumentasi**, yaitu orang yang mendokumentasikan kegiatan dan dokumen FGD: memotret, merekam (audio/video), dan menjamin berjalannya alat-alat dokumentasi, terutama perekam selama dan sesudah FGD berlangsung.
7. **Lain-lain** jika diperlukan (tentatif), misalnya petugas antar-jemput, konsumsi, bloker (penjaga “keamanan” FGD, dari gangguan, misalnya anak kecil, preman, telepon yang selalu berdering, teman yang dibawa peserta, atasan yang datang mengawasi, dsb)

2) Memilih dan Mengatur Tempat

Tempat FGD ini direncanakan di Sekretariat Program Unggulan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat karena merupakan tempat yang nyaman, aman dan memiliki ruang diskusi/rapat yang memadai dilengkapi fasilitas proyektor untuk presentasi.

Untuk pengaturan tempat menyesuaikan dengan pengaturan fasilitas ruang rapat yang sudah ada di Lantai II Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB.

3) Menyiapkan Logistik

Logistik adalah berbagai keperluan teknis yang diperlukan sebelum, selama, dan sesudah FGD terselenggara. Logistik yang diperlukan meliputi peralatan tulis (ATK), dokumentasi (audio/video), dan kebutuhan-kebutuhan peserta FGD: seperti konsumsi dan bahan-bahan diskusi.

4). Jumlah Peserta

Dalam FGD ini jumlah peserta dalam setiap kali FGD akan diundang peserta 7 - 15 orang. Untuk peserta melibatkan seluruh pihak Pemangku Amanah Antara Lain :

1. Unsur SKPD.
2. Unsur DPRD
3. Unsur Tokoh Agama/ Tokoh Masyarakat
4. LSM
5. Akademisi
6. Organisasi Profesi
7. Media Masa
8. Dunia Usaha
9. Kelompok Sasaran
10. Unit Pengawasan
11. Sekretariat Program Unggulan
12. Tim G-3A
13. PKK/Organisasi Wanita
14. Organisasi Masyarakat

Dengan demikian selama empat kali FGD seluruh peserta akan mencapai 60 orang.

5). *Rekrutmen Peserta*

Rekrutmen peserta akan menggunakan pertimbangan utama yaitu kompetensi informan yang dipandang memiliki kapasitas dan pemahaman terkait dengan topik permasalahan.

E. PELAKSANAAN FGD

Keberhasilan pelaksanaan FGD sangat ditentukan oleh kecakapan moderator. Peran Moderator dalam FGD adalah (a) membuka FGD, (b) meminta klarifikasi, (c) melakukan refleksi, (d) memotivasi, (e) probing (penggalan lebih dalam), (f) melakukan *blocking* dan distribusi (mencegah ada peserta yang dominan dan memberi kesempatan yang lain untuk bersuara), (g) reframing, (h) refokus, (i) melerai perdebatan, (j) memanfaatkan jeda (pause), (k) menegosiasi waktu, dan (l) menutup FGD.

Sebagai moderator dalam FGD ini adalah Sekretaris Harian Sekretariat Program Unggulan Provinsi NTB yang telah memiliki pengalaman dan kecakapan dalam pelaksanaan FGD serta telah mendalami progres dan capaian kinerja program unggulan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

F. ANALISIS DATA DAN PENYUSUNAN LAPORAN FGD

Analisis data dan Penulisan Laporan FGD adalah tahap akhir dari kerja keras peneliti. Langkah-langkahnya dapat ditempuh sebagai berikut:

1. Mendengarkan atau melihat kembali rekaman FGD
2. Menulis kembali hasil rekaman secara utuh (membuat transkrip)
3. Membaca kembali hasil transkrip
4. Menetapkan masalah-masalah (topik-topik) yang menonjol dan berulang-ulang muncul dalam transkrip, lalu dikelompokkan menurut masalah atau topik.
5. Data yang muncul dalam FGD biasanya mencakup:
 - a. Konsensus
 - b. Perbedaan Pendapat
 - c. Pengalaman yang Berbeda

- d. Ide-ide inovatif yang muncul, dan sebagainya.
6. Membuat koding dari hasil transkripsi menurut pengelompokan masalah/topik. Setelah pekerjaan di atas selesai, hasilnya dituliskan atau dilaporkan. Laporan FGD memuat poin-poin berikut ini: (a) identitas subjek (untuk kasus tertentu diperlukan deskripsi subjek, bisa ditulis dalam lampiran); (b) tujuan FGD; (c) bentuk FGD; (d) waktu FGD; (e) tempat berlangsungnya FGD; (f) alat bantu dalam FGD; (g) berapa kali dilakukan FGD; (h) tema-tema atau temuan penting dalam FGD, (i) kendala-kendala selama proses FGD; (j) pemahaman-pemaknaan FGD; dan (k) pembahasan hasil FGD.

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 8.**KUESIONER****(Diisi oleh Kelompok Penerima Manfaat G3A)****I. Identitas**

Nama :

Alamat :

No. Telp. dan Fax :

E-mail / Website :

1. Dalam implementasi program G-3-A Bagaimana pendapat Bp/Ibu/Sdr tentang beberapa hal yaitu :

- | | | | |
|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|
| a. Kepuasan publik | <input type="checkbox"/> Kurang | <input type="checkbox"/> Cukup | <input type="checkbox"/> Puas |
| b. Persepsi publik | <input type="checkbox"/> Kurang | <input type="checkbox"/> Baik | <input type="checkbox"/> Sangat Baik |
| c. Kritik media | <input type="checkbox"/> Kurang | <input type="checkbox"/> Banyak | <input type="checkbox"/> Sangat Banyak |

2. Bagaiaman harapan Bp/Ibu/Sdr terhadap implementasi program G-3-A dalam dua tahun ke depan :

- | | | |
|------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| a. Dihentikan | <input type="checkbox"/> ya | <input type="checkbox"/> tidak |
| b. Diteruskan | <input type="checkbox"/> ya | <input type="checkbox"/> tidak |
| c. Ditinjau | <input type="checkbox"/> ya | <input type="checkbox"/> tidak |
| d. Disempurnakan | <input type="checkbox"/> ya | <input type="checkbox"/> tidak |
| e. Ditingkatkan | <input type="checkbox"/> ya | <input type="checkbox"/> tidak |

3. Apa saran Bp/Ibu/Sdr untuk perbaikan program G-3-A ?:

.....

Mataram, Nopember 2011

Responden,

(_____)

Lampiran 9.**TRANSKRIP WAWANCARA**

Kode : 1
 Nama Informan : Gubernur NTB (DR. TGH. M. Zainul Majdi)
 Tanggal : 21 Desember 2011
 Jam : 09.00 - 10.00
 Disusun Jam : 13.00 - 14.00
 Tempat Wawancara : Kantor Gubernur NTB
 Topik Wawancara : Kebijakan Pembangunan NTB Bersaing

Proses	Materi Wawancara
Peneliti	Apa latar belakang perlu adanya Kebijakan Pembangunan NTB Bersaing?
Informan	NTB dalam sepuluh tahun terakhir IPMnya selalu nomor 32 dari 33 Provinsi. Perlu ada percepatan sehingga ada lompatan yang tinggi untuk dapat merubah ranking IPM NTB. Caranya tentu harus ada kebijakan pembangunan yang fokus pada program-program yang dapat mengangkat nilai IPM seperti pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat.
Peneliti	Bagaimana bentuk Kebijakan Pembangunan NTB Bersaing?
Informan	Program terpadu yang melibatkan berbagai pihak dan sektor pembangunan. Program ini juga harus menjadi unggulan daerah, itulah sebabnya diluncurkan Gerakan Tiga A (Aknino, Adono dan Absano)
Peneliti	Bagaimana pola Implementasi Kebijakan tersebut?
Informan	Pelaksanaan G3A merupakan gerakan perubahan sosial yang bersifat partisipatif untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Melalui pola gerakan tersebut, dapat terbangun suatu komitmen semua pihak untuk menuntaskan tiga permasalahan mendasar yang dihadapi Pemerintah Provinsi NTB maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB yaitu menurunkan Angka Kematian Ibu menuju Nol, menurunkan Angka Drop Out di jenjang pendidikan dasar menuju nol, serta menurunkan Angka Buta Aksara menuju Nol.
Peneliti	Untuk pelaksanaan program G3A, bagaimana pengorganisasiannya sehingga dapat terwujud sebagai suatu gerakan?

Informan	Organisasi pelaksanaan program unggulan harus berjalan efektif dengan melibatkan seluruh jajaran Pemerintah Provinsi NTB sesuai wewenang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Peneliti	Bagaimana menggalang dukungan masyarakat agar terlibat dalam implementasi G3A?
Informan	G3A harus berbasis di Pedesaan dengan melibatkan aparat desa dan tokoh-tokoh masyarakat termasuk pesantren. Keterlibatan pesantren harus dioptimalkan agar partisipasi masyarakat meluas seperti program KB ketika masyarakat kurang menerima, namun setelah tokoh agama dilibatkan program KB diterima dan berhasil.
Refleksi	Kebijakan pembangunan NTB Bersaing diimplementasikan melalui program G3A dimaksudkan untuk mempercepat Peningkatan IPM NTB.

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 10.**TRANSKRIP WAWANCARA**

Kode : 2
 Nama Informan : Kepala Dinas Kesehatan/ DR. H.M. Ismail
 Tanggal : 24 Desember 2011
 Jam : 09.00 - 10.30
 Disusun Jam : 13.00 - 14.00
 Tempat Wawancara : Dinas Kesehatan Prov. NTB
 Topik Wawancara : Implementasi Kebijakan G3A

Proses	Materi Wawancara
Peneliti	Apakah Gubernur selaku pembuat kebijakan sudah memberikan informasi yang jelas mengenai sasaran dan tujuan kebijakan G-3-A? Jika sudah, jelaskan melalui apa informasi-informasi tersebut diberikan.
Informan	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah dan secara rutin dalam rapat-rapat pimpinan, sasaran dan tujuan kebijakan G3A dijelaskan dengan detail. • Juga dalam setiap tatap muka sering diingatkan agar upaya peningkatan IPM dengan menurunkan angka kematian bayi menjadi perhatian. • Informasi banyak diperoleh di berbagai media baik media cetak, elektronik serta online.
Peneliti	Apakah Gubernur sudah memberikan penjelasan dalam bentuk petunjuk teknis (Juknis) atau Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) mengenai apa-apa yang harus dilakukan oleh pelaksana kebijakan G-3-A? Jika sudah, bagaimana kejelasan Juknis dan Juklak tersebut.
Informan	<ul style="list-style-type: none"> • Melalui Sekretariat G3A telah disusun kebijakan teknis yang menjadi panduan SKPD dalam implementasi G3A. • Juga dalam Rakor Teknis dijelaskan Juknis dan Juklak dalam implementasi G3A
Peneliti	Bagaimana koordinasi antar instansi atau antar bagian atau antar seksi terkait dengan pelaksanaan kebijakan G-3-A di Provinsi Nusa Tenggara Barat? Apakah sudah saling mendukung dan sudah berjalan dengan baik?

Informan	Dari sisi program sudah ada arahan yang jelas agar saling mendukung dan memperkuat. Namun pada tingkat koordinasi masih lemah, sehingga sasaran di lapangan belum dapat mencapai target, ada kesan juga masih jalan sendiri-sendiri
Peneliti	Apakah SDM pelaksana kebijakan G-3-A di Provinsi Nusa Tenggara Barat secara kuantitas sudah mencukupi?
Informan	Belum mencukupi: wilayah cakupan sasaran program Akino sangat luas, sehingga sumber daya yang ada masih terasa kurang. Lebih-lebih secara hirarkis perangkat dan aparatur kesehatan di desa-desa tidak ada hubungan hirarkie dengan Dikes Provinsi. Jadi belum efektif kerjanya.
Peneliti	Apakah SDM pelaksana G-3-A di Provinsi Nusa Tenggara Barat secara kualitas sudah memadai? Jika belum jelaskan dimana kelemahannya?
Informan	Juga kualitas SDM masih rendah, perlu ada peningkatan kapasitas secara berkelanjutan
Peneliti	Bagaimana dengan kondisi finansial untuk pelaksanaan kebijakan G-3-A? Apakah jumlahnya sudah mencukupi dan darimana alokasi anggaran tersebut diperoleh?
Informan	<ul style="list-style-type: none"> • Anggaran juga dirasakan masih sangat kurang termasuk biaya operasional. • Sumber dana ada dari APBD dan APBN
Peneliti	Bagaimana dengan kondisi antara sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan G-3-A di Provinsi Nusa Tenggara Barat? Jika belum memadai, jelaskan sarana dan prasarana apa saja yang masih dirasa kurang?
Informan	Sarana mobilitas juga terbatas sekali termasuk juga perlengkapan berupa alat kerja serta sarana prasarana pelayanan. Kekurangan sarana diharapkan dari swadaya masyarakat
Peneliti	Bagaimana tanggapan Anda dengan adanya kebijakan G-3-A? Apakah Anda mendukung sepenuhnya? Jika mendukung berikan alasan-alasannya.
Informan	G3A sangat penting dan tepat sekali dalam melakukan intervensi masalah dalam bidang kesehatan dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Sebab hanya dengan perubahan prilaku masyarakat program peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat dipercepat

Peneliti	Bagaimana pemahaman Anda secara umum mengenai kebijakan G-3-A yang menjadi tugas Anda untuk mengimplementasikannya? Jika belum paham, sebutkan hal-hal apa saja yang Anda belum pahami?
Informan	Dari sisi perencanaan, konsep dan pelaksanaan G3A sudah baik dan mudah dipahami namun permasalahan pada tingkat partisipasi masyarakat yang masih lemah, oleh karena itu swadaya masyarakat perlu ditingkatkan sehingga berkembang menjadi suatu gerakan. Disinilah letak masalah yang masih dihadapi oleh aparatatur Pemerintah adalah bagaimana mewujudkan program G3A menjadi suatu gerakan masyarakat
Peneliti	Apakah anda memiliki komitmen yang kuat untuk mengimplementasikan kebijakan G-3-A? Jika ya, jelaskan dengan komitmen tersebut ditunjukkan.
Informan	G3A harus berhasil menjadi suatu gerakan peningkatan IPM agar NTB semakin maju agar sejajar dengan daerah-daerah yang sudah maju. Untuk itu kerjasama dengan semua pihak harus terus ditingkatkan dan diperluas.
Peneliti	Bagaimana dengan transparansi pelaksanaan kebijakan G-3-A? Apakah ada laporan-laporan periodik untuk mempertanggungjawabkannya? Jika ada, dalam bentuk apa laporan-laporan tersebut dibuat?
Informan	Secara rutin selalu disusun laporan secara berkala dan disampaikan dalam rapat-rapat koordinasi progress program G3A.
Peneliti	Apakah unit organisasi pelaksana G-3-A memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas? Jika ada, apakah setiap pelaksana kebijakan sudah memahami dan melaksanakannya sesuai dengan prosedur yang ada?
Informan	Belum ada secara khusus SOP
Peneliti	Apakah pola-pola hubungan kerja antar bagian dalam organisasi terjalin dengan baik, sehingga tidak mengakibatkan benturan tugas?
Informan	Masih ada kelemahan pada pola kerja disetiap SKPD pendukung dan pelayanannya pada masyarakat masih kurang
Peneliti	Apakah sudah ada aturan yang jelas mengenai wewenang dan tanggungjawab dari masing-masing pelaksana kebijakan G-3-A? Jika sudah ada, jelaskan apakah pelaksanaannya sudah sesuai aturan yang ada.

Informan	Belum diformalkan dalam suatu kebijakan hanya terdapat pembagian tugas secara umum yang diatur didalam SK Sekretariat G3A.
Refleksi	Implementasi Kebijakan G3A sudah dilaksanakan namun SDM masih terbatas. Juga struktur birokrasi belum mendukung. Hanya faktor komunikasi dan disposisi yang tampak sangat mendukung.

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 11.**TRANSKRIP WAWANCARA**

Kode : 3
 Nama Informan : Kadis DIKPORA/ H.L. M Syafii
 Tanggal : 26 Desember 2011
 Jam : 09.00 - 10.30
 Disusun Jam : 13.00 - 14.00
 Tempat Wawancara : Dikpora Prov. NTB
 Topik Wawancara : Implementasi Kebijakan G3A

Proses	Materi Wawancara
Peneliti	Apakah Gubernur selaku pembuat kebijakan sudah memberikan informasi yang jelas mengenai sasaran dan tujuan kebijakan G-3-A? Jika sudah, jelaskan melalui apa informasi-informasi tersebut diberikan.
Informan	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah jelas sebagaimana termuat dalam Blue Print G3A yang memuat target yang ingin dicapai dalam program Absano dan Adono. • Media partner yang digunakan untuk diseminasi informasi G3A adalah Koran Lombok Post dan Koran Suara NTB. Kedua koran ini merupakan dua media terbesar dan berpengaruh dalam pembentukan opini publik di NTB, sehingga kedua media ini selalu mendapat prioritas kerjasama
Peneliti	Apakah Gubernur sudah memberikan penjelasan dalam bentuk petunjuk teknis (Juknis) atau Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) mengenai apa-apa yang harus dilakukan oleh pelaksana kebijakan G-3-A? Jika sudah, bagaimana kejelasan Juknis dan Juklak tersebut.
Informan	Juknis dan Juklak sudah ada diterbitkan dalam bentuk surat edaran dan juga petunjuk-petunjuk yang disimpulkan dalam rapat-rapat koordinasi
Peneliti	Bagaimana koordinasi antar instansi atau antar bagian atau antar seksi terkait dengan pelaksanaan kebijakan G-3-A di Provinsi Nusa Tenggara Barat? Apakah sudah saling mendukung dan sudah berjalan dengan baik?
Informan	Koordinasi masih menjadi hambatan karena belum berjalan baik.

Peneliti	Apakah SDM pelaksana kebijakan G-3-A di Provinsi Nusa Tenggara Barat secara kuantitas sudah mencukupi?
Informan	Belum mencukupi dari kebutuhan yang diperlukan. Tertama sekali tenaga fasilitator dilapangan masih kurang.
Peneliti	Apakah SDM pelaksana G-3-A di Provinsi Nusa Tenggara Barat secara kualitas sudah memadai? Jika belum jelaskan dimana kelemahannya?
Informan	Kapasitas tenaga juga masih rendah
Peneliti	Bagaimana dengan kondisi finansial untuk pelaksanaan kebijakan G-3-A? Apakah jumlahnya sudah mencukupi dan darimana alokasi anggaran tersebut diperoleh?
Informan	Dana operasional tidak cukup tersedia. Demikian pula untuk honorarium petugas lapangan tidak tersedia untuk pengendalian kegiatan di tingkat lapangan/pedesaan. Selama ini Pemerintah Provinsi NTB telah mengalokasikan dana sepuluh juta per desa untuk perangkat saja desa dalam rangka mendukung pelaksanaan pendataan G3A
Peneliti	Bagaimana dengan kondisi antara sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan G-3-A di Provinsi Nusa Tenggara Barat? Jika belum memadai, jelaskan sarana dan prasarana apa saja yang masih dirasa kurang?
Informan	Peralatan pembelajaran juga dirasakan sangat kurang oleh para penerima manfaat program. Begitula dengan sarana mobilitas untuk menjangkau wilayah pedesaan yang demikian banyak dalam rangka monitoring dirasakan sangat terbatas. Apalagi untuk mendukung kegiatan lapangan, sarana mobilitas sangat diperlukan tetapi tidak cukup tersedia.
Peneliti	Bagaimana tanggapan Anda dengan adanya kebijakan G-3-A? Apakah Anda mendukung sepenuhnya? Jika mendukung berikan alasan-alasannya.
Informan	Kebijakan ini perlu diteruskan karena masalah pengentasan buta huruf tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah tapi perlu partisipasi masyarakat
Peneliti	Bagaimana pemahaman Anda secara umum mengenai kebijakan G-3-A yang menjadi tugas Anda untuk mengimplementasikannya? Jika belum paham, sebutkan hal-hal apa saja yang Anda belum pahami?
Informan	<ul style="list-style-type: none"> • G3A sebagai program terpadu memerlukan partisipasi masyarakat di pedesaan sehingga implementasi menjadi lebih efektif • Namun G3A masih ditetapkan sebagai program Pemerintah sementara

	sehingga perwujudannya sebagai gerakan perlu terus ditingkatkan.
Peneliti	Apakah anda memiliki komitmen yang kuat untuk mengimplementasikan kebijakan G-3-A? Jika ya, jelaskan dengan komitmen tersebut ditunjukkan.
Informan	Harus mempercepat pencapaian target G3A perlu dilakukan pengisian database agar kelompok sasaran lebih tepat.
Peneliti	Bagaimana dengan transparansi pelaksanaan kebijakan G-3-A? Apakah ada laporan-laporan periodik untuk mempertanggungjawabkannya? Jika ada, dalam bentuk apa laporan-laporan tersebut dibuat?
Informan	Pelaporan dibuat secara periodik yang melampirkan progress kegiatan per triwulan dan tahunan
Peneliti	Apakah unit organisasi pelaksana G-3-A memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas? Jika ada, apakah setiap pelaksana kebijakan sudah memahami dan melaksanakannya sesuai dengan prosedur yang ada?
Informan	Belum ada
Peneliti	Apakah pola-pola hubungan kerja antar bagian dalam organisasi terjalin dengan baik, sehingga tidak mengakibatkan benturan tugas?
Informan	Struktur organisasi masih belum efektif dan tampaknya belum ada sinergi yang baik
Peneliti	Apakah sudah ada aturan yang jelas mengenai wewenang dan tanggungjawab dari masing-masing pelaksana kebijakan G-3-A? Jika sudah ada, jelaskan apakah pelaksanaannya sudah sesuai aturan yang ada.
Informan	Sudah ada namun pengendali dan pengarah belum efektif berjalan
Refleksi	Implementasi G3A telah tertuang dalam program Absano dan Adono telah berjalan baik dan telah dapat menurunkan angka buta aksara dan drop out yang berdampak pada peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS

Lampiran 12**TRANSKRIP WAWANCARA**

Kode : 4
 Nama Informan : Sekretaris G3A/ Soedaryanto
 Tanggal : 27 Desember 2011
 Jam : 09.00 - 10.30
 Disusun Jam : 13.00 - 14.00
 Tempat Wawancara : Sekretariat Program Unggulan
 Topik Wawancara : Implementasi Kebijakan G3A

Proses	Materi Wawancara
Peneliti	Apakah Gubernur selaku pembuat kebijakan sudah memberikan informasi yang jelas mengenai sasaran dan tujuan kebijakan G-3-A? Jika sudah, jelaskan melalui apa informasi-informasi tersebut diberikan.
Informan	Kebijakan G3A telah tertuang jelas dalam Perda Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJMD Tahun 2009-2013
Peneliti	Apakah Gubernur sudah memberikan penjelasan dalam bentuk petunjuk teknis (Juknis) atau Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) mengenai apa-apa yang harus dilakukan oleh pelaksana kebijakan G-3-A? Jika sudah, bagaimana kejelasan Juknis dan Juklak tersebut.
Informan	Juknis dan Juklak sudah ada dan dimuat dalam Blu print tiap-tiap Program G3A
Peneliti	Bagaimana koordinasi antar instansi atau antar bagian atau antar seksi terkait dengan pelaksanaan kebijakan G-3-A di Provinsi Nusa Tenggara Barat? Apakah sudah saling mendukung dan sudah berjalan dengan baik?
Informan	Koordinasi belum cukup efektif, belum ada SOP yang jelas dalam pihak pengendali G3A.
Peneliti	Apakah SDM pelaksana kebijakan G-3-A di Provinsi Nusa Tenggara Barat secara kuantitas sudah mencukupi?
Informan	SDM masih kurang

Peneliti	Apakah SDM pelaksana G-3-A di Provinsi Nusa Tenggara Barat secara kualitas sudah memadai? Jika belum jelaskan dimana kelemahannya?
Informan	Kualitas SDM juga masih rendah
Peneliti	Bagaimana dengan kondisi finansial untuk pelaksanaan kebijakan G-3-A? Apakah jumlahnya sudah mencukupi dan darimana alokasi anggaran tersebut diperoleh?
Informan	Anggaran juga masih sangat terbatas
Peneliti	Bagaimana dengan kondisi antara sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan G-3-A di Provinsi Nusa Tenggara Barat? Jika belum memadai, jelaskan sarana dan prasarana apa saja yang masih dirasa kurang?
Informan	Fasilitas seperti sarana mobilitas juga belum memadai
Peneliti	Bagaimana tanggapan Anda dengan adanya kebijakan G-3-A? Apakah Anda mendukung sepenuhnya? Jika mendukung berikan alasan-alasannya.
Informan	Kebijakan, belum ada payung hukum, sehingga keberlanjutan masih diragukan. Mekanisme & sistem monev belum ada; koordinasi masih lemah, pengorganisasian di tingkat kabupaten saat ini tidak ada, dan G3A masih di tingkat pucuk pimpinan sedangkan di tingkat birokrasi masih lemah; Reward & Punishment juga belum ada.
Peneliti	Bagaimana pemahaman Anda secara umum mengenai kebijakan G-3-A yang menjadi tugas Anda untuk mengimplementasikannya? Jika belum paham, sebutkan hal-hal apa saja yang Anda belum pahami?
Informan	Sebagai sebuah terobosan, G3A ini sangat baik. Memang, masyarakat NTB ini memerlukan gagasan dan kerja serius dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), mengingat kita ini masih jauh di bawah provinsi-provinsi lain di Indonesia. Saya anggap gerakan ini match dengan persoalan kita di NTB. Karena ini gagasan dan pekerjaan besar, maka sinergitas semua pihak perlu digalakkan. Tidak bisa hanya dilakukan oleh Gubernur dan perangkatnya saja. Harus pula digerakkan partisipasi yang massif dari semua masyarakat, termasuk masyarakat akademis, dunia usaha, Ormas, dan komunitas-komunitas. Persoalan metode dan cara implementasi disesuaikan saja dengan keadaan-keadaan di lapangan. Prinsip keberlanjutan juga harus diutamakan. Kita tidak bisa sepenuhnya berharap masalah buta aksara, putus sekolah, dan kematian ibu dan anak tuntas dalam waktu cepat, dalam waktu 1 periode jabatan gubernur. Karena

	itu, perlu dibangun sistem yang menjamin gerakan ini berjalan terus meskipun gubernur penggagasnya yang sekarang berakhir tugasnya
Peneliti	Apakah anda memiliki komitmen yang kuat untuk mengimplementasikan kebijakan G-3-A? Jika ya, jelaskan dengan komitmen tersebut ditunjukkan.
Informan	Berkaitan dengan data masih belum akurat, belum ada koordinasi validasi data. Gerakan 3A juga masih sebatas proyek, kurang kreatif; belum banyak melibatkan aktor lain (FKSPP, OMS dan sebagainya)
Peneliti	Bagaimana dengan transparansi pelaksanaan kebijakan G-3-A? Apakah ada laporan-laporan periodik untuk mempertanggungjawabkannya? Jika ada, dalam bentuk apa laporan-laporan tersebut dibuat?
Informan	Pelaporan dibuat secara periodik Triwulan dan Tahun
Peneliti	Apakah unit organisasi pelaksana G-3-A memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas? Jika ada, apakah setiap pelaksana kebijakan sudah memahami dan melaksanakannya sesuai dengan prosedur yang ada?
Informan	Belum ada SOP
Peneliti	Apakah pola-pola hubungan kerja antar bagian dalam organisasi terjalin dengan baik, sehingga tidak mengakibatkan benturan tugas?
Informan	Struktur organisasi masih belum dapat menjalankan koordinasi dengan baik. Sekretariat G3A sebagai pihak pengendali perlu direvitalisasi.
Peneliti	Apakah sudah ada aturan yang jelas mengenai wewenang dan tanggungjawab dari masing-masing pelaksana kebijakan G-3-A? Jika sudah ada, jelaskan apakah pelaksanaannya sudah sesuai aturan yang ada.
Informan	Belum diatur secara jelas terutama hubungan dengan perangkat di desa-desa.
Refleksi	Fungsi koordinasi dan pengendali kegiatan G3A masih kurang sehingga target pencapaian yang ditetapkan oleh pemerintah sulit dicapai

Lampiran 13.**TRANSKRIP WAWANCARA**

Kode : 5
 Nama Informan : TGH. Hasanain Djuaini
 Tanggal : 27 Desember 2011
 Jam : 20.00 - 21.00
 Disusun Jam : 22.00 – 24.00
 Tempat Wawancara : Ponpes Nurul Haramain Narmada
 Topik Wawancara : Penerima Manfaat G3A

Proses	Materi Wawancara
Peneliti	Apakah SKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah memberikan informasi yang jelas mengenai sasaran dan tujuan kebijakan G-3-A? Jika sudah, jelaskan melalui apa informasi-informasi tersebut diberikan.
Informan	Penjelasan/informasi banyak diperoleh dari berbagai media baik cetak, elektronik maupun internet.
Peneliti	Apakah SKPD di Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah memberikan penjelasan dalam bentuk Petunjuk Teknis (Juknis) atau Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) mengenai apa-apa yang harus dilakukan oleh Pengurus Koperasi untuk G-3-A? Jika sudah, bagaimana kejelasan Juknis dan Juklak tersebut.
Informan	Ada dapat dilihat dari banyaknya lembar laporan yang beredar di masyarakat yang memberikan petunjuk teknis.
Peneliti	Bagaimana koordinasi antar instansi atau antar bagian atau antar seksi terkait dengan pelaksanaan kebijakan G-3-A di Provinsi Nusa Tenggara Barat? Apakah sudah saling mendukung dan sudah berjalan dengan baik?
Informan	Belum kompak seperti terlihat dari masih terbatasnya jajaran SKPD turun ke lapangan
Peneliti	Apakah SDM pelaksana kebijakan G-3-A di Provinsi Nusa Tenggara Barat secara kuantitas sudah mencukupi?

Informan	Kualitasnya sangat kurang
Peneliti	Apakah SDM pelaksana kebijakan G-3-A di Provinsi Nusa Tenggara Barat secara kuantitas sudah memadai? Jika belum jelaskan dimana kelemahannya.
Informan	Kualitas masih perlu ditingkatkan
Peneliti	Bagaimana dengan kondisi finansial untuk pelaksanaan kebijakan G-3-A? Apakah jumlahnya sudah mencukupi dan darimana alokasi anggaran tersebut diperoleh?
Informan	Juga anggaran kelihatannya masih sangat terbatas dan masih mengharapkan swadaya masyarakat.
Peneliti	Bagaimana dengan kondisi sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan G-3-A di Provinsi Nusa Tenggara Barat? Jika belum memadai, jelaskan sarana dan prasarana apa saja yang masih dirasa kurang?
Informan	Sarana/prasarana juga masih kurang
Peneliti	Bagaimana tanggapan Anda dengan adanya kebijakan G-3-A? Apakah Anda mendukung sepenuhnya? Jika mendukung berikan alasan-alasannya.
Informan	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan G3A perlu diteruskan • Dulu program KB gagal kemudian berhasil, karena kemampuan para Tuan Guru. Seperti dulu ke Bayan dikirimkan para ulama atau dai untuk memberi pencerahan. Itu yang harusnya diikuti dalam mendukung G3A ini.
Peneliti	Bagaimana dengan transparansi pelaksanaan G-3-A? Apakah ada laporan-laporan periodik untuk mempertanggungjawabkannya? Jika ada, dalam bentuk apa laporan-laporan tersebut dibuat?
Informan	Pelaporan dibuat tiap triwulan dan tahunan
Peneliti	Apakah unit organisasi pelaksana G-3-A memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas? Jika ada, apakah setiap pelaksana kebijakan sudah memahami dan melaksanakannya sesuai dengan prosedur yang ada?
Informan	Belum ada

Peneliti	Apakah pola-pola hubungan kerja antar bagian dalam organisasi terjalin dengan baik, sehingga tidak mengakibatkan benturan tugas?
Informan	Belum begitu baik
Peneliti	Apakah sudah ada aturan yang jelas mengenai wewenang dan tanggungjawab dari masing-masing pelaksana kebijakan G-3-A? Jika sudah ada, jelaskan apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan aturan yang ada.
Informan	Sudah ada sebagaimana seringkali disampaikan dalam pertemuan kepada penerima manfaat
Refleksi	Para penerima manfaat mengharapkan bahwa G3A perlu dilanjutkan dan direview targetnya.

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 14.**Kritik media terhadap Implementasi G3A**

Kritik	Responden	%
Kurang	28	28.57
Banyak	70	71.43
Sangat banyak	0	0.00
Jumlah	98	100

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 15.

Harapan Publik terhadap Implementasi G3A

Parameter	Harapan				
	Dihentikan	Diteruskan	DiTinjau	Disempurnakan	Ditingkatkan
Ya	40 (%)	40 (%)	69 (%)	69 (%)	69 (%)
Tidak	58 (%)	58 (%)	29 (%)	29 (%)	29 (%)
Jumlah	98 (100)	98 (100)	98 (100)	98 (100)	98 (100)

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 16.**Tabel Kepuasan publik terhadap implementasi G3A**

Kepuasan	Jumlah Responden	%
Kurang	42	42.86
Cukup	56	57.14
Puas	-	
Jumlah	98	100.00

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 17**Persepsi Publik terhadap implementasi G3A**

Persepsi	Jumlah Responden	%
Kurang	24	24.49
Baik	0	0
Sangat Baik	78	79.59
Jumlah	98	100

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 18

**Dokumentasi Gambar Kegiatan Focus Group Discussion (FGD)
Tgl 20 s/d 23 Desember 2011.**

